

**PERAN GEREJA SEBAGAI AGEN PASTORAL DALAM PENDAMPINGAN
ANAK ASLI PAPUA YANG MENGALAMI PUTUS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN ST PAULUS PAROKI BAMBU PEMALI
KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik**



Oleh :

Nama : Yohana M Mabur

NIM : 2202056

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

2026

SKRIPSI
PERAN GEREJA SEBAGAI AGEN PASTORAL DALAM PENDAMPINGAN
ANAK ASLI PAPUA YANG MENGALAMI PUTUS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN ST PAULUS PAROKI BAMBU PEMALI
KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE

Oleh:

Nama : Yohana M Mabur

NIM : 2202056

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. Berlinda Setyo Yunarti, S.Sos., M.Pd.
NUPTK: 6952748649230142

Merauke, Agustus 2026

SKRIPSI

PERAN GEREJA SEBAGAI AGEN PASTORAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK ASLI PAPUA YANG MENGALAMI PUTUS SEKOLAH DI LINGKUNGAN ST PAULUS PAROKI BAMBU PEMALI KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE

Oleh:

Nama : Yohana M Mabur

NIM : 2202056

Telah Dipertahankan Di Hadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Pada
Senin, 3 Agustus 2026 Pukul 09.00 WIT

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Berlinda Setyo Yunarti, S. Sos, M. Pd


.....

Anggota : 1. Drs. Xaverius Wonmut, M. Hum


.....

2. Fransiskus Aknar Gamu, S. Pd, M. Pd


.....

3. Dr. Berlinda Setyo Yunarti, S.Sos, M. Pd


.....

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Ketua

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

NUPTK. 6049748649137042

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan penyertaan-Nya dalam setiap langkah penyusunan karya ini dari awal hingga akhir.
2. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan saya tanpa henti, serta memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
3. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap perjalanan pendidikan saya.
4. Dosen pembimbing saya, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan semangat di saat suka maupun duka.
6. Almamater saya tercinta, STK Santo Yakobus Merauke, tempat saya menimba ilmu dan menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Semoga karya ini dapat menjadi persembahan yang berarti dan bermanfaat bagi semua pihak yang telah berjasa dalam hidup saya.

HALAMAN MOTTO

“Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.”

(Markus 10:14)

Gereja bukan sekadar tempat beribadah, melainkan rumah yang terbuka bagi semua anak yang membutuhkan pendampingan, kasih, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

LEMBARAN PERYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan pertauran yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Merauke, 12 Agustus 2026



Yohana M Mabur

NIM 2202056

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Peran Gereja Sebagai Agen Pastoral Dalam Pendampingan Anak Asli Papua Yang Mengalami Putus Sekolah Di Lingkungan St Paulus Paroki Bambu Pemali Keuskupan Agung Merauke”*. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak tentu skripsi ini belum dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Donatus Wea, S.Ag. Lic, lur. Selaku ketua Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus
2. Dosen pembimbing Dr. Berlinda S. Yunarti, S. Sos, M. Pd.
3. Para wakil ketua dan ketua program studi di Sekolah Tinggi Katolik Santo. Yakobus Merauke.
4. Para dosen dan staf administrasi Sekolah Tinggi Katolik Santo. Yakobus Merauke.
5. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi, yang selalu memberi sumbangan pikiran dalam proses penulisan ini
6. Orang tua, saudara-saudariku yang memberikan dukungan baik secara moril maupun material dalam menyelesaikan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga di perguruan Tinggi.

7. Teman, sahabat, kenalan serta semua pihak yang selalu membantu penulis namun penulis tidak bisa menyebutnya satu persatu

Akhirnya, penulis menyadari bahwa ada berbagai kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dalam penyusun skripsi ini. Maka, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk lebih memberikan bobot ilmiah terhadap isi tulisan ini.

Merauke, 12 Agustus 2026



Yohana M Mabur

NIM 2202056

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Gereja sebagai agen pastoral dalam mendampingi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke; mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah; serta merumuskan strategi pastoral yang dapat dikembangkan Gereja untuk mengurangi angka putus sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivis-konstruktivis dan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, yang terdiri atas pastor atau tokoh pastoral, pengurus lingkungan, orang tua/wali, dan anak yang mengalami putus sekolah. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan memperhatikan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja telah menjalankan peran pastoral dalam mendampingi anak dan keluarga, tetapi pelaksanaannya belum seimbang pada seluruh dimensi pastoral. Dimensi koinonia menjadi kekuatan utama melalui penerimaan dan keterlibatan keluarga dalam kehidupan komunitas, sedangkan diakonia telah diwujudkan melalui bantuan konkret, tetapi masih bersifat karitatif dan jangka pendek. Kerygma telah dilaksanakan melalui kunjungan pastoral dan pewartaan tentang pentingnya pendidikan, tetapi belum menjangkau seluruh keluarga sasaran secara merata. Sementara itu, dimensi martyria, khususnya advokasi hak pendidikan anak kepada sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait, masih sangat terbatas. Faktor penyebab putus sekolah bersifat multidimensional dan saling berkaitan, dengan faktor ekonomi keluarga sebagai faktor yang paling dominan, disertai faktor budaya, sosial-lingkungan, dan kondisi internal anak.

Temuan penting penelitian menunjukkan bahwa anak-anak masih memiliki keinginan untuk kembali bersekolah apabila memperoleh dukungan yang memadai. Oleh karena itu, strategi pastoral perlu dikembangkan secara terencana, terpadu, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan melalui penguatan keluarga, pelayanan diakonia pendidikan, pastoral konseling, keterlibatan tokoh adat dan kearifan lokal, serta advokasi hak pendidikan melalui kerja sama Gereja, keluarga, sekolah, pemerintah, dan pihak terkait. Gereja diharapkan tidak hanya hadir sebagai komunitas yang menerima dan membantu, tetapi berkembang sebagai agen pastoral yang mampu memperjuangkan dan memulihkan hak pendidikan anak asli Papua.

Kata kunci: Gereja, agen pastoral, pendampingan pastoral, anak asli Papua, putus sekolah, pendidikan, Lingkungan Santo Paulus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	15
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Kajian Teori	20
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	65

2.3 Kerangka Pikir	71
BAB III METODE PENELITIAN	75
3.1 Jenis Penelitian	75
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	78
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	79
3.4 Definisi Konseptual	81
3.5 Definisi Operasional	84
3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	85
3.7 Subjek/Informan Penelitian	88
3.8 Sumber Data	89
3.9 Keabsahan Data	90
3.10 Teknik Analisis Data	92
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	94
4.2 Hasil Penelitian	98
4.3 Pembahasan	119
4.4 Keterbatasan Penelitian	139
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	141
5.1 Simpulan	141
5.2 Saran	145
5.3 Implikasi Pastoral	149

DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	160

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian	160
Lampiran 2. Wawancara dengan Anak Putus Sekolah Lingkungan Santo Paulus .	161
Lampiran 3. Wawancara dengan Orang Tua dari Anak yang Mengalami Putus Sekolah	161
Lampiran 4 Wawancara dengan Ketua Lingkungan Santo Paulus	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	71
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang dan Klasifikasi Wilayah di Indonesia Tahun 2023	5
Tabel 1.2 Data Kondisi Pendidikan Anak Asli Papua di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke	9
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan	65
Tabel 3.1 Karakteristik Pendekatan Penelitian yang Digunakan	76
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	79
Tabel 3.3 Subjek Penelitian dan Kriteria Pemilihan Informan	81
Tabel 3.4 Defenisi Konseptual Variabel Penelitian.....	82
Tabel 3.5 Panduan Fokus Wawancara per Kelompok Informan.....	87
Tabel 3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	88
Tabel 3.7 Informan Penelitian.....	88
Tabel 3.8 Sumber Data Sekunder Penelitian	90
Tabel 3.9 Kriteria dan Teknik Keabsahan Data	91
Tabel 3.10 Komponen Analisis Data Model Miles, Huberman & Saldaña (2014) ..	92
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian.....	97
Tabel 4.2 Usulan Strategi Pastoral Gereja	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2), serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, setiap anak usia 7 hingga 15 tahun diwajibkan menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun. Lebih dari sekadar kehadiran fisik di sekolah, kondisi pendidikan yang ideal mencakup pemenuhan kebutuhan belajar, dukungan keluarga, lingkungan sosial yang kondusif, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana ditegaskan oleh Setianingrum yang di kutip oleh (Chairuwidha, 2019), pendidikan merupakan investasi *human capital* yang memberikan kontribusi nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang.

Gereja Katolik, melalui berbagai dokumennya, juga menegaskan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari misi perutusan. Secara kelembagaan, Keuskupan Agung Merauke (KAMe) telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam arah pastoral keuskupan. Hal ini secara resmi tercantum dalam Program Kerja Jangka Panjang Keuskupan Agung Merauke yang ditetapkan melalui Musyawarah Pastoral (MUSPAS) KAMe tahun 2010. Dalam dokumen tersebut,

ditetapkan empat pilar utama pelayanan pastoral, salah satunya adalah "Pendidikan Publik dan Pengembangan Kebijakan yang Lebih Melindungi Hak-hak Dasar dan Kemanusiaan", dalam kerangka visi keuskupan menuju kemandirian serta kesejahteraan umat dan masyarakat di wilayah KAMe (KAMe, 2010). Komitmen terhadap pilar pendidikan ini kemudian ditegaskan kembali dalam MUSPAS KAMe tahun 2011 (KAMe, 2011). Penegasan ini berlanjut dalam MUSPAS 2012 yang bertema "Pemberdayaan dan Pengembangan Manusia yang Bermartabat Menuju Kesejahteraan Hidup Anak-anak Allah", di mana keuskupan menegaskan bahwa seluruh kegiatan pastoral harus diarahkan pada pemberdayaan komunitas basis menuju kemandirian umat, termasuk di bidang pendidikan (KAMe, 2012).

Komitmen tersebut kembali dikuatkan dalam MUSPAS 2013, yang secara konsisten menempatkan pendidikan publik sebagai bagian dari grand design pelayanan pastoral keuskupan (KAMe, 2013). Selanjutnya, MUSPAS 2017 dengan tema "Keluarga Keuskupan Agung Merauke yang Beriman" mencatat bahwa keuskupan telah memberikan bantuan studi kepada 590 anak dari jenjang SD hingga SMA, 48 anak di perguruan tinggi, serta membina lebih dari 200 anak di asrama-asrama yang tersebar di wilayah Merauke, Urumb, Kumbe, Kimaam, Kepi, dan Tana (KAMe, 2017).

Kenyataan di lapangan masih jauh dari kondisi ideal tersebut, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, dan komunitas adat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, angka putus sekolah nasional mencapai 2,17% untuk jenjang SD, 9,56%

untuk SMP, dan 33,21% untuk SMA. Secara keseluruhan, dari 30,2 juta anak usia sekolah, sekitar 29,21% tidak menyelesaikan pendidikan dari SD hingga SMA. Kondisi ini secara khusus dirasakan di wilayah Papua Selatan (Badan Pusat Statistik, 2023b).

Pendidikan di Papua Selatan melibatkan banyak pihak, salah satunya alah pihak Keuskupan Agung Merauke. Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC, secara terbuka menyatakan bahwa pelayanan pendidikan di daerah pedalaman tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan banyak tenaga pengajar yang meninggalkan tempat tugas mereka. Keprihatinan ini mendorong keuskupan untuk mengambil langkah konkret: Uskup Mandagi menegaskan bahwa hanya melalui pendidikan sebagai passport menuju kemandirian generasi anak asli Papua dapat berkembang dan tidak mudah terpinggirkan, sehingga para imam didorong untuk secara aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK). (Emanuel Riberu, 2022)

Pada tingkat kelembagaan, Keuskupan Agung Merauke melalui YPPK terus berupaya mengatasi berbagai persoalan pendidikan di wilayahnya, termasuk lemahnya pengawasan terhadap para guru di daerah pedalaman, dengan mengoptimalkan peran para pastor dan suster yang bertugas di kampung-kampung sebagai agen kontrol sekaligus pendamping pendidikan. Lebih jauh, keuskupan juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan formal, dengan mendirikan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Merauke yang berawal dari kelompok-kelompok

belajar yang dibentuk oleh bagian pembinaan masyarakat Keuskupan Agung Merauke. UNICEF juga mencatat bahwa sekitar 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (Khairani et al., 2025). Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah bukan hanya fenomena pinggiran, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Data (Badan Pusat Statistik, 2023b) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 juga mengungkap kesenjangan yang tajam antara wilayah perkotaan dan perdesaan di semua jenjang pendidikan. Kesenjangan paling mencolok terjadi pada jenjang SMA, di mana angka putus sekolah di perdesaan hampir dua kali lipat dibanding perkotaan. Pola yang sama juga terlihat pada jenjang SD dan SMP, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan akses pendidikan bukan persoalan satu jenjang, melainkan bersifat sistemik dan berlapis. Menurut (Nurul Janah, 2020) mempertegas bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab paling dominan terjadinya putus sekolah, diikuti pengaruh negatif lingkungan dan minimnya peran orang tua.

Sementara itu, (Widjayatri, 2025) mengklasifikasikan penyebab putus sekolah menjadi dua kategori: faktor internal seperti rendahnya motivasi dan kemampuan akademik, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, perceraian orang tua, dan perundungan. Kondisi ini menegaskan bahwa anak-anak di wilayah terpencil dan komunitas adat menghadapi hambatan berlapis yang jauh lebih besar.

Tabel 1.1 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang dan Klasifikasi Wilayah di Indonesia Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Tingkat Kota (%)	Tingkat Desa (%)	Nasional (%)	Tahun
SD / Sederajat	1,46	3,14	2,17	2023
SMP / Sederajat	7,15	12,99	9,56	2023
SMA / Sederajat	26,75	43,62	33,21	2023
Seluruh Jenjang	-	-	29,21	2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Situasi pendidikan di Papua menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. (Costa, 2023) melaporkan bahwa empat provinsi baru di Papua memiliki 314.606 anak yang tidak bersekolah, dengan jumlah terbesar terdapat di Papua Tengah sebanyak 95.380 anak, Papua Pegunungan 95.022 anak, Papua Selatan 92.988 anak, dan Papua Barat Daya 31.216 anak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan serius di Tanah Papua. Bahkan, sebelum pemekaran wilayah, (Khairani et al., 2025) mencatat bahwa Papua memiliki angka putus sekolah tertinggi secara nasional, yakni 2,38% pada jenjang SD dan 3,22% pada jenjang SMP. Data tersebut menegaskan bahwa persoalan putus sekolah di Papua bukan merupakan fenomena baru, melainkan persoalan pendidikan yang telah berlangsung dan memerlukan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan.

Di Provinsi Papua Selatan, persoalan keberlanjutan pendidikan masih menunjukkan kondisi yang serius. Pada awal 2023, Aloysius Jopeng, selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, mengungkapkan bahwa di Kabupaten Merauke terdapat sekitar 19.000 orang yang putus sekolah pada jenjang SD hingga SMA, sementara hanya sekitar 3.462 orang yang dapat ditampung melalui layanan pendidikan nonformal seperti PKBM dan SKB (Chelin, 2023). Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Papua Selatan pada Mei 2023, KPK turut menyoroti tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan. Angka sekitar 93.000 anak yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan formal maupun nonformal pada saat itu dikaitkan dengan data hasil kajian Agus Sumule dari Universitas Papua dan data BPS.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Papua Selatan tidak hanya berkaitan dengan anak yang mengalami putus sekolah, tetapi juga dengan kelompok anak yang sejak awal belum terjangkau oleh sistem pendidikan. Perbedaan kedua angka ini mencerminkan dua realitas yang berbeda: siswa yang keluar dari sistem pendidikan di tengah jalan, dan anak-anak yang bahkan tidak pernah masuk ke dalam sistem tersebut.

Rendahnya tata kelola anggaran pendidikan di Papua Selatan yang tercermin dari skor integritas daerah terendah secara nasional (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024) menjadi salah satu faktor struktural yang turut memperparah kondisi ini.

Khusus di Merauke, terdapat sekitar 32.000 anak yang tidak melanjutkan sekolah di tingkat SD dan 12.000 anak di tingkat SMP.

Penelitian (Berangka, 2022) di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, mengidentifikasi tiga faktor utama: pengaruh negatif lingkungan sosial, keterlibatan anak dalam mencari nafkah keluarga, dan tekanan finansial rumah tangga yang membuat anak tidak mampu membiayai pendidikan. Permasalahan serupa dijumpai secara langsung di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke. Lingkungan ini merupakan salah satu unit pastoral terkecil di bawah Keuskupan Agung Merauke yang dihuni oleh komunitas anak-anak asli Papua dengan berbagai latar belakang sosial-ekonomi yang rentan.

Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan pengurus Lingkungan Santo Paulus pada bulan Januari 2026, dari total 49 anak asli Papua yang tercatat di wilayah tersebut, hanya 21 anak (42,86%) yang masih aktif menempuh pendidikan formal. Adapun 28 anak lainnya (57,14%) telah putus sekolah atau tidak pernah mengikuti pendidikan formal sama sekali. Ini berarti lebih dari separuh anak di lingkungan tersebut kehilangan hak dasarnya atas pendidikan.

Secara demografis, Lingkungan St. Paulus dihuni oleh masyarakat yang multietnis, mencerminkan karakter Kota Merauke sebagai wilayah pertemuan berbagai suku bangsa dari dalam maupun luar Papua. Penduduk yang bermukim di lingkungan ini antara lain berasal dari suku Marind sebagai penduduk asli setempat, sedangkan suku Wanam dan Mappi adalah penduduk urban yang merupakan suku-suku asli wilayah selatan Papua. Ada juga suku Kei dan Asmat yang berasal dari

wilayah pesisir dan pedalaman Papua, suku Muyu serta suku Jawa sebagai representasi masyarakat pendatang dari luar Papua.

Keberagaman suku ini turut membentuk dinamika sosial-budaya yang kompleks dalam lingkungan tersebut, termasuk perbedaan pola asuh, orientasi nilai terhadap pendidikan, serta interaksi sosial antaretnis yang dapat memengaruhi cara pandang keluarga terhadap pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak mereka. Keragaman latar belakang etnis ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam mengkaji fenomena putus sekolah di Lingkungan St. Paulus, mengingat setiap kelompok suku membawa nilai budaya dan kebiasaan tersendiri yang turut memengaruhi keputusan keluarga dalam mendukung atau tidak mendukung kelanjutan pendidikan anak.

Kondisi di Lingkungan St. Paulus mencerminkan tiga persoalan yang saling berkaitan. Pertama, secara ekonomi, sebagian besar keluarga anak-anak ini hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga biaya pendidikan menjadi beban yang tidak ter pikul. Kedua, secara sosial-budaya, terdapat kecenderungan di antara sebagian orang tua untuk lebih mengutamakan anak bekerja atau membantu keluarga daripada bersekolah, yang diperkuat oleh minimnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan jangka panjang. Ketiga, dari sisi kelembagaan, belum ada program pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dari pihak manapun termasuk Gereja yang secara khusus menyasar anak-anak putus sekolah di lingkungan ini. Keempat kondisi tersebut membentuk siklus kemiskinan dan marginalisasi yang sulit

diputus tanpa intervensi dari lembaga yang memiliki kepercayaan dan kedekatan dengan komunitas.

Tabel 1.2 Data Kondisi Pendidikan Anak Asli Papua di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke

No	Kategori	Jumlah Anak	Persentase (%)	Keterangan
1	Total Anak Asli Papua yang Terdata	49	100,00	Populasi
2	Anak yang Masih Bersekolah	21	42,86	Aktif pendidikan formal
3	Anak yang Putus Sekolah	28	57,14	Tidak aktif pendidikan formal

Sumber: Data Primer - Observasi dan Wawancara di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, 2024

Data pada Tabel 1.3 sangat mengkhawatirkan: lebih dari separuh anak asli Papua (57,14%) di Lingkungan St. Paulus tidak dapat menikmati haknya atas pendidikan. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional maupun rata-rata Papua Selatan, dan mencerminkan betapa dalamnya jurang ketidakadilan pendidikan yang dialami komunitas ini. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan dan menuntut respons nyata dari seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga yang memiliki kehadiran langsung di tengah komunitas.

Gereja Katolik, sebagai lembaga yang memiliki tradisi panjang dalam pendidikan di Papua, sesungguhnya memegang posisi strategis yang tidak dimiliki lembaga lain. Dokumen (Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis*, 1965), menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat pendidikan sesuai dengan tujuan

hidupnya, dan Gereja berkewajiban memastikan hak tersebut terpenuhi. Paus (Francis, 2015) dalam *Laudato Si'* menekankan pentingnya pendidikan holistik yang tidak memisahkan perhatian terhadap manusia dari perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat yang paling lemah. Dalam (Francis, *Evangelii Gaudium*, 2018) Paus secara khusus mengajak Gereja untuk mewujudkan keberpihakan kepada kaum miskin dan rentan melalui tindakan nyata yang menjawab akar ketidakadilan sosial.

Menurut pendapat (Mulait, 2017) Gereja Katolik di Papua menghadapi tantangan besar dalam pelayanan pendidikan, terutama berkaitan dengan keterbatasan penyelenggaraan sekolah Katolik di wilayah pedalaman dan semakin terabaikannya hak anak-anak Papua atas pendidikan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Gereja dalam memperjuangkan pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua.

Gereja, melalui Keuskupan Agung Merauke dan struktur paroki hingga tingkat lingkungan, memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki lembaga lain: hadir secara konsisten di tengah komunitas, dipercaya oleh keluarga, dan menjangkau hingga unit pastoral terkecil seperti Lingkungan St. Paulus. Penelitian (Sasi & Tarihoran, 2024) membuktikan bahwa dukungan Gereja terhadap anak dan remaja melalui kelompok-kelompok pastoral terbukti efektif dalam menumbuhkan semangat, membentuk tanggung jawab, dan membangun karakter positif sejak dini. Potensi strategis ini perlu dioptimalkan secara sistematis melalui program pendampingan yang terstruktur, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata komunitas.

Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan tentang anak putus sekolah di Papua, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dan belum terjawab. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab putus sekolah secara umum dan rekomendasi kebijakan pemerintah (Berangka, 2022; Khairani et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan (Anam et al., 2025) mengkaji sekolah berpola asrama gratis sebagai salah satu solusi institusional untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa model asrama tidak hanya mengatasi hambatan geografis, jarak, dan biaya transportasi yang selama ini membatasi akses anak terhadap pendidikan, tetapi juga menyediakan lingkungan pendidikan yang terintegrasi melalui pembelajaran, pengasuhan, pembinaan karakter, dan dukungan psikososial. Kehidupan asrama dengan rutinitas yang terstruktur dan pendampingan guru serta pengelola berkontribusi terhadap peningkatan kehadiran dan motivasi belajar serta pembentukan disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah berasrama memiliki potensi sebagai strategi kelembagaan untuk mengurangi risiko putus sekolah di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas, keberlanjutan pendanaan, kualitas pengelolaan, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji *peran pastoral Gereja Katolik* khususnya pada tingkat lingkungan paroki dalam mendampingi anak-anak

asli Papua yang putus sekolah sampai saat ini belum ada. Kajian yang ada lebih banyak menyoroti peran gereja-gereja Protestan atau kajian pendidikan di level makro, sementara mekanisme pastoral Gereja Katolik di tingkat lingkungan seperti Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, masih sangat jarang diteliti secara mendalam.

Kesenjangan ini bukan sekadar kekosongan akademis ini adalah kekosongan praktis yang berdampak nyata bagi 28 anak di Lingkungan St. Paulus yang saat ini tidak bersekolah. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Gereja dapat berperan secara efektif melalui struktur pastoralnya, potensi besar yang dimiliki Gereja sebagai agen perubahan sosial akan terus tidak teroptimalkan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut: mengkaji secara sistematis peran dan strategi Gereja Katolik melalui Lingkungan Santo Paulus dalam mendampingi anak-anak asli Papua yang putus sekolah, serta merumuskan model pendampingan pastoral berbasis komunitas yang dapat direplikasi di unit-unit pastoral serupa di Papua.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan dalam mengatasi anak putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus (57,14%), dikombinasikan dengan posisi strategis Gereja Katolik yang belum dioptimalkan secara sistematis, serta minimnya penelitian yang mengkaji peran pastoral Gereja di tingkat lingkungan paroki untuk kasus Papua - menjadi tiga alasan utama mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan teoretis pada pengembangan kajian pastoral sosial, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis bagi Gereja dan

para pemangku kepentingan dalam merancang program pendampingan anak putus sekolah yang lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang berkaitan dengan fenomena putus sekolah di kalangan anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke, sebagai berikut:

1. Tingginya angka putus sekolah di kalangan anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke, yakni sebesar 57,14% dari total 49 anak yang terdata pada tahun 2024.
2. Faktor ekonomi keluarga yang lemah menjadi penghambat utama keberlangsungan pendidikan anak asli Papua, termasuk ketidakmampuan memenuhi, biaya sekolah dan fasilitas pendidikan yang memadai.
3. Rendahnya motivasi belajar anak dan lemahnya dukungan orang tua dalam mendorong anak untuk tetap bersekolah, yang diperparah oleh pengaruh negatif lingkungan pergaulan.
4. Tuntutan bekerja pada usia dini untuk membantu perekonomian keluarga yang menyebabkan anak-anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah sebelum waktunya.
5. Belum optimalnya peran Gereja dalam mendampingi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah secara terprogram, sistematis, dan berbasis data di

tingkat lingkungan paroki. Minimnya program pastoral sosial yang secara khusus dirancang untuk menjawab permasalahan putus sekolah di kalangan anak asli Papua dalam lingkup komunitas Gereja lokal.

6. Belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji peran Gereja dalam pendampingan anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan fenomena putus sekolah dan peran Gereja dalam pendampingan anak, maka penelitian ini membatasi subyek penelitian pada anak putus sekolah berusia 7-18 tahun yang berdomisili di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke. Adapun variabel utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

- (1) peran Gereja sebagai agen pastoral, yang mencakup fungsi kerygma, koinonia, dan diakonia dalam upaya pendampingan;
- (2) pendampingan anak putus sekolah, yang meliputi bentuk-bentuk intervensi pastoral baik secara spiritual, psikososial, maupun pendidikan formal dan nonformal; serta
- (3) anak asli Papua yang putus sekolah, sebagai subjek utama yang dikaji dari sisi identitas budaya, kondisi sosial-ekonomi keluarga, dan faktor-faktor penyebab mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Gereja sebagai agen pastoral dalam pendampingan anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus mengalami putus sekolah?
3. Bagaimana strategi pastoral yang dapat dikembangkan Gereja untuk mendampingi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Mendeskripsikan dan menganalisis peran Gereja sebagai agen pastoral dalam mendampingi anak putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus.
- 2 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke mengalami putus sekolah atau kehilangan minat untuk pendidikan formal dan merekomendasikan menunjukkan kontribusi praktis di lapangan.

- 3 Merumuskan strategi pastoral untuk mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pengetahuan di bidang pendidikan agama Katolik dan pastoral sosial, khususnya yang berkaitan dengan peran Gereja dalam pendampingan anak-anak yang rentan dan terpinggirkan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi ilmiah bagi pengembangan model pendampingan pastoral berbasis komunitas, khususnya di wilayah Papua yang memiliki tantangan pendidikan yang kompleks.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat mengisi teori baru, metode, konteks baru kajian ilmiah yang secara khusus membahas peran Gereja dalam menangani persoalan putus sekolah di kalangan anak asli Papua di tingkat lingkungan paroki.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Gereja (Paroki Bambu Pemali dan Keuskupan Agung Merauke): hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam

merancang program pendampingan pastoral-sosial yang lebih terstruktur, terprogram, dan berkelanjutan bagi anak asli Papua yang putus sekolah.

- 2) Bagi orang tua dan keluarga: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak asli Papua serta mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak.
- 3) Bagi pemerintah daerah: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Merauke dan Provinsi Papua Selatan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada anak asli Papua, serta dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan Gereja dalam menangani persoalan putus sekolah.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai peran Gereja dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan terstruktur tentang isi penelitian ini, skripsi ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai bagian pengantar yang menjelaskan latar belakang isu, perumusan masalah, identifikasi permasalahan, batasan-batasan yang ditentukan, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penulisan. Bab ini

bertindak sebagai panduan awal yang menunjukkan arah dan fokus dari penelitian secara keseluruhan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan dasar teori yang mendasari penelitian, termasuk: definisi putus sekolah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, hakikat serta hak pendidikan anak, pemahaman tentang anak-anak asli Papua, ajaran sosial Gereja Katolik terkait pendidikan dan pendampingan (termasuk *dokumen Gravissimum Educationis, Laudato Si'*, dan *Evangelii Gaudium*), serta tinjauan penelitian yang relevan sebelumnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merincikan metodologi dan tipe penelitian yang diterapkan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, bab ini menjelaskan lokasi dan periode pelaksanaan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen), metode analisis data, serta cara memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menampilkan hasil-hasil penelitian di lapangan secara deskriptif dan analitis. Pembahasannya meliputi: gambaran umum tentang lokasi penelitian, deskripsi kondisi pendidikan anak-anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus, berbagai faktor yang menyebabkan putus sekolah, bentuk-bentuk peran dan pendampingan yang dilakukan oleh Gereja, dan analisis terhadap langkah-langkah yang bisa diambil

untuk menurunkan angka putus sekolah. Temuan ini dibahas secara mendetail dengan merujuk pada kajian pustaka dan ajaran sosial Gereja.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta rekomendasi yang diarahkan kepada Gereja (Paroki Bambu Pemali dan Keuskupan Agung Merauke), orang tua, pemerintah daerah, dan peneliti di masa mendatang. Pada bagian akhir skripsi ini juga tersedia daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar konseptual dan akademik dalam memahami serta menganalisis permasalahan penelitian. Landasan teori digunakan untuk memberikan kerangka pemikiran yang sistematis melalui kajian terhadap berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini menjadi pijakan dalam merumuskan kerangka konseptual, menentukan arah penelitian, serta memberikan dasar dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

2.1 Peran dan Misi Sosial Gereja

Gereja sebagai kelompok orang yang percaya tidak hanya ada untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga dipanggil untuk menjalankan misi keagamaan yang berdampak nyata bagi kehidupan manusia. (Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, 1965) secara jelas menyatakan bahwa keberadaan Gereja di dunia bertujuan untuk melayani manusia, terutama mereka yang paling lemah dan terpinggirkan. Misi sosial Gereja ini diringkas dalam tiga fungsi dasar yang dikenal sebagai tri tugas Gereja, yaitu kerygma, koinonia, dan diakonia sesuai dengan *Lumen Gentium* yang diterbitkan pada tahun 1964.

Pertama, kerygma, yang berarti pengajaran, adalah kewajiban Gereja untuk menyebarkan Injil dan sabda Tuhan kepada semua orang. Penyampaian ini tidak hanya terjadi di dalam tempat ibadah, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam

masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh (KWI, 2019), kerygma menjadi fondasi dari seluruh misi Gereja karena dari kegiatan ini timbul kesadaran umat untuk berbuat adil dan penuh kasih kepada sesama.

Kedua, koinonia, atau komunitas, mencerminkan aspek kebersamaan dalam Gereja sebagai suatu unit umat yang saling mendukung, mencintai, dan berbagi. Dalam konteks anak-anak Papua yang tidak melanjutkan sekolah, koinonia menunjukkan bahwa Gereja hadir sebagai komunitas yang menerima, melindungi, dan memperjuangkan anak-anak itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tubuh Kristus. Pendapat (Simon, 2013) memandang Gereja sebagai komunitas etis (*moral community*) yang ditandai oleh belas rasa (*compassion*) dan keterbukaan melampaui batas-batas kesukuan. Gereja dipanggil untuk hadir secara transformatif di tengah mereka yang mengalami penderitaan dan marginalisasi, sehingga solidaritas Gereja tidak berhenti pada komunitas internal, tetapi diwujudkan dalam praksis sosial yang kontekstual. Dalam konteks pendidikan, perspektif tersebut memberikan landasan bahwa Gereja perlu memperluas praksis solidaritasnya kepada anak-anak yang mengalami marginalisasi dan kehilangan akses pendidikan.

Ketiga, diakonia, atau pelayanan, merupakan aspek Gereja yang paling nyata dan langsung berhubungan dengan isu sosial. Diakonia mendorong Gereja untuk mengambil langkah konkret, seperti mendampingi anak-anak yang tidak bersekolah, membantu keluarga yang membutuhkan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, bukan sekadar dalam kata-kata atau doa. Menurut (Noordegraaf, 2011) memandang diakonia bukan sekadar tindakan karitatif berupa pemberian bantuan

kepada mereka yang mengalami kekurangan, melainkan sebagai pelayanan gereja yang berorientasi pada pemberdayaan manusia. Diakonia berangkat dari penghayatan iman dan diwujudkan melalui respons konkret terhadap persoalan kehidupan sesama, dengan tujuan memulihkan martabat, mengembangkan kemampuan, dan mendorong kemandirian mereka yang dilayani. Dengan demikian, diakonia merupakan bentuk praksis iman yang menghubungkan kehidupan gereja dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks anak putus sekolah, perspektif tersebut menempatkan Gereja bukan hanya sebagai pemberi bantuan pendidikan, tetapi sebagai agen pendampingan dan pemberdayaan yang berupaya mengatasi berbagai hambatan pendidikan secara lebih menyeluruh. Diakonia pendidikan dapat diarahkan pada pendampingan anak dan keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses kembali ke sekolah, serta advokasi terhadap faktor-faktor struktural yang menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

Ketiga fungsi ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Satu gereja yang hanya memusatkan perhatian pada kerygma tanpa diakonia akan berfungsi sebagai lembaga yang terasing dari kenyataan sosial. (Bevans et al., 2004) memandang misi Gereja sebagai partisipasi dalam *missio Dei* yang diwujudkan secara integral melalui pewartaan Sabda (*kerygma*), tindakan pelayanan (*diakonia*), dan kesaksian kehidupan komunitas (*koinonia/martyria*). Dengan demikian, pelayanan Gereja tidak semestinya dipisahkan dari pewartaan iman dan kehidupan persekutuan, karena ketiganya merupakan dimensi yang saling melengkapi dalam menghadirkan misi Allah di tengah dunia. Perspektif ini menegaskan bahwa diakonia bukan sekadar

aktivitas sosial, melainkan tindakan pelayanan yang berakar pada iman dan diwujudkan melalui kehidupan komunitas yang memberikan kesaksian tentang Injil. Hal ini jika dikaitkan dengan pendidikan anak-anak Papua, kerangka tersebut memberikan landasan bagi Gereja untuk mengembangkan pelayanan pendidikan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi mengintegrasikan pewartaan nilai-nilai Injil, pendampingan komunitas, dan tindakan nyata dalam mengatasi hambatan akses pendidikan. Dengan demikian, keterlibatan Gereja dalam persoalan anak putus sekolah dapat dipahami sebagai praksis misioner yang memadukan dimensi spiritual, komunitarian, dan sosial-transformatif.

Gereja memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam hal spiritual, tetapi juga secara sosial untuk mengatasi permasalahan kehidupan jemaat. Dalam konteks penelitian ini, ketiga fungsi tersebut menjadi landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana Gereja dapat berperan sebagai agen pastoral dalam mendampingi anak-anak Papua yang menghadapi isu putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus. Pemahaman mengenai misi sosial Gereja ini menjadi titik tolak yang akan diteruskan dengan pembahasan peran Gereja yang lebih spesifik dalam bidang pendidikan formal.

2.1.1 Peran Gereja dalam Pendidikan Formal

Bertolak dari misi sosial yang telah diuraikan di atas, Gereja Katolik secara historis dan normatif memiliki peran yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Keterlibatan Gereja dalam pendidikan bukan sekadar pilihan strategis, melainkan merupakan wujud dari tanggung jawab iman yang mengalir dari ajarannya tentang

martabat manusia. Dalam dokumen (Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis*, 1965) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas pendidikan yang sesuai dengan tujuan hidupnya, dan bahwa Gereja memiliki kewajiban untuk mendukung terpenuhinya hak tersebut terutama bagi mereka yang tidak dapat mengaksesnya karena kemiskinan atau marginalisasi sosial.

Gravissimum Educationis adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II yang menjelaskan signifikansi pendidikan dalam pandangan ajaran Gereja Katolik. Dokumen tersebut disetujui pada 28 Oktober 1965 dan menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang menyeluruh secara intelektual, moral, dan spiritual sehingga melahirkan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki integritas serta rasa tanggung jawab yang tinggi. (Canonici, 1975, 2018) menjelaskan bahwa pendidikan yang sejati harus mencakup pembentukan individu secara utuh, yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia serta kesejahteraan umum masyarakat.

Kehadiran Gereja di ranah pendidikan secara khusus terlihat melalui institusi pendidikan Katolik. Sekolah Katolik, sebagaimana ditegaskan dalam (Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis*, art.8, 1965), berupaya membangun atmosfer kehidupan bersama yang dipenuhi semangat Injil, kebebasan, dan kasih, serta mendukung anak muda dalam mengembangkan kepribadian mereka sebagai makhluk baru. Ciri utama ini menekankan bahwa seorang guru profesional seharusnya menjadi agen transformasi bagi lingkungan sekolah dan juga bagi komunitas di sekitarnya.

Pendapat (Francis, 2015) dan seruan apostolik (Francis, *Evangelii Gaudium* 2018) semakin memperluas pemahaman tentang peran Gereja dalam pendidikan. Menurut (CONGREGATION FOR CATHOLIC EDUCATION, 2014) menegaskan bahwa pendidikan Katolik harus diarahkan pada pendidikan integral, yakni pendidikan yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh. Pendidikan mencakup dimensi kognitif, afektif, sosial, profesional, etis, dan spiritual, serta menghubungkan pengetahuan dengan tindakan. Karena itu, proses pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik secara akademik, tetapi juga membentuk kemampuan mereka untuk mengambil tanggung jawab sosial, mengembangkan solidaritas, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama., dan mempersiapkan anak untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Pendidikan integral ini sangat relevan bagi anak-anak asli Papua yang membutuhkan pendekatan yang menghargai identitas budaya mereka sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan zaman.

Keuskupan Agung Merauke sebagai salah satu keuskupan tertua di Indonesia (didirikan 1905) telah membangun ratusan sekolah, memberikan beasiswa, dan mendampingi ribuan anak Papua untuk mengenyam pendidikan. Peran ini bukan sekadar filantropi, melainkan merupakan ekspresi dari opsi bagi kaum miskin (*option for the poor*) yang menjadi salah satu prinsip utama ajaran sosial Gereja Katolik (Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 2004:182).

Gereja sebagai agen pendidikan tidak hanya berperan sebagai penyelenggara sekolah formal, tetapi juga sebagai pembentuk kesadaran komunitas tentang

pentingnya pendidikan, pendamping keluarga dalam mendukung pendidikan anak, dan advokat bagi kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks anak asli Papua yang putus sekolah, peran multidimensional inilah yang perlu dioptimalkan oleh Gereja melalui paroki-parokinya (Mulait, 2017). Sebagai kelanjutan dari peran Gereja dalam pendidikan, sub bab berikut membahas konsep pendampingan anak sebagai bentuk operasional dari pelayanan tersebut.

2.2 Pendampingan Anak

2.2.1 Pengertian Pendampingan

Sebagai agen pendidikan, Gereja menjalankan tugasnya tidak hanya melalui penyelenggaraan sekolah formal, tetapi juga melalui proses pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan adalah proses yang memberikan dukungan secara terencana, terus-menerus, dan dengan pendekatan yang humanis kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, bertujuan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi yang ada.

Menurut (Departemen Sosial Republik Indonesia, 2007) memandang pendampingan sebagai proses pelayanan yang menempatkan pendamping sebagai pihak yang membantu individu atau kelompok menghadapi permasalahan sekaligus mengembangkan kapasitas dirinya. Dalam pelaksanaannya, pendamping menjalankan fungsi yang multidimensional, antara lain sebagai pembela (*advocator*), penghubung (*mediator*), pemungkin (*enabler*), penjangkau (*outreacher*), dan pemberi motivasi (*motivator*). Dengan demikian, pendampingan tidak semata-mata diarahkan pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga pada penguatan kapasitas, pemulihan

keberfungsian sosial, dan pengembangan potensi individu agar mampu menghadapi persoalannya secara lebih mandiri. Dalam konteks anak putus sekolah, prinsip tersebut memberikan landasan bahwa pendampingan Gereja perlu dilakukan secara holistik. Gereja tidak hanya berperan memberikan bantuan material, tetapi juga mendengarkan persoalan anak dan keluarga, mengidentifikasi hambatan pendidikan, menghubungkan keluarga dengan sumber daya pendidikan, memberikan motivasi, serta melakukan advokasi ketika terdapat hambatan struktural yang menghalangi anak memperoleh hak pendidikannya.

Pendampingan kepada anak-anak, lebih rumit karena berkaitan dengan tahap perkembangan yang rentan. (Zastrow, 2010) memandang praktik pekerjaan sosial sebagai proses intervensi yang sistematis untuk membantu individu menghadapi masalah, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, membangun hubungan kerja yang tepat, merencanakan pelayanan, serta melaksanakan intervensi yang diarahkan pada pencapaian tujuan klien. Dalam konteks anak dan remaja, pendekatan tersebut menempatkan pendampingan sebagai proses relasional dan profesional yang membutuhkan identifikasi masalah, pemetaan kebutuhan, penguatan sumber daya, perencanaan intervensi, dan evaluasi hasil.

Perspektif (Zastrow, 2010) menunjukkan bahwa pendampingan tidak cukup dipahami sebagai pemberian bantuan secara spontan, tetapi sebagai proses intervensi yang terencana. Pendamping perlu membangun hubungan dengan anak dan keluarga, mengidentifikasi penyebab dan kebutuhan anak, memetakan sumber daya yang tersedia, merancang bentuk pelayanan yang sesuai, melaksanakan intervensi, dan

mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dengan demikian, pendampingan anak putus sekolah dapat diarahkan pada pemulihan kapasitas anak, penguatan dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta penghubungan anak dengan sumber daya pendidikan yang memungkinkan mereka kembali dan bertahan dalam sistem pendidikan.

Konsep pendampingan anak tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam (United Nations General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, 1989) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Konvensi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, perlindungan serta pengasuhan yang menjamin kesejahteraannya, dengan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut dirinya (Pasal 3, 6, 18, dan 19). Dalam bidang pendidikan, Pasal 28 secara khusus menegaskan hak anak atas pendidikan serta pentingnya upaya untuk meningkatkan kehadiran anak di sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, sedangkan Pasal 29 menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan anak secara optimal.

Dalam konteks pastoral Gereja, pendampingan anak juga memiliki dimensi spiritual yang penting. Temuan (Alfridus Yorianto Sasi & Emmeria Tarihoran, 2024) dapat dibaca dalam perspektif pendampingan holistik, karena pendampingan Gereja terhadap anak tidak berhenti pada pembinaan aspek religius, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter, tanggung jawab, kemampuan melayani, dan

pengembangan potensi anak. Dengan demikian, pendampingan pastoral dapat diarahkan pada perkembangan anak secara lebih utuh, yang mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan personal.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pendampingan Anak

Agar pendampingan yang dilakukan Gereja dapat berjalan efektif, perlu ada prinsip-prinsip yang menjadi acuan tindakan. Pendampingan yang efektif bagi anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pendampingan anak menurut berbagai ahli.

Pertama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan, kebijakan, pelayanan, dan tindakan yang berkaitan dengan kehidupan anak. Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* menegaskan bahwa dalam seluruh tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip tersebut tidak berarti bahwa kepentingan anak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan, tetapi menuntut agar kepentingan anak diberi prioritas yang tinggi dan dinilai secara konkret sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing anak (Committee on the Rights of the Child, 2013; United Nations General Assembly, 1989). Prinsip ini kemudian menjadi bagian dari kerangka

hukum nasional setelah Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui (Republik Indonesia, 1990).

Kedua, prinsip non-diskriminasi. Pendampingan anak harus dilaksanakan secara inklusif tanpa membedakan anak berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, agama, ras, jenis kelamin, kemampuan, maupun kondisi lainnya. Dalam perspektif pendidikan inklusif, keberagaman latar belakang anak justru perlu diakui dan dihargai sebagai bagian dari proses perkembangan mereka. Pendapat (Dhamayanti & Suparno, 2015) menunjukkan bahwa pendidikan inklusif perlu memfasilitasi anak dari berbagai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, agama, ras, dan kemampuan, sekaligus mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada anak, menghargai kearifan lokal, dan menjunjung keadilan gender. Dalam konteks anak asli Papua, prinsip non-diskriminasi memiliki makna yang lebih luas, yakni mengharuskan pendampingan yang menghargai identitas budaya, bahasa, nilai-nilai lokal, dan pengalaman sosial anak sebagai bagian integral dari dirinya. Identitas budaya tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi pendidikan, melainkan sebagai modal sosial dan kultural yang dapat digunakan untuk membangun rasa percaya diri, keterikatan dengan komunitas, dan keberlanjutan pendidikan anak.

Ketiga, prinsip partisipasi aktif anak. Anak tidak seharusnya diposisikan semata-mata sebagai objek penerima layanan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas, suara, pengalaman, dan hak untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, (Ife, 2002) menempatkan partisipasi sebagai salah satu prinsip penting yang berkaitan

dengan pemberdayaan, kesetaraan, penghargaan terhadap kebutuhan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri, serta pengambilan keputusan secara partisipatif. Pendekatan tersebut menggeser pola hubungan yang bersifat *top-down* menuju hubungan yang memberikan ruang lebih besar kepada kelompok yang didampingi untuk menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas, dan berperan dalam proses perubahan. Prinsip non diskrimasi ini dalam konteks anak asli Papua, prinsip tersebut perlu diterapkan dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, bahasa, pola komunikasi, serta cara anak mengekspresikan pengalaman dan kebutuhannya. Karena itu, pendampingan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam, melainkan perlu memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pandangan dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Dengan demikian, partisipasi anak bukan sekadar kehadiran dalam suatu kegiatan, tetapi keterlibatan bermakna dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan kebutuhan, merumuskan pilihan, dan menentukan bentuk pendampingan yang paling sesuai dengan kehidupannya.

Keempat, prinsip holistik dan terpadu. Pendampingan anak perlu memandang anak sebagai pribadi yang utuh sehingga intervensi tidak hanya diarahkan pada satu aspek permasalahan, tetapi mempertimbangkan keterkaitan antara dimensi fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Dalam perspektif pendidikan Katolik, pendidikan integral (*integral education*) mengarahkan proses pendidikan pada perkembangan pribadi secara menyeluruh, bukan sekadar pencapaian akademik. Karena itu, pendampingan anak perlu mengintegrasikan berbagai lingkungan yang membentuk kehidupan anak, terutama keluarga, komunitas, sekolah, dan lembaga

sosial-keagamaan yang relevan. Pendekatan terpadu tersebut memungkinkan kebutuhan anak dipahami secara lebih komprehensif dan mencegah pendampingan yang bersifat parsial (Congregation for Catholic Education, 2014). Dalam konteks anak putus sekolah di Papua, prinsip holistik dan terpadu berarti bahwa persoalan pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan anak untuk bersekolah. Pendampingan perlu melihat keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga, relasi orang tua dan anak, akses geografis terhadap sekolah, kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, identitas budaya dan bahasa, pengalaman belajar, serta kehidupan iman anak. Oleh karena itu, upaya Gereja melalui paroki perlu dibangun dalam pola kolaboratif yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas basis, pemerintah, dan lembaga sosial lainnya.

Kelima, prinsip keberlanjutan. Pendampingan anak yang efektif tidak seharusnya berhenti ketika suatu program atau kegiatan berakhir, tetapi perlu berlangsung secara berkesinambungan dan adaptif mengikuti perkembangan kebutuhan anak. Dalam konteks anak putus sekolah, keberlanjutan pendampingan penting karena keputusan untuk kembali atau bertahan dalam pendidikan dipengaruhi oleh kondisi anak, keluarga, lingkungan sosial, dan faktor ekonomi yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pendampingan perlu diarahkan tidak hanya pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas anak, keluarga, dan komunitas agar mampu mempertahankan perubahan serta mencegah anak kembali mengalami keterputusan pendidikan. Pendekatan

demikian menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari proses pemberdayaan dan perubahan sosial (Ife, 2002).

Prinsip-prinsip pendampingan ini menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini untuk memahami berbagai bentuk intervensi pastoral yang dapat dilakukan oleh Gereja dalam membantu anak-anak yang terputus dari pendidikan agar bisa kembali mendapatkan hak untuk belajar. Pemahaman tentang prinsip ini perlu diletakkan dalam konteks spesifik subjek penelitian, yakni anak asli Papua dengan segala keunikan identitas dan kondisi sosial budayanya.

2.2.3 Model-Model Pendampingan Anak

Berbagai model dan pendekatan pendampingan anak telah dikembangkan oleh para ahli dan praktisi. Dalam konteks penelitian ini, tiga model yang paling relevan adalah sebagai berikut.

Pertama, model pastoral konseling. Model ini merupakan integrasi antara pendekatan konseling psikologis dan pendampingan spiritual yang diarahkan pada pemulihan kondisi psikologis sekaligus penguatan dimensi iman anak. Menurut (Waruwu & Marbun, 2025) mengembangkan pendampingan pastoral konseling bagi anak putus sekolah dengan mengintegrasikan pendekatan *Client-Centered* dan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT). Pendekatan tersebut diarahkan untuk membantu anak menerima kondisi dirinya, mengatasi perasaan rendah diri, membangun kembali kepercayaan diri, serta menumbuhkan harapan dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan dan mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, pastoral konseling dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam

mendampingi anak putus sekolah karena memadukan perhatian terhadap kebutuhan psikologis anak dengan pendampingan yang berorientasi pada pemulihan dan pengembangan dirinya. Pendekatan ini saat diterapkan di Papua berpotensi diadaptasi dengan mempertimbangkan keunikan latar belakang budaya, bahasa, pengalaman sosial, dan kehidupan iman anak. Pendekatan *Client-Centered* memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan pengalaman dan kebutuhannya berdasarkan perspektif dirinya sendiri, sedangkan REBT dapat digunakan untuk membantu anak mengenali dan merekonstruksi keyakinan atau pola pikir yang tidak adaptif. Integrasi keduanya dengan pendampingan pastoral memungkinkan proses pendampingan tidak hanya berorientasi pada pemulihan kepercayaan diri, tetapi juga pada penguatan harapan, makna hidup, dan kemampuan anak untuk membangun kembali masa depannya.

Kedua, model berbasis komunitas (*community-based model*). Model ini menempatkan pendampingan anak sebagai tanggung jawab bersama yang tidak hanya melibatkan pendamping profesional atau lembaga tertentu, tetapi juga keluarga, komunitas, tokoh masyarakat, pemimpin adat, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan. Dalam konteks Papua, (Arifin & Hermino, 2018) berpendapat bahwa Gereja memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak, sekaligus berperan sebagai mitra pemerintah dan komunitas dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di wilayah pegunungan tengah Papua. Gereja juga membangun kerja sama dengan tokoh masyarakat dari berbagai kelompok untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan anak. Oleh

karena itu, pendekatan berbasis komunitas relevan dikembangkan dalam pendampingan anak putus sekolah karena memungkinkan persoalan pendidikan ditangani melalui keterlibatan berbagai aktor yang berada paling dekat dengan kehidupan anak, terutama keluarga, komunitas lokal, sekolah, Gereja, dan pemimpin masyarakat. Pendekatan ini bagi masyarakat Papua yang memiliki ikatan sosial dan komunal yang kuat, berpotensi menjadi strategi yang sesuai karena memanfaatkan jejaring sosial yang telah hidup dalam komunitas. Pendampingan anak dengan demikian tidak ditempatkan sebagai tugas individual, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang memungkinkan keluarga, Gereja, tokoh adat, sekolah, dan masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Ketiga, model pendampingan berbasis kearifan lokal. Model ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai, pengetahuan, pengalaman, dan praktik budaya lokal ke dalam proses pendampingan sehingga program lebih dekat dengan kehidupan dan kebutuhan anak. Dalam konteks Merauke, (Marnina et al., 2023) mengembangkan program pembinaan bagi anak-anak Marind-Papua yang putus sekolah melalui kursus intensif bahasa Inggris berbasis kearifan lokal di Kampung Matara, Distrik Semangga. Program tersebut dilaksanakan melalui *School of Eco-Involvement* dengan pendekatan workshop, pelatihan, dan pendampingan selama tiga bulan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman anak mengenai pentingnya pendidikan dan pembelajaran bahasa Inggris serta peningkatan keterampilan membaca dan menulis bahasa Inggris. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan pendampingan melalui

penguatan fungsi sekolah kampung bagi anak-anak Marind-Papua yang putus sekolah. Temuan tersebut memberikan dasar empiris bahwa pendampingan anak putus sekolah di Merauke perlu mempertimbangkan konteks budaya setempat. Pendekatan berbasis kearifan lokal memungkinkan proses pendampingan menggunakan lingkungan sosial dan budaya anak sebagai sumber belajar sekaligus sebagai ruang untuk membangun kembali motivasi, kepercayaan diri, dan keterlibatan mereka dalam pendidikan. Dalam konteks pastoral Gereja, prinsip ini dapat diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Marind, bahasa lokal, keterlibatan keluarga, tokoh adat, komunitas basis, serta pengalaman hidup anak ke dalam program pendampingan. Dengan demikian, Gereja tidak hadir dengan pola pendampingan yang bersifat seragam dan *top-down*, tetapi mengembangkan pelayanan yang kontekstual, dialogis, dan berakar pada kehidupan nyata komunitas.

Ketiga model tersebut saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, ketiganya digunakan secara sinergis untuk memetakan bentuk-bentuk pendampingan yang paling tepat bagi anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus. Penerapan model-model ini tentu perlu disesuaikan dengan identitas dan konteks sosial budaya anak asli Papua yang menjadi subjek penelitian.

2.2.4 Pengertian dan Identitas Anak Asli Papua (UU No. 21/2001 Otsus Papua)

Pemahaman yang tepat mengenai siapa yang dimaksud dengan anak asli Papua merupakan landasan penting dalam penelitian ini. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, mendefinisikan orang asli Papua sebagai

individu yang berasal dari rumpun ras Melanesia, termasuk suku-suku asli di Provinsi Papua, dan/atau orang yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua (Pasal 1 huruf a). Berdasarkan definisi ini, anak asli Papua dalam penelitian ini merujuk pada anak-anak yang secara etnis merupakan keturunan dari suku-suku asli yang mendiami Tanah Papua, khususnya yang berdomisili di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke.

Identitas anak asli Papua tidak semata-mata berkaitan dengan status administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan identitas sosial dan budaya yang terbentuk melalui bahasa, nilai, adat istiadat, sistem kekerabatan, serta lingkungan kehidupan masyarakat. Papua memiliki keragaman masyarakat adat dengan berbagai bahasa dan tradisi budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakatnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan dan pendampingan anak di Papua perlu mempertimbangkan latar belakang sosial-budaya anak agar pendidikan tidak memutus keterkaitan anak dengan identitas dan lingkungan budayanya (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2022). Identitas budaya yang dikaitkan dengan pendampingan anak putus sekolah, perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kehidupan anak, bukan sebagai faktor yang harus dihilangkan atau diseragamkan. Pendampingan yang mengabaikan bahasa, nilai, pola relasi sosial, adat, dan pengalaman budaya anak berisiko menciptakan jarak antara program pendampingan dengan realitas kehidupan anak. Sebaliknya, pengakuan terhadap identitas budaya dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan,

memperkuat rasa memiliki, meningkatkan keterlibatan keluarga dan komunitas, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Secara hukum, anak asli Papua mendapatkan perlindungan dan hak-hak khusus yang dijamin oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, termasuk hak atas pendidikan berkualitas dan hak untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Namun, dalam praktiknya, hak-hak ini belum sepenuhnya terwujud, yang tercermin dari tingginya angka putus sekolah di kalangan anak asli Papua (Khairani et al., 2025). Di Merauke, suku Marind Anim adalah suku asli terbesar yang mendiami wilayah ini dengan sistem budaya yang unik, sehingga identitas budaya ini merupakan aset yang sangat berharga untuk dihargai dan dikembangkan dalam setiap program pendidikan.

Memahami identitas anak asli Papua secara utuh-baik secara hukum maupun budaya-menjadi prasyarat penting sebelum menganalisis kondisi sosial ekonomi keluarga mereka yang turut memengaruhi akses dan partisipasi pendidikan, sebagaimana dibahas pada sub bab berikutnya.

2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Papua

Identitas budaya anak asli Papua yang telah diuraikan sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial-ekonomi yang melingkupi kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga adalah salah satu pengaruh terbesar terhadap partisipasi pendidikan anak-anak di Papua. Menurut informasi dari (Badan Pusat Statistik, 2023b), Provinsi Papua Selatan-tempat Merauke berada-termasuk salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, di mana proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan jauh melebihi rata-rata nasional.

Situasi ini secara langsung memengaruhi kemampuan orang tua untuk mendanai pendidikan anak-anak mereka.

Di Merauke, termasuk di kawasan Lingkungan St. Paulus, sebagian besar keluarga asli Papua menggantungkan penghidupan pada sektor subsisten seperti berkebun, berburu, dan meramu sagu. Ketergantungan pada ekonomi subsisten ini membuat pendapatan keluarga sangat tidak menentu dan rentan terhadap tekanan eksternal seperti kegagalan panen atau perubahan musim. Akibatnya, biaya pendidikan yang relatif kecil pun dapat menjadi beban yang tidak terpisul bagi banyak keluarga.

Persoalan putus sekolah di Papua sebagian besar berkaitan dengan berbagai faktor struktural, ekonomi, geografis, sosial, dan budaya. Berdasarkan data yang dikaji, keterbatasan biaya merupakan alasan terbesar penduduk usia 5–24 tahun untuk tidak pernah bersekolah atau berhenti sekolah, yaitu sebesar 22,66%. Faktor lainnya adalah jarak fasilitas pendidikan yang terlalu jauh sebesar 13,52% serta kebutuhan untuk bekerja atau mencari nafkah sebesar 12,73%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah di Papua tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan motivasi atau kemauan anak, tetapi juga berkaitan dengan hambatan struktural yang berada di luar kendali anak (Khairani et al., 2025). Pendapat ini relevan dan kontekstual dengan penelitian (Berangka, 2022) di Kelurahan Maro, Distrik Merauke. Melalui penelitian kualitatif-deskriptif, Berangka menemukan bahwa kesulitan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, terutama karena keterbatasan keluarga dalam memenuhi

kebutuhan dan fasilitas pendidikan. Selain faktor ekonomi, penelitian tersebut juga menemukan bahwa keterlibatan anak dalam membantu orang tua bekerja serta pengaruh lingkungan pergaulan turut berkontribusi terhadap keterputusan pendidikan anak.

Kedua pendapat tersebut memperlihatkan bahwa fenomena anak putus sekolah di Papua perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional. Pada tingkat yang lebih luas, data yang dikaji (Khairani et al., 2025) menunjukkan dominannya hambatan ekonomi dan geografis, sedangkan penelitian (Berangka, 2022) memperlihatkan bagaimana hambatan ekonomi tersebut bekerja dalam kehidupan konkret keluarga di Kelurahan Maro, Merauke. Dengan demikian, pendampingan anak putus sekolah tidak cukup diarahkan pada peningkatan motivasi belajar anak, tetapi juga perlu menyentuh kondisi keluarga, akses pendidikan, kebutuhan ekonomi, serta lingkungan sosial yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Perspektif ini memberikan dasar bagi pengembangan model pendampingan Gereja yang bersifat holistik, kontekstual, dan berbasis komunitas.

Di samping keterbatasan ekonomi keluarga, kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah Papua juga dipengaruhi oleh karakter ekonomi subsisten dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. (Sumule & Matualage, 2023) menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah terpencil Papua masih banyak menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam dan produk tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan tersebut menjadikan kehidupan ekonomi masyarakat rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan

kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga. Kondisi sosial-ekonomi semacam ini pada akhirnya perlu diperhitungkan dalam memahami keberlanjutan pendidikan anak, karena kemampuan keluarga untuk mempertahankan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas ekonomi dan lingkungan kehidupan mereka.

Kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi keluarga berinteraksi dengan berbagai faktor budaya yang turut memperkuat hambatan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Keterkaitan antara tekanan ekonomi dan dinamika budaya tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan anak bersifat multidimensional.

2.4 Faktor Budaya dan Tantangan Pendidikan

Di luar tekanan sosial ekonomi yang telah diuraikan, faktor budaya juga memiliki kontribusi yang besar dalam menentukan cara dan mutu pendidikan anak asli Papua. Budaya memiliki dampak yang besar terhadap cara dan mutu pendidikan. Nilai-nilai budaya setempat, norma-norma sosial, serta kepercayaan yang ada di masyarakat dapat menjadi faktor penggerak atau penghambat dalam mendapatkan akses serta berpartisipasi dalam pendidikan.

Beberapa elemen budaya yang menjadi hambatan dalam pendidikan bagi anak-anak Papua adalah sebagai berikut. Ketidaksesuaian antara pengalaman pendidikan di sekolah dan konteks kehidupan anak dapat menimbulkan jarak psikologis dan sosial antara anak dengan lingkungan pendidikan. Dalam kondisi tertentu, jarak tersebut dapat memengaruhi keterlibatan, motivasi, dan keberlanjutan partisipasi anak dalam pendidikan. Karena itu, pendekatan pendidikan yang kontekstual dan

inklusif menjadi penting, terutama bagi anak-anak yang hidup dalam komunitas dengan karakter budaya yang kuat (Kenelak & Ziraluo, 2025). Prinsip kontekstualisasi dalam pendampingan Gereja perlu memahami anak bukan hanya sebagai peserta didik yang mengalami masalah pendidikan, tetapi sebagai pribadi yang hidup dalam lingkungan budaya tertentu. Karena itu, program pendampingan perlu mempertimbangkan bahasa, nilai budaya, pola relasi keluarga, pengalaman sosial, serta cara anak memahami dirinya dan lingkungannya. Pendekatan demikian memungkinkan pelayanan Gereja menjadi lebih dialogis dan dekat dengan realitas kehidupan anak Papua.

Kedua, keterbatasan keterlibatan dan pendampingan orang tua dalam keberlanjutan pendidikan anak. Dalam situasi tertentu, kurangnya perhatian, pengawasan, dan komunikasi orang tua mengenai pendidikan dapat menyebabkan anak tidak memperoleh dukungan yang memadai ketika menghadapi kesulitan belajar maupun tekanan sosial yang dapat mendorong mereka meninggalkan sekolah. Oleh karena itu, keluarga perlu dipandang sebagai salah satu lingkungan utama yang memberikan dukungan, motivasi, penguatan, dan arahan kepada anak. Perspektif komunitas yang dikembangkan (Lizardo, 2022) menegaskan pentingnya relasi persekutuan sebagai ruang untuk saling menguatkan, menghibur, mengingatkan, dan membangun kehidupan bersama. Prinsip tersebut dapat diperluas dalam konteks pendampingan anak, bahwa keberlanjutan pendidikan membutuhkan lingkungan sosial yang mampu memberikan dukungan secara konsisten kepada anak.

Ketiga, pengaruh interaksi sosial dan lingkungan pergaulan. Lingkungan sosial merupakan salah satu ruang penting dalam pembentukan sikap, kebiasaan, motivasi, dan orientasi masa depan anak. Ketika anak hidup dalam lingkungan yang banyak memperlihatkan pola tidak bersekolah, keputusan untuk meninggalkan pendidikan dapat memperoleh legitimasi sosial dan secara perlahan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Anak juga dapat mengalami pergeseran orientasi dari kegiatan pendidikan menuju aktivitas pergaulan atau kegiatan ekonomi yang dianggap lebih memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi demikian, persoalan putus sekolah tidak semata-mata merupakan keputusan individual anak, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial yang membentuk persepsi dan pilihan anak. (Berangka, 2022) menemukan bahwa faktor pergaulan merupakan salah satu dari tiga faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Kelurahan Maro, Distrik Merauke. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya mengatasi putus sekolah perlu memperhatikan lingkungan sosial anak, bukan hanya kondisi individual dan keluarga. Karena itu, pendampingan pastoral Gereja dapat diarahkan untuk membangun lingkungan pergaulan yang positif melalui komunitas anak dan remaja, pendampingan sebaya, kegiatan pendidikan dan pembinaan iman, serta keterlibatan keluarga dan komunitas basis sehingga anak memperoleh lingkungan sosial yang mendukung keberlanjutan pendidikannya.

Keempat, ketegangan antara tuntutan pendidikan formal dan tanggung jawab sosial-budaya anak dalam komunitas. Anak-anak dalam masyarakat adat tidak hanya menjalankan peran sebagai peserta didik, tetapi juga memiliki keterikatan dengan

keluarga dan komunitas melalui berbagai aktivitas budaya, sosial, dan ekonomi. Keterlibatan dalam ritual adat, kegiatan mencari dan mengolah sumber daya alam seperti sagu, berburu, maupun tanggung jawab sosial lainnya dapat menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk mengikuti kegiatan pendidikan secara teratur. Dalam konteks tertentu, perkawinan pada usia anak juga dapat menjadi faktor yang semakin mempersempit peluang anak untuk menyelesaikan pendidikan. Namun, praktik-praktik tersebut perlu dipahami secara kontekstual karena sebagian merupakan bagian dari identitas, keberlangsungan budaya, dan sistem kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, pendekatan terhadap persoalan pendidikan anak Papua tidak seharusnya menempatkan budaya lokal sebagai hambatan yang harus dihilangkan, melainkan mencari titik temu antara pelestarian budaya dan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Strategi tersebut membutuhkan dialog dan kemitraan antara keluarga, sekolah, pemimpin adat, pemerintah, serta Gereja sebagai bagian dari komunitas yang hidup bersama masyarakat. Dalam perspektif ini, keterlibatan komunitas menjadi penting agar pendidikan dapat berlangsung tanpa memutuskan hubungan anak dengan identitas dan lingkungan budayanya (Arifin & Hermino, 2018).

Persoalan pendidikan anak asli Papua tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara faktor budaya, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan akses terhadap layanan pendidikan. Faktor-faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi dapat saling berinteraksi dan membentuk kerentanan pendidikan yang semakin besar. Ketika keterbatasan ekonomi bertemu dengan tuntutan sosial-budaya, lemahnya dukungan

keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, serta hambatan akses pendidikan, anak berada dalam situasi yang semakin sulit untuk mempertahankan keterlibatannya di sekolah. Dalam perspektif ini, putus sekolah perlu dipahami bukan semata-mata sebagai kegagalan anak untuk menyelesaikan pendidikan, melainkan sebagai hasil dari proses yang kompleks, ketika berbagai tekanan pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan struktur sosial secara bertahap mengurangi peluang anak untuk tetap bersekolah. Pemahaman yang demikian sekaligus menegaskan bahwa upaya mengatasi putus sekolah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, termasuk penguatan peran keluarga, sekolah, komunitas adat, pemerintah, dan Gereja.

2.5 Putus Sekolah

2.5.1 Pengertian Putus Sekolah

Putus sekolah pada dasarnya merujuk pada kondisi ketika seorang anak yang sebelumnya mengikuti pendidikan formal berhenti mengikuti pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya. Dengan demikian, konsep putus sekolah mengandung unsur penting berupa adanya pengalaman mengikuti pendidikan, kemudian terjadinya penghentian pendidikan sebelum anak menyelesaikan jenjang yang seharusnya ditempuh.

Badan Pusat Statistik menggunakan indikator angka putus sekolah untuk menggambarkan proporsi anak pada kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, untuk jenjang SD/MI, indikator tersebut merujuk pada proporsi anak usia 7–12 tahun yang

sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikan SD/MI di antara mereka yang pernah atau sedang bersekolah (Badan Pusat Statistik, 2023a).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa putus sekolah perlu dibedakan dari kondisi tidak pernah bersekolah. Anak yang tidak pernah memperoleh pendidikan formal sejak awal tidak tepat dikategorikan sebagai anak putus sekolah dalam pengertian yang sama dengan anak yang pernah bersekolah kemudian berhenti. Pembedaan ini penting karena kedua kondisi tersebut memiliki latar belakang, mekanisme, dan kebutuhan intervensi yang berbeda.

Putus sekolah juga perlu dibedakan dari tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seorang anak yang telah menyelesaikan SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP berada dalam kondisi transisi pendidikan yang terputus, sedangkan anak yang berhenti ketika sedang menjalani pendidikan SD atau SMP mengalami penghentian pendidikan pada jenjang yang sedang ditempuh. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang putus sekolah perlu dijelaskan secara eksplisit batasan operasional yang digunakan.

Menurut pendapat (Madaniah et al., 2023) menjelaskan bahwa persoalan anak putus sekolah berkaitan dengan berbagai faktor yang menyebabkan anak berhenti dari proses pendidikan, termasuk kondisi keluarga, akses pendidikan, pandangan terhadap pentingnya pendidikan, serta lingkungan sosial. Dari perspektif tersebut, putus sekolah tidak tepat dipahami sebagai keputusan individual anak semata. Keputusan atau kondisi berhenti sekolah sering kali merupakan hasil dari akumulasi hambatan yang dialami anak dalam kehidupannya. Hambatan ekonomi dapat menyebabkan

keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan; jarak sekolah dapat meningkatkan biaya dan waktu perjalanan; kebutuhan ekonomi dapat mendorong anak bekerja; sementara lemahnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial dapat mengurangi motivasi anak untuk tetap bersekolah. Putus sekolah yang dipahami dalam penelitian ini sebagai kondisi terhentinya keterlibatan anak dalam pendidikan formal sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh atau sebelum mencapai tingkat pendidikan yang semestinya, sebagai akibat dari interaksi berbagai faktor individual, keluarga, sosial, ekonomi, geografis, kelembagaan, dan budaya. Definisi ini penting karena menempatkan anak bukan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keterputusan pendidikannya. Anak berada dalam lingkungan sosial tertentu yang dapat mendukung ataupun menghambat keberlanjutan pendidikannya.

2.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan fenomena multidimensional. Artinya, tidak terdapat satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan mengapa seorang anak berhenti sekolah. Berbagai faktor dapat bekerja secara simultan dan saling memperkuat.

Literatur mengenai putus sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang paling konsisten ditemukan. Berdasarkan Kajian yang dilakukan oleh (Shanty et al., 2024) menunjukkan bahwa faktor keluarga dan ekonomi merupakan dua kelompok faktor yang paling dominan dalam menjelaskan fenomena putus sekolah di Indonesia. Faktor keluarga mencakup aspek pendidikan orang tua, peran orang tua, kondisi dan karakteristik rumah tangga,

serta aspek kognitif dan motivasional dalam lingkungan keluarga. Sementara itu, faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi kesejahteraan rumah tangga dan kemampuan keluarga dalam memenuhi biaya pendidikan. (Shanty et al., 2024) juga menunjukkan bahwa anak yang tidak bersekolah cenderung berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, sementara kesejahteraan keluarga memiliki keterkaitan langsung dengan status pendidikan anak. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan anak untuk bekerja membantu orang tua dapat meningkatkan risiko terjadinya putus sekolah. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh faktor individual, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi dan lingkungan keluarga.

Berdasarkan kajian tersebut dan disesuaikan dengan konteks Papua, faktor penyebab putus sekolah dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Faktor ekonomi keluarga

Kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan anak untuk mempertahankan pendidikan. Walaupun pendidikan dasar memperoleh dukungan pembiayaan pemerintah, keluarga tetap menghadapi berbagai biaya langsung maupun tidak langsung, seperti transportasi, pakaian dan perlengkapan sekolah, buku, kebutuhan makan selama perjalanan, serta kebutuhan pendidikan lainnya.

Ketika pendapatan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak dapat berada dalam posisi yang kurang prioritas dibandingkan

kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan, anak bahkan dapat terdorong untuk membantu orang tua memperoleh pendapatan.

Dalam konteks Papua, (Khairani et al., 2025) mencatat keterbatasan ekonomi sebesar 22,66% sebagai salah satu alasan utama yang berkaitan dengan tidak bersekolah atau berhenti sekolah. Faktor tersebut diikuti oleh jarak fasilitas pendidikan sebesar 13,52% dan kebutuhan bekerja atau mencari nafkah sebesar 12,73%. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan sumber daya keluarga tidak hanya berdampak terhadap kemampuan membayar kebutuhan pendidikan, tetapi juga dapat menciptakan opportunity cost. Anak yang bersekolah memiliki waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu pekerjaan keluarga. Dalam kondisi ekonomi tertentu, manfaat jangka pendek dari bekerja dapat dipersepsikan lebih nyata dibandingkan manfaat pendidikan yang baru dirasakan dalam jangka panjang.

b. Faktor geografis dan akses terhadap pendidikan

Faktor geografis dan keterjangkauan sekolah juga menjadi aspek penting dalam keberlanjutan pendidikan anak. Analisis data panel 33 provinsi di Indonesia selama periode 2010–2017, menemukan bahwa jarak tempat tinggal ke sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Artinya, semakin jauh jarak yang harus ditempuh anak untuk mencapai sekolah, semakin rendah kecenderungan partisipasi mereka dalam pendidikan. Penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan positif antara jarak sekolah dan angka putus sekolah, meskipun hubungan

tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses geografis lebih jelas terlihat pengaruhnya terhadap keputusan anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan daripada secara langsung menjelaskan terjadinya putus sekolah. Jarak yang jauh dapat meningkatkan waktu tempuh, biaya transportasi, kelelahan, serta beban yang harus ditanggung anak dan keluarga. Dalam konteks wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan persebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata, persoalan jarak menjadi semakin penting karena dapat memperbesar hambatan anak untuk mengakses dan mempertahankan keterlibatan mereka dalam pendidikan (Sirait, 2019).

Jarak dan keterjangkauan fasilitas pendidikan merupakan faktor penting lainnya. Jarak sekolah yang jauh dapat meningkatkan biaya transportasi, waktu perjalanan, kelelahan anak, dan risiko ketidakhadiran. Tinjauan literatur Sirait mengenai pengaruh jarak sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa jarak memiliki hubungan dengan partisipasi dan putus sekolah pada jenjang SMP. Jarak yang lebih jauh berpengaruh negatif terhadap partisipasi sekolah, sehingga akses geografis menjadi salah satu aspek penting dalam pemerataan pendidikan.

Persoalan geografis menjadi semakin penting dalam konteks Papua karena karakter wilayah yang luas dan kondisi infrastruktur yang tidak merata dapat menyebabkan akses pendidikan berbeda antara wilayah perkotaan, pinggiran, dan daerah terpencil. Karena itu, putus sekolah tidak selalu dapat dijelaskan melalui motivasi anak. Dalam kondisi tertentu, anak mungkin memiliki keinginan untuk

bersekolah tetapi menghadapi hambatan struktural berupa jarak, transportasi, biaya perjalanan, dan keterbatasan fasilitas pendidikan.

c. Kebutuhan anak untuk bekerja

Keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan ketika tuntutan pekerjaan semakin besar dan mengurangi waktu serta energi anak untuk mengikuti kegiatan sekolah. Dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, anak dapat dipandang sebagai bagian dari sumber daya keluarga yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, pendidikan yang manfaatnya bersifat jangka panjang dapat dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi yang bersifat segera.

Berdasarkan kajian (Khairani et al., 2025) menemukan bahwa kewajiban bekerja atau mencari nafkah mencapai 12,73% dalam data yang mereka kaji mengenai alasan anak tidak bersekolah atau berhenti sekolah di Papua. Permasalahan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kemiskinan, pekerjaan anak, dan putus sekolah. Dengan demikian, intervensi terhadap putus sekolah tidak cukup hanya dengan meminta anak kembali ke sekolah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi keluarga yang mendorong anak untuk bekerja.

d. Faktor keluarga dan keterlibatan orang tua

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan memiliki peran penting dalam membentuk sikap anak terhadap pendidikan. Dukungan orang tua dapat berupa perhatian terhadap kegiatan belajar, pengawasan kehadiran, pemberian motivasi, komunikasi dengan sekolah, serta dukungan emosional ketika anak

mengalami kesulitan. Sebaliknya, rendahnya keterlibatan orang tua dapat menyebabkan anak tidak memperoleh dukungan yang cukup untuk mempertahankan pendidikan. Penelitian tentang putus sekolah di Indonesia juga menunjukkan bahwa kurangnya perhatian orang tua merupakan salah satu faktor yang sering berkaitan dengan putus sekolah.

Dalam konteks Merauke, kajian yang dilakukan (Berangka, 2022) di Kelurahan Maro secara khusus mengkaji hubungan pendidikan anak dalam keluarga dengan fenomena anak putus sekolah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan melibatkan orang tua, anak putus sekolah, kepala sekolah, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai sumber dukungan sosial, emosional, moral, dan motivasional bagi keberlanjutan pendidikan anak.

e. Faktor motivasi dan persepsi anak terhadap pendidikan

Faktor motivasi dan persepsi anak terhadap pendidikan merupakan aspek internal yang perlu diperhatikan dalam memahami fenomena putus sekolah. Motivasi belajar berkaitan dengan dorongan anak untuk mengikuti proses pembelajaran, mempertahankan usaha ketika menghadapi kesulitan, menyelesaikan tuntutan akademik, dan mencapai tujuan pendidikan. Ketika motivasi tersebut melemah, anak dapat mengalami penurunan minat dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerentanan terhadap keterputusan pendidikan. Kajian meta-analitik (Gubbels, 2019) menunjukkan bahwa motivasi, sikap terhadap sekolah, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, tujuan pendidikan, dan berbagai

indikator prestasi akademik merupakan faktor yang berkaitan dengan risiko ketidakhadiran dan putus sekolah.

Menurut (Hernawati et al., 2025) motivasi belajar memiliki peran penting dalam keberlanjutan pendidikan anak. Motivasi dapat menjadi faktor protektif yang membantu anak mempertahankan keterlibatannya dalam pendidikan ketika menghadapi berbagai hambatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa motivasi belajar tidak hanya berkaitan dengan keinginan anak untuk mengikuti pembelajaran, tetapi juga dengan kemampuan anak untuk mempertahankan komitmen terhadap sekolah dan pendidikan yang sedang ditempuh.

Selain motivasi, persepsi anak mengenai makna dan manfaat pendidikan juga memiliki posisi penting. Anak tidak hanya mengambil keputusan untuk bersekolah berdasarkan tersedianya fasilitas pendidikan, tetapi juga berdasarkan bagaimana mereka memandang sekolah dan manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan tersebut. Apabila pendidikan dipersepsikan tidak relevan dengan kebutuhan hidup, tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masa depan, atau tidak memberikan peluang untuk mencapai tujuan yang diharapkan, keterikatan anak terhadap sekolah dapat melemah. Dalam perspektif ini, keputusan untuk berhenti sekolah tidak semata-mata menunjukkan ketidakmauan anak untuk belajar, tetapi dapat mencerminkan perubahan cara anak memaknai sekolah dan nilai pendidikan bagi kehidupannya.

f. Faktor lingkungan sosial dan teman sebaya

Lingkungan sosial dan kelompok teman sebaya merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Pada masa perkembangan anak dan remaja, interaksi dengan teman sebaya menjadi ruang penting bagi pembentukan nilai, norma, kebiasaan, dan orientasi perilaku. Melalui interaksi tersebut, anak dapat memperoleh penguatan sosial terhadap perilaku tertentu, termasuk sikap terhadap sekolah dan pendidikan.

Lingkungan teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang bersifat mendukung maupun menghambat keberlanjutan pendidikan. Kelompok teman yang memiliki orientasi positif terhadap pendidikan dapat menciptakan norma sosial yang mendorong anak untuk tetap bersekolah, sedangkan kelompok yang memandang sekolah tidak penting atau lebih mengutamakan aktivitas di luar pendidikan dapat membentuk normalisasi terhadap perilaku meninggalkan sekolah. Dengan demikian, keputusan anak untuk berhenti sekolah tidak selalu terbentuk secara individual, tetapi dapat berkembang melalui proses interaksi dan penyesuaian diri terhadap norma kelompok.

Kajian yang dilakukan (Hernawati et al., 2025), lingkungan teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan putus sekolah. Karena lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam memahami keberlanjutan pendidikan anak, khususnya ketika anak berada dalam lingkungan yang memberikan penguatan terhadap keputusan untuk meninggalkan sekolah.

Menurut (Natalie et al., 2025) pengaruh teman sebaya terjadi dalam interaksi sosial, peran kelompok, proses pengambilan keputusan, serta nilai dan norma yang berkembang dalam kelompok teman sebaya terhadap keputusan anak untuk meninggalkan sekolah. Lingkungan pertemanan yang kurang mendukung pendidikan dapat mendorong anak mengikuti perilaku teman sebaya dan secara bertahap menjauh dari aktivitas pendidikan.

Di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang lebih rentan, pengaruh lingkungan pergaulan menjadi semakin penting. Masing dan Astuti dalam penelitian mengenai pendidikan di daerah 3T juga mengidentifikasi lingkungan pergaulan sebagai salah satu faktor penyebab putus sekolah, bersama dengan faktor ekonomi, keluarga, minat dan inteligensi, serta jarak tempuh menuju sekolah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses tidak hanya berkaitan dengan kondisi struktural, tetapi juga dengan lingkungan sosial tempat anak menjalani kehidupan sehari-hari (Masing & Astuti, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, lingkungan sosial dan teman sebaya dapat dipahami sebagai faktor yang membentuk norma dan tekanan sosial terhadap keputusan pendidikan anak. Ketika bersekolah menjadi perilaku yang dihargai dalam kelompok, anak memperoleh penguatan sosial untuk mempertahankan pendidikannya. Sebaliknya, ketika tidak bersekolah telah menjadi sesuatu yang dianggap biasa dalam lingkungan pergaulan, keputusan untuk meninggalkan sekolah dapat menjadi lebih mudah diterima oleh anak. Oleh karena itu, pencegahan putus

sekolah perlu memperhatikan bukan hanya kondisi individual anak, tetapi juga kualitas lingkungan sosial dan pola interaksi teman sebaya yang mengelilinginya.

g. Faktor sosial-budaya

Dalam konteks masyarakat Papua, faktor sosial-budaya tidak ditempatkan semata-mata sebagai sumber persoalan pendidikan. Budaya merupakan bagian integral dari identitas masyarakat, sistem nilai, solidaritas sosial, pengetahuan lokal, serta cara masyarakat memaknai kehidupan. Oleh karena itu, persoalan pendidikan muncul bukan karena budaya itu sendiri merupakan hambatan, melainkan dapat terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian atau ketegangan antara sistem pendidikan formal dengan konteks sosial-budaya tempat anak tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan telaah literatur dari (Parker & Sudibyo, 2024) memberikan gambaran yang sangat relevan dalam konteks Merauke. Putus sekolah tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi. Stigmatisasi terhadap masyarakat Marind, stigma yang terinternalisasi, serta diskontinuitas budaya antara kehidupan anak dengan pengalaman pendidikan formal turut berkontribusi terhadap proses anak meninggalkan sekolah. Dengan demikian, pengalaman pendidikan anak perlu dipahami dalam konteks hubungan antara sekolah, identitas budaya, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial-budaya tidak selalu berbentuk kewajiban adat yang secara langsung menyebabkan anak meninggalkan sekolah. Persoalan juga dapat muncul ketika nilai, bahasa, pengalaman hidup, identitas, dan pengetahuan lokal anak tidak memperoleh ruang yang memadai dalam

lingkungan pendidikan formal. Ketika pengalaman hidup anak di rumah dan komunitas memiliki jarak yang terlalu jauh dengan apa yang dialaminya di sekolah, anak dapat mengalami keterputusan makna antara pendidikan formal dan kehidupan sosial-budayanya. Dalam konteks masyarakat Marind di Merauke, kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian karena identitas budaya merupakan bagian penting dari pengalaman sosial anak (Parker & Sudibyo, 2024).

Kajian (Albertus Fiharsono; et al., 2026) semakin memperkuat pentingnya dimensi tersebut. Studi yang dilakukan pada tiga konteks sekolah di Papua menunjukkan bahwa kebutuhan belajar anak asli Papua berkaitan erat dengan rasa memiliki terhadap sekolah, keterlibatan komunitas lokal, pendidikan tradisional, praktik dan ritual budaya, penggunaan bahasa lokal, serta strategi pembelajaran yang dikontekstualisasikan. Penelitian tersebut merekomendasikan pendekatan pendidikan yang lebih responsif terhadap budaya sehingga identitas dan pengalaman sosial-budaya anak tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dipisahkan dari pendidikan formal, melainkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan penguatan *school belonging*.

Dengan demikian, hubungan antara budaya dan pendidikan di Papua lebih tepat dipahami melalui perspektif kesesuaian budaya (*cultural responsiveness*) dan kebermaknaan pendidikan, bukan melalui asumsi bahwa budaya merupakan penyebab langsung putus sekolah. Pendidikan yang tidak cukup memperhatikan bahasa, identitas, pengalaman, pengetahuan lokal, dan kehidupan komunitas berpotensi menciptakan jarak antara anak dengan sekolah. Sebaliknya, pendidikan

yang mampu mengintegrasikan konteks lokal secara proporsional dapat membangun rasa memiliki, meningkatkan keterlibatan anak, dan menjadikan sekolah lebih bermakna bagi kehidupan mereka.

Oleh sebab itu, upaya pencegahan putus sekolah di Papua perlu diarahkan pada pembangunan hubungan yang dialogis antara pendidikan formal dan kehidupan sosial-budaya masyarakat. Sekolah tidak perlu mempertentangkan pendidikan modern dengan identitas budaya anak, tetapi perlu mencari titik temu yang memungkinkan anak memperoleh kompetensi akademik sekaligus tetap memiliki keterhubungan dengan bahasa, nilai, identitas, pengetahuan, dan komunitas budayanya. Dalam proses tersebut, keterlibatan keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan seperti Gereja dapat menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan yang lebih kontekstual dan inklusif.

h. Faktor kelembagaan dan kualitas lingkungan sekolah

Sekolah juga merupakan bagian dari ekosistem yang dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Lingkungan sekolah yang tidak aman, pengalaman perundungan, relasi yang kurang mendukung antara guru dan siswa, kesulitan mengikuti pembelajaran, atau kurangnya respons sekolah terhadap persoalan keluarga dapat memperlemah keterikatan anak dengan sekolah.

Karena itu, pencegahan putus sekolah tidak cukup diarahkan kepada anak dan keluarga. Sekolah juga perlu membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, responsif, dan mampu mendeteksi tanda-tanda awal anak berisiko putus sekolah.

2.5.3 Dampak Putus Sekolah bagi Anak

Putus sekolah merupakan persoalan pendidikan yang memiliki konsekuensi luas terhadap perkembangan anak dan keberlangsungan kehidupannya pada masa mendatang. Dampak putus sekolah tidak hanya berupa terhentinya proses pembelajaran formal, tetapi juga berkaitan dengan berkurangnya kesempatan anak untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, relasi sosial, serta orientasi masa depan. Dengan demikian, putus sekolah perlu dipahami sebagai suatu kondisi yang dapat memengaruhi berbagai dimensi perkembangan anak secara bersamaan dan berlangsung dalam jangka panjang. Keterputusan dari pendidikan pada usia sekolah dapat menyebabkan anak kehilangan salah satu ruang utama untuk memperoleh pengetahuan, membangun pengalaman sosial, mengembangkan potensi diri, dan mempersiapkan transisi menuju pendidikan lanjutan maupun kehidupan kerja.

Dari perspektif pendidikan, dampak yang paling langsung adalah terhambatnya perkembangan akademik anak. Ketika anak meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, proses pembelajaran yang seharusnya berlangsung secara berkesinambungan menjadi terhenti. Anak kehilangan kesempatan untuk memperkuat kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, serta berbagai kompetensi yang dikembangkan melalui proses pendidikan formal. Keterputusan tersebut juga dapat mempersempit kemungkinan

anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan kajian (Klein & Sosu, 2025) menunjukkan bahwa ketidakhadiran dalam pendidikan memiliki hubungan dengan keberlanjutan pendidikan dan transisi anak menuju pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan anak dalam pendidikan pada masa sekolah memiliki konsekuensi terhadap perjalanan hidupnya pada tahap berikutnya.

Dampak pendidikan tersebut selanjutnya berkaitan erat dengan kesempatan ekonomi anak pada masa depan. Pendidikan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Ketika anak berhenti sekolah pada usia dini, kesempatan untuk memperoleh kualifikasi pendidikan menjadi lebih terbatas sehingga pilihan pekerjaan yang tersedia bagi mereka juga cenderung lebih sempit. Dalam kondisi tertentu, anak yang putus sekolah dapat lebih mudah masuk ke pekerjaan informal, pekerjaan dengan pendapatan rendah, atau pekerjaan yang tidak memberikan jaminan keberlanjutan. Dengan demikian, putus sekolah dapat membentuk hubungan yang saling memperkuat antara rendahnya pendidikan dan kerentanan ekonomi. Anak meninggalkan sekolah karena tekanan ekonomi, tetapi rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh kemudian dapat membatasi peluang ekonominya pada masa dewasa. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mempertahankan kerentanan ekonomi dalam keluarga.

Selain berdampak pada aspek pendidikan dan ekonomi, putus sekolah juga berkaitan dengan perkembangan psikologis dan sosial-emosional anak. Sekolah pada

dasarnya bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga merupakan lingkungan tempat anak membangun hubungan dengan guru dan teman sebaya, memperoleh pengakuan, mengembangkan rasa kompeten, serta membentuk gambaran mengenai dirinya dan masa depannya. Ketika hubungan anak dengan sekolah terputus, sebagian dari ruang perkembangan tersebut ikut hilang. Anak dapat mengalami perubahan dalam rasa percaya diri, harapan terhadap masa depan, serta keterhubungannya dengan lingkungan sosial. Namun demikian, hubungan antara putus sekolah dan kondisi psikologis tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hubungan sebab-akibat tunggal. Menurut (Tong et al., 2023), melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara masalah kesehatan mental dan putus sekolah, sekaligus menegaskan bahwa hubungan tersebut dapat berlangsung secara timbal balik. Artinya, kondisi psikologis tertentu dapat meningkatkan risiko anak meninggalkan sekolah, sementara keterputusan dari pendidikan juga dapat menjadi bagian dari proses kerentanan psikososial anak.

Putus sekolah juga dapat memengaruhi kehidupan sosial anak. Sekolah merupakan salah satu ruang penting bagi anak untuk membangun jaringan pertemanan, belajar bekerja sama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, dan memperoleh dukungan sosial. Ketika anak meninggalkan sekolah, keterhubungannya dengan jaringan sosial pendidikan tersebut dapat berkurang. Apabila anak tidak memiliki lingkungan alternatif yang mendukung, kondisi ini dapat meningkatkan risiko marginalisasi sosial. Anak dapat semakin jauh dari lingkungan yang memberikan pengalaman belajar, aktivitas positif, dan dukungan untuk

mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, persoalan putus sekolah tidak hanya menyangkut hubungan antara anak dan lembaga pendidikan, tetapi juga menyangkut posisi anak dalam lingkungan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks masyarakat Papua, dampak putus sekolah perlu dipahami dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya. Pendidikan formal bagi anak Papua berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang memiliki keragaman bahasa, nilai, tradisi, identitas, serta sistem pengetahuan lokal. Karena itu, keterputusan pendidikan dapat memiliki makna yang lebih kompleks daripada sekadar hilangnya kesempatan memperoleh ijazah. Menurut (Parker & Sudibyo, 2024) di Merauke menunjukkan bahwa pengalaman anak dan kaum muda yang meninggalkan sekolah berkaitan dengan persoalan ekonomi, pengalaman sekolah, stigma terhadap masyarakat Marind, self-stigmatisation, dan cultural discontinuity. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial dan budaya yang membentuk kehidupannya.

Perspektif tersebut diperkuat oleh kajian (Albertus Fiharsono; et al., 2026) mengenai school belonging pada peserta didik Indigenous di Papua. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan komunitas, penggunaan bahasa lokal, integrasi pengetahuan dan praktik budaya, serta pembelajaran yang dikontekstualisasikan dengan kehidupan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan anak dengan sekolah tidak hanya dibentuk oleh kualitas pembelajaran secara akademik, tetapi juga oleh sejauh mana sekolah mampu menciptakan rasa diterima, dihargai, dan memiliki keterhubungan dengan identitas

serta lingkungan sosial-budaya anak. Dalam perspektif ini, dampak putus sekolah perlu dipahami pula sebagai berkurangnya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang dapat mempertemukan kompetensi akademik dengan identitas dan kehidupan sosial-budayanya.

Berbagai dampak tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dapat saling berinteraksi dan membentuk kerentanan yang bersifat kumulatif. Anak yang berhenti sekolah dapat mengalami keterbatasan dalam memperoleh kompetensi akademik, yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesempatan melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan. Keterbatasan kesempatan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan sosial, sementara berkurangnya hubungan dengan lingkungan pendidikan dapat mempersempit akses anak terhadap dukungan sosial dan kesempatan pengembangan diri. Dalam situasi tertentu, kerentanan tersebut dapat berlangsung hingga masa dewasa dan bahkan berpotensi memengaruhi kondisi kehidupan keluarga pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, putus sekolah lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses eksklusi pendidikan dan sosial yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap pembangunan manusia.

Dalam konteks Papua, pemahaman mengenai dampak tersebut menjadi semakin penting karena persoalan pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang ada di sekitarnya. Anak yang putus sekolah bukan hanya kehilangan kesempatan belajar di ruang kelas, tetapi juga berpotensi kehilangan berbagai kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri, memperluas jaringan sosial, memperoleh orientasi masa depan, dan

membangun hubungan yang konstruktif antara pendidikan dengan kehidupan komunitasnya. Karena itu, dampak putus sekolah perlu dipandang sebagai persoalan yang menyangkut perkembangan anak secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putus sekolah merupakan fenomena multidimensional yang memberikan dampak terhadap perkembangan akademik, peluang ekonomi, kesejahteraan psikologis, relasi sosial, serta perkembangan identitas dan keterhubungan budaya anak. Dampak tersebut dapat berlangsung secara bertahap dan saling memperkuat sehingga menyebabkan anak semakin sulit untuk kembali memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan diri. Pemahaman mengenai dampak yang bersifat multidimensional ini menjadi dasar penting untuk melihat bahwa penanganan anak putus sekolah tidak cukup dilakukan hanya melalui intervensi administratif berupa pengembalian anak ke sekolah. Anak juga membutuhkan lingkungan yang mampu memberikan dukungan pendidikan, sosial, psikologis, keluarga, budaya, dan spiritual agar mereka dapat kembali membangun harapan serta orientasi masa depan. Perspektif inilah yang kemudian menjadi landasan penting dalam mengkaji kebutuhan pendampingan anak putus sekolah dalam konteks pastoral Gereja di Papua.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu bertujuan untuk memahami peta akademik yang telah terbentuk, mencegah pengulangan penelitian, serta menegaskan kedudukan dan keunikan penelitian ini di antara literatur yang ada. Dua belas penelitian terdahulu berikut dipilih karena relevansinya dengan topik peran

Gereja sebagai agen pastoral dalam mendampingi anak-anak asli Papua yang mengalami putus pendidikan, dan disajikan secara ringkas dalam tabel di bawah ini untuk memudahkan perbandingan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul & Sumber	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	(Waruwu & Marbun, 2025)	Pendampingan Pastoral Konseling kepada Anak Putus Sekolah Dengan Pendekatan Client Centered dan REBT Agar Percaya Diri. Sukacita, Vol. 2 No. 1.	Kualitatif Studi Kasus	Kombinasi Client-Centered dan REBT efektif mengubah pola pikir negatif, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak putus sekolah.	Memberikan landasan teknik konseling pastoral yang dapat diadaptasi dalam pendampingan anak di Lingkungan St. Paulus.
2	(Joseph et al., 2025)	Panggilan Gereja untuk Memperjuangkan Keadilan Pendidikan. Dunamis: Jurnal Teologi dan	Teologis-Normatif	Gereja memiliki mandat teologis sebagai agen keadilan pendidikan bagi anak komunitas adat dan keluarga kurang	Memperkuat argumen bahwa keterlibatan Gereja dalam pendidikan anak asli Papua adalah

		Pendidikan Kristiani, Vol. 10 No. 1.		mampu berdasarkan konsep imago Dei.	manifestasi iman, bukan sekadar kegiatan sosial tambahan.
3	(Anouw & Sigap, 2023)	Layanan Gereja (Kingmi) Di Tanah Papua untuk Anak Jalanan di Sorong. Missio Ecclesiae, Vol. 11 No. 2.	Kualitatif Deskriptif	Gereja Kingmi mengembangkan model integral mission yang mencakup pembinaan spiritual, pendidikan non- formal, kebutuhan dasar, dan advokasi hak anak jalanan di Papua Barat.	Model integral mission ini dapat menjadi acuan bagi Paroki Bambu Pemali dalam merancang pelayanan holistik untuk anak asli Papua yang putus sekolah.
4	(Meran, 2023)	Konseling Pastoral Sebagai Kebutuhan Pendampingan Bagi Anak Jalanan Di Kelurahan Maro- Distrik Merauke. Jumpa, Vol. 11 No. 1.	Kualitatif Deskriptif	Konseling pastoral berperan penting dalam memulihkan hubungan anak jalanan dengan diri sendiri, keluarga, dan Tuhan, serta	Berlokasi di Merauke, temuan ini sangat dekat secara geografis dan kontekstual dengan Lingkungan St. Paulus,

				membantu mereka kembali ke pendidikan formal.	memperkuat urgensi konseling pastoral.
5	(Arifin & Hermino, 2018)	The Role of Church and Parent in Early Childhood Education in the Central Highlands of Papua. Proceedings ECPE.	Kualitatif Studi Kasus	Kolaborasi aktif antara Gereja dan keluarga merupakan fondasi tidak tergantikan bagi keberhasilan pendidikan anak-anak Papua.	Peran kolaboratif Gereja-keluarga dalam penelitian ini menjadi landasan utama strategi penguatan orang tua di Lingkungan St. Paulus.

Berdasarkan lima penelitian yang disajikan dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa masing-masing studi memberikan kontribusi unik sekaligus saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang komprehensif. Penelitian (Waruwu & Marbun, 2025) memberikan teknik konseling pastoral yang dapat diadaptasi, sementara (Joseph et al., 2025) memperkuat landasan teologisnya. (Marnina et al., 2023) dan (Meran, 2023) memberikan bukti empiris yang dekat secara geografis dengan lokasi penelitian ini di Merauke, sedangkan (Arifin & Hermino, 2018) menegaskan pentingnya kolaborasi Gereja-keluarga.

2.6.1 Persamaan, Perbedaan, dan Analisis Kesenjangan Penelitian Terdahulu

Seluruh literatur yang dikaji menunjukkan kesamaan fundamental dalam menempatkan Gereja sebagai aktor kunci yang memiliki mandat teologi seperti *imago Dei* dan *missio integralis* untuk melakukan transformasi sosial dan pendidikan. Sebagian besar penelitian, termasuk karya (Waruwu & Marbun, 2025), (Anouw & Sigap, 2023), dan (Arifin & Hermino, 2018), menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek spiritualitas dengan kebutuhan praktis-sosial. Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa pelayanan di tanah Papua harus berbasis pada kearifan lokal dan kolaborasi aktif antara institusi Gereja, keluarga, serta komunitas adat agar pendampingan dapat berlangsung dengan efektif dan berkelanjutan.

Perbedaan yang paling mencolok terletak pada metodologi dan fokus intervensi yang diterapkan. Beberapa penelitian memfokuskan perhatian pada teknik psikologis seperti *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dan pendekatan *Client-Centered* (Waruwu & Marbun, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Gereja dalam merespons persoalan pendidikan dan kerentanan anak berkembang dalam bentuk yang beragam. (Kenelak & Ziraluo, 2025) menekankan pendekatan hermeneutik-teologis dengan menjadikan Markus 10:13–16 sebagai landasan teologis bagi penguatan pelayanan Gereja terhadap anak dan pengurangan kesenjangan pendidikan di Papua. Sementara itu, (Yermiasih et al., 2023) menunjukkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A) yang menjalankan fungsi pendamping, fasilitator, promotor, dan edukator dalam mewujudkan Gereja Ramah Anak. Kedua penelitian

tersebut memperlihatkan bahwa respons Gereja terhadap persoalan anak dapat dikembangkan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu penguatan landasan teologis dan penguatan struktur pelayanan yang memungkinkan pendampingan dilakukan secara lebih sistematis dan holistik. Lokasi penelitian juga bervariasi, mulai dari wilayah pegunungan (Baliem) hingga daerah konflik (Arso Timur). Hal ini menghasilkan model pelayanan yang beragam, mulai dari kursus bahasa Inggris yang mengedepankan kearifan lokal (Marnina et al., 2023) hingga advokasi kebijakan pendidikan yang bersifat profetis (Kristi Kristi et al., 2025).

Meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai pendidikan di wilayah Papua, masih terdapat kesenjangan tertentu terkait lokasi dan topik penelitian di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke. Hingga kini, belum ada penelitian yang secara mendetail membahas peran "Agen Pastoral" dalam struktur hierarki Gereja Katolik di tingkat lingkungan untuk menangani isu anak-anak yang putus sekolah secara khusus. Sebagian besar literatur sebelumnya lebih bersifat umum atau fokus pada gereja-gereja Protestan (GKI, GIDI, Kingmi, GKJW). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis bagaimana mekanisme pastoral Katolik di tingkat dasar (lingkungan) dapat berfungsi sebagai jembatan langsung untuk anak-anak Papua yang terpinggirkan dari pendidikan formal.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kesenjangan konseptual. Literatur terdahulu cenderung mengkaji intervensi dalam bentuk program tertentu misalnya konseling pastoral, pembinaan keterampilan, pelayanan anak jalanan, kelompok kerja

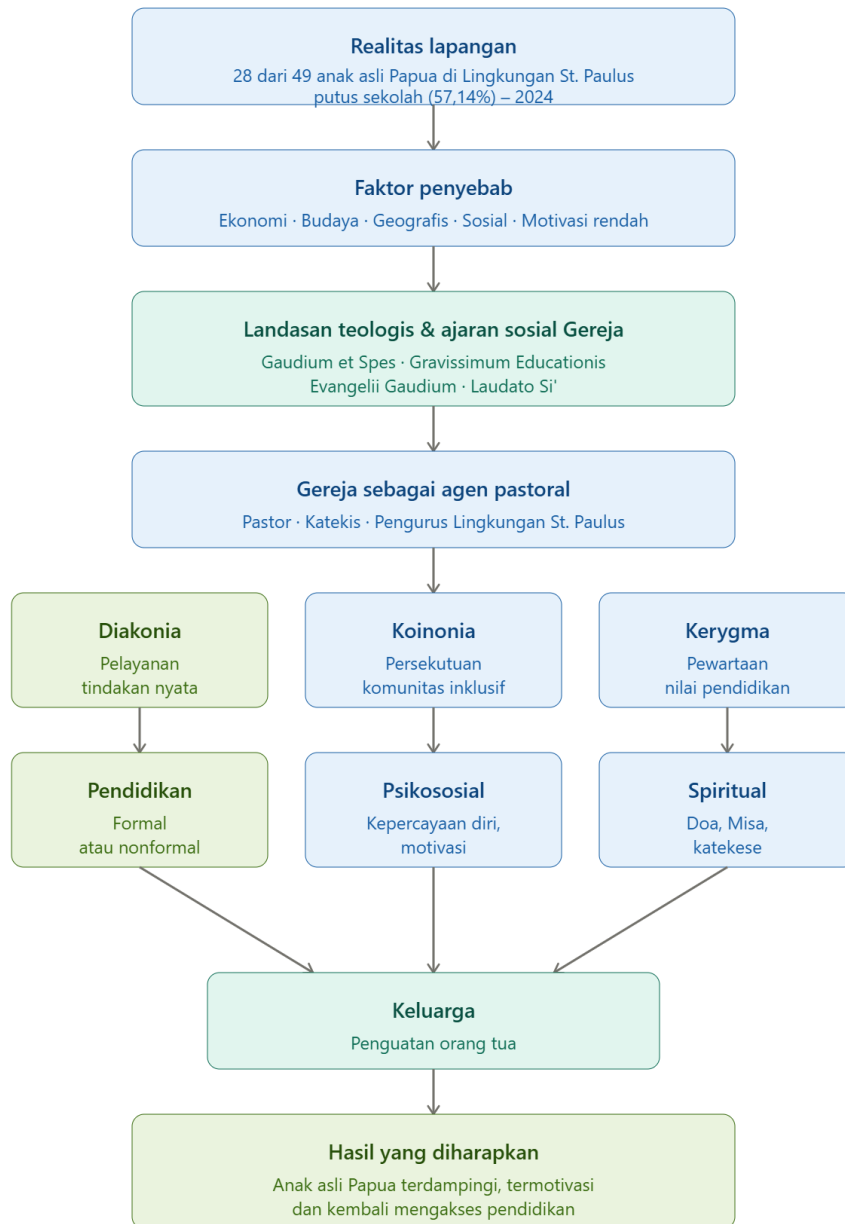
perlindungan anak, atau advokasi keadilan pendidikan. Penelitian ini berupaya melihat persoalan tersebut secara lebih integratif dengan menempatkan pendampingan anak putus sekolah sebagai bagian dari panggilan pastoral Gereja yang mencakup dimensi kerygma, koinonia, diakonia, dan martyria, serta menghubungkannya dengan fungsi konkret Agen Pastoral di tingkat lingkungan. Perspektif tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya melihat apa yang dilakukan Gereja, tetapi juga bagaimana relasi pastoral dibangun, bagaimana kebutuhan anak dikenali, bagaimana keluarga dan komunitas dilibatkan, serta bagaimana Gereja dapat menjadi jembatan antara anak yang terpinggirkan dan sistem pendidikan formal.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aktor, struktur, dan konteks pelayanan pastoral yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian, yaitu Agen Pastoral pada tingkat lingkungan dalam Gereja Katolik, khususnya di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai kapasitas, praktik, tantangan, dan strategi Agen Pastoral dalam mendampingi anak asli Papua yang putus sekolah sekaligus menjelaskan bentuk hubungan yang dapat dibangun antara Gereja, keluarga, komunitas, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur mengenai pelayanan pastoral Katolik di tingkat lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pendampingan yang lebih kontekstual, partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan hak pendidikan anak.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki orisinalitas sekaligus urgensi akademik dan pastoral. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian tentang hubungan antara Gereja, pastoral, dan pendidikan dengan menghadirkan perspektif Gereja Katolik pada tingkat lingkungan yang belum banyak dikaji secara khusus. Secara praktis-pastoral, penelitian ini berangkat dari kebutuhan nyata untuk memperkuat kapasitas Gereja agar tidak hanya hadir ketika persoalan putus sekolah telah terjadi, tetapi mampu membangun mekanisme pendampingan yang bersifat preventif, responsif, dan berkelanjutan. Kajian terhadap penelitian terdahulu dan kesenjangan yang ditemukan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan kerangka berpikir penelitian, khususnya mengenai hubungan antara persoalan anak putus sekolah, kebutuhan pendampingan, peran Agen Pastoral, sumber daya Gereja, keterlibatan keluarga dan komunitas, serta strategi pastoral yang dapat dikembangkan.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran konseptual yang menunjukkan keterkaitan antara konsep, teori, dan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Kerangka pikir disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan alur pemikiran dalam memahami permasalahan penelitian serta hubungan antarkomponen yang dikaji. Berdasarkan landasan teori dan kajian yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini berangkat dari sebuah realitas lapangan yang memprihatinkan, yakni 28 dari 49 anak asli Papua di Lingkungan St. Paulus putus sekolah (57,14%) pada tahun 2024. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan

cerminan dari persoalan sosial yang kompleks dan mendesak untuk ditangani. Sebelum merancang solusi, penelitian ini terlebih dahulu mengidentifikasi akar masalahnya, yaitu faktor ekonomi, budaya, geografis, sosial, dan rendahnya motivasi belajar. Pemahaman atas faktor-faktor penyebab ini menjadi titik berangkat yang menentukan arah seluruh kerangka berpikir berikutnya.

Karena penelitian ini berpijak pada konteks gerejawi, seluruh upaya penanganan dilandaskan pada ajaran sosial Gereja Katolik sebagai pijakan normatif dan teologis. Dokumen-dokumen seperti *Gaudium et Spes*, *Gravissimum Educationis*, *Evangelii Gaudium*, dan *Laudato Si'* memberikan legitimasi moral bahwa Gereja memiliki tanggung jawab nyata terhadap pendidikan dan kesejahteraan manusia, khususnya mereka yang terpinggirkan. Landasan ini menegaskan bahwa tindakan pastoral bukan sekadar kegiatan sosial biasa, melainkan bagian dari misi Gereja yang menyeluruh.

Dengan landasan tersebut, Gereja hadir sebagai agen pastoral melalui para pelaksana di lapangan, yakni pastor, katekis, dan pengurus Lingkungan St. Paulus. Mereka bertindak sebagai ujung tombak yang menjembatani nilai-nilai teologis dengan kebutuhan nyata di komunitas. Kehadiran mereka tidak bersifat top-down semata, tetapi berakar dalam relasi pastoral yang dekat dengan keluarga dan anak-anak Papua di lingkungan tersebut.

Gereja kemudian menjalankan misinya melalui tiga pilar pastoral klasik, yaitu Diakonia (pelayanan dan tindakan nyata), Koinonia (membangun persekutuan komunitas yang inklusif), dan Kerygma (mewartakan nilai-nilai pendidikan). Ketiga

pilar ini bukan strategi yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan menggerakkan tiga bentuk intervensi langsung kepada anak, yaitu pendidikan formal maupun nonformal, pendampingan psikososial untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi, serta pembinaan spiritual melalui doa, Misa, dan katekese.

Namun intervensi kepada anak saja tidak cukup tanpa melibatkan keluarga sebagai lingkungan terdekat. Oleh karena itu, penguatan orang tua menjadi bagian penting dalam kerangka ini, agar keluarga mampu menjadi pendukung utama pendidikan anak dari dalam rumah. Pendekatan holistik ini mengakui bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya bisa terjadi bila anak, keluarga, dan komunitas bergerak bersama dalam ekosistem yang saling mendukung.

Untuk memahami dan mendokumentasikan seluruh proses ini secara akademis, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Metode ini dipilih karena mampu menangkap realitas, pengalaman, dan makna yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Pada akhirnya, seluruh alur kerangka pikir ini bermuara pada satu tujuan: anak-anak asli Papua terdampingi, termotivasi, dan kembali mengakses pendidikan sebagai hak dasar mereka. Kerangka pemikiran ini menunjukkan alur logis dari penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir, terdiri dari delapan elemen yang saling mendukung:

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivis-konstruktivis, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dibangun melalui pengalaman dan pemaknaan subjek penelitian. Strategi ini dipilih karena permasalahan yang dikaji yakni peran pastoral Gereja dalam pendampingan anak putus sekolah bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat dipahami secara memadai melalui angka semata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, motivasi, serta praktik para Agen Pastoral, keluarga, dan anak dalam menghadapi persoalan putus sekolah. Realitas pastoral dipahami sebagai pengalaman yang terbentuk melalui interaksi antara individu, keluarga, komunitas, dan struktur Gereja dalam konteks sosial-budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya berfokus pada apa yang dilakukan oleh Gereja, tetapi juga berusaha memahami bagaimana peran tersebut dimaknai, dijalankan, dan dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Paradigma interpretivis-konstruktivis memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap keragaman perspektif dan pengalaman subjek tanpa memaksakan satu pemaknaan tunggal terhadap realitas pastoral. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme pendampingan, bentuk relasi pastoral, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan peran

Gereja dalam membantu anak memperoleh kembali akses dan keberlanjutan pendidikan.

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan cara studi kasus lapangan, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam gejala yang terjadi di unit kajian tunggal, yaitu Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke. Pengumpulan data dijalankan melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data mengikuti model interaktif (Miles et al., 2014). Secara ringkas, karakteristik pendekatan penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Karakteristik Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Aspek	Uraian
Paradigma	Interpretivis / Konstruktivis
Pendekatan	Kualitatif
Jenis	Deskriptif
Metode	Studi Kasus Lapangan
Fokus	Peran pastoral Gereja dalam pendampingan anak putus sekolah
Unit Analisis	Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali
Teknik Pengumpulan	Observasi, Wawancara Mendalam, Studi Dokumentasi
Analisis	Miles, Huberman & Saldaña (2014)

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Menurut (Creswell & Poth, 2018), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap isu sosial atau kemanusiaan. (Moleong, 2017:11)

menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat deskriptif, yang dapat berbentuk kata-kata, penjelasan, ataupun gambar. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengedepankan data numerik, penelitian kualitatif memberikan perhatian lebih pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena melalui deskripsi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif dalam laporan penelitian.

Fenomena anak-anak asli Papua yang terputus dari pendidikan formal merupakan isu sosial yang rumit dan tidak bisa hanya dijelaskan dengan angka. Masalah ini terkait dengan pengalaman hidup yang nyata, latar belakang budaya, keadaan keluarga, dan partisipasi berbagai pihak, termasuk gereja, dalam proses pendampingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menyelami lebih dalam makna, pengalaman, dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, diharapkan dapat mengungkapkan kekayaan dan kedalaman makna dari pengalaman anak-anak putus sekolah, anggota keluarga, serta peran gereja sebagai agen pastoral secara utuh dan komprehensif, sesuai dengan kondisi yang ada di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke. Selain itu, peran pekerja paroki sebagai aktor kunci dalam proses pastoral juga dapat terungkap dengan baik.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Santo Yosep Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis berikut:

- a. Lokasi ini secara langsung menghadapi permasalahan putus sekolah yang sangat serius. Berdasarkan data awal, dari total 49 anak asli Papua yang terdata, sebanyak 28 anak (57,14%) mengalami putus sekolah atau tidak bersekolah pada tahun 2024 jauh melampaui rata-rata nasional.
- b. Lingkungan Santo Paulus merupakan bagian dari Paroki Bambu Pemali yang berada di bawah naungan Keuskupan Agung Merauke, keuskupan tertua di Indonesia (didirikan 1905) yang memiliki sejarah panjang dalam pelayanan pendidikan dan sosial di Papua.
- c. Peneliti memiliki akses lapangan yang memadai di lokasi ini, termasuk hubungan yang telah terjalin dengan pengurus lingkungan dan paroki, sehingga proses pengumpulan data dapat berlangsung secara lebih mendalam dan dipercaya.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tujuh bulan, dari bulan Januari hingga Juli 2026. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Tahap kegiatan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst
1	Penyusunan proposal								
2	Ujian proposal								
3	Revisi								
4	Pengumpulan data di lapangan								
5	Analisis Data								
6	Ujian Skripsi								

3.3 Objek Dan Subjek

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau fokus kajian teori dalam sebuah penelitian. Objek penelitian dapat menunjukkan apa yang diteliti oleh peneliti, atau bukan siapa yang diteliti.

Objek dalam penelitian ini adalah peran gereja sebagai agen pastoral dalam pendampingan anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke.

Secara lebih rinci, yang menjadi objek penelitian ini mencakup:

1. Pertama, peran nyata yang dijalankan oleh gereja melalui pastor, katekis, dan pengurus lingkungan dalam melaksanakan tugas pastoral kepada anak-anak asli Papua yang tidak lagi mengenyam pendidikan formal di lingkungan tersebut.

2. Kedua, bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan oleh gereja kepada anak asli Papua yang putus sekolah, baik pendampingan yang bersifat spiritual, psikososial, pendidikan, maupun pendampingan terhadap keluarga anak yang bersangkutan.
3. Ketiga, proses dan dinamika pelayanan pastoral yang berlangsung di Lingkungan St. Paulus sebagai bagian dari misi gereja dalam menjawab tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat asli Papua, khususnya dalam bidang pendidikan.

Objek penelitian ini bukan hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan formal gereja semata, melainkan mencakup seluruh bentuk kehadiran dan keterlibatan gereja secara holistik dalam kehidupan anak-anak asli Papua yang mengalami putus sekolah Lingkungan St. Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke.

3.3.2 Subjek Penelitian (Informan)

Subjek penelitian atau informan dipilih secara purposif (*purposive sampling*), yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah semata, tetapi pada relevansi pengalaman, pengetahuan, keterlibatan, dan kapasitas informan dalam memberikan informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan demikian, informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan data yang kaya, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2019:147). Informan penelitian ini terdiri dari lima kelompok, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Subjek Penelitian dan Kriteria Pemilihan Informan

No	Kelompok informan	Jumlah	Alasan/kriteria pemilihan
1	Anak asli Papua yang putus sekolah (usia 7-18 tahun)	8 anak	Subjek utama; paling otentik menggambarkan pengalaman putus sekolah
2	Orang tua / wali anak putus sekolah	8 orang	Memberikan perspektif faktor keluarga dan ekonomi penyebab putus sekolah
3	Pengurus Lingkungan Santo Paulus (Ketua & koordinator)	1 orang	Pelaksana program pastoral di tingkat komunitas; mengetahui kondisi lapangan
4	Pastor / tokoh pastoral Paroki Bambu Pemali	1 orang	Otoritas kebijakan pastoral; perancang program sosial paroki
5	Perwakilan Keuskupan Agung Merauke (bid. pendidikan/sosial)	1 orang	Perspektif makro kebijakan pendidikan dan pastoral keuskupan

Sumber: Rancangan Peneliti, 2025

3.4 Definisi Konseptual

Untuk menjamin kejelasan, konsistensi, dan keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan, penelitian ini merumuskan definisi konseptual dari istilah-istilah utama yang menjadi dasar pembahasan dan analisis penelitian. Definisi tersebut digunakan sebagai batasan konseptual agar setiap istilah dipahami secara tepat dan sesuai dengan konteks penelitian. Adapun definisi konseptual istilah-istilah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Definisi Konseptual Variabel Penelitian

No	Istilah konsep	Definisi konseptual	Sumber
1	Peran Gereja sebagai Agen Pastoral	Seluruh peran, tugas, dan kegiatan nyata yang dilakukan oleh Gereja melalui sistem parokinya mencakup kerygma (penyampaian berita), koinonia (komunitas), dan diakonia (pelayanan) dalam mendukung dan memberdayakan jemaat, terutama anak-anak yang paling rentan.	Bevans & Schroeder (2004); Konsili Vatikan II, <i>Gaudium et Spes</i> (1965)
2	Pendampingan	Proses interaksi sosial yang terstruktur, terus-menerus, dan berbasis pada kemanusiaan antara pendamping serta yang didampingi dengan tujuan menyelesaikan masalah, meningkatkan dukungan sosial, dan meningkatkan kemampuan pribadi untuk meraih kesejahteraan.	Departemen Sosial RI (2007:4)
3	Anak Asli Papua	Anak yang secara etnis merupakan keturunan dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli yang mendiami Tanah Papua,	UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Pasal 1 huruf t

		dalam hal ini berdomisili di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke.	
4	Putus Sekolah	Situasi di mana seorang siswa yang telah terdaftar di lembaga pendidikan formal kemudian tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang semestinya, baik karena menghentikan proses pembelajaran pada tingkat yang sedang diikuti atau tidak beralih ke jenjang berikutnya.	BPS (2023); Widjayatri (2025)
5	Pastoral Sosial	Seluruh upaya yang dilakukan oleh Gereja untuk menyatukan elemen spiritual dan sosial dalam merespons kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya meliputi kegiatan pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan advokasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan memenuhi hak-hak dasar manusia.	Paus Fransiskus, Evangelii Gaudium (2013)

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2025

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam studi ini adalah penjelasan mengenai konsep-konsep utama yang digunakan secara khusus dan dapat diukur, agar makna setiap variabel atau istilah kunci yang menjadi inti penelitian menjadi jelas. Penjelasan ini sangat penting untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran selama pengumpulan data, analisis, atau penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, definisi operasional bertindak sebagai panduan baik secara konseptual maupun praktis yang membimbing semua langkah dalam penelitian agar tetap konsisten, terarah, dan bertanggung jawab secara ilmiah.

Gereja sebagai agen yang memberikan pelayanan pastoral akan dijelaskan sebagai seluruh tindakan spesifik yang dilakukan oleh gereja (melalui pendeta, katekis, atau pemimpin komunitas lainnya) dalam mendukung anak-anak asli Papua yang telah meninggalkan pendidikan formal. Pendekatan ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan dengan fokus pada indikator-indikator berikut:

- a. Kerygma: Gereja mencerminkan komitmennya untuk menanamkan nilai-nilai iman dan harapan kepada setiap individu yang telah terputus dari gereja.
- b. Koinonia: Gereja menciptakan suasana kebersamaan dan penerimaan bagi semua individu yang telah terasing dari komunitas.
- c. Diakonia: Tindakan nyata dalam memberikan bantuan sosial, ekonomi, dan pendidikan oleh gereja kepada masyarakat.

- d. Martyria: Gereja berfungsi sebagai teladan bagi anak-anak asli Papua serta menjadi suara untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pendampingan Anak Asli Papua yang Putus Sekolah

Pendampingan anak asli Papua yang putus sekolah dipahami sebagai proses dan pengalaman nyata yang dirasakan oleh anak asli Papua di Lingkungan St. Paulus dalam menerima perhatian dan pelayanan dari gereja. Informasi digali melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan berfokus pada indikator:

- a. Pendampingan Spiritual: Pengalaman anak dalam menerima dukungan rohani dari gereja (doa, misa, katekese)
- b. Pendampingan Psikososial: Perubahan yang dirasakan anak dari sisi kepercayaan diri, motivasi hidup, dan rasa diterima di lingkungan sosial
- c. Pendampingan Pendidikan: Upaya gereja dalam membantu anak mengakses kembali pendidikan formal atau nonformal (kejar paket, pelatihan keterampilan)
- d. Pendampingan Keluarga: Keterlibatan gereja dalam mendekati dan menguatkan keluarga anak putus sekolah

3.6 Teknik Pengumpulan Data Dan Sumber Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi ini, proses pengumpulan data dirancang secara cermat untuk memperoleh informasi yang mendalam, kaya makna, dan kontekstual sesuai dengan realitas yang dialami oleh para subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipilih bukan sekadar alat

administratif, melainkan merupakan instrumen utama yang menentukan kualitas dan kedalaman temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi agar data yang diperoleh dapat mencerminkan situasi sesungguhnya secara komprehensif, valid, dan dapat dipercaya. Adapun data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan moderat, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan komunitas sambil tetap menjalankan fungsinya sebagai pengamat (Sugiyono, 2019:203). Aspek-aspek yang diobservasi meliputi:

- a. Kondisi fisik dan sosial Lingkungan Santo Paulus, termasuk kondisi perumahan, fasilitas umum, dan sarana pendidikan yang tersedia.
- b. Kegiatan pastoral lingkungan dan paroki, termasuk pertemuan lingkungan, kegiatan katekese, dan program sosial.
- c. Interaksi sosial antara anak-anak putus sekolah dengan keluarga, sesama teman, dan pengurus lingkungan.
- d. Kondisi dan aktivitas harian anak-anak putus sekolah di lingkungan tersebut.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah metode dasar untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tipe wawancara yang diterapkan adalah semi-terstruktur, yang berarti

wawancara menggunakan pedoman pertanyaan utama namun masih dapat disesuaikan dengan perkembangan pertanyaan berdasarkan jawaban dari informan (Moleong, 2017:186).

Tabel 3.5 Panduan Fokus Wawancara per Kelompok Informan

Kelompok informan	Fokus pertanyaan utama
Anak Putus Sekolah	Pengalaman & alasan berhenti sekolah; perasaan dan harapan; keterlibatan dalam program pastoral Gereja
Orang Tua / Wali	Persepsi pentingnya pendidikan; faktor keluarga penyebab putus sekolah; pandangan tentang peran Gereja
Pengurus Lingkungan	Kondisi anak putus sekolah; program yang sudah dilakukan; hambatan yang dihadapi; harapan ke depan
Pastor / Tokoh Paroki	Kebijakan pastoral; program yang telah dilaksanakan; kendala dan peluang; visi penanganan putus sekolah

3. Studi Dokumentasi

Data akan dikumpulkan dari sumber dokumentasi sekunder. Menurut (Sugiyono, 2019:240), dokumen adalah catatan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan dapat berupa tulisan, gambar, atau artefak berwujud. Untuk proyek penelitian ini, tinjauan dokumen diselesaikan dengan menggunakan templat tinjauan dokumen untuk setiap sumber data sekunder yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel. 3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik	Sumber Data
Wawancara mendalam	Pastor, katekis, pengurus lingkungan, anak putus sekolah, orang tua
Observasi	Kegiatan pastoral di Lingkungan St. Paulus
Dokumentasi	Arsip kegiatan gereja, data anak putus sekolah

3.7 Subjek / Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memberikan data serta informasi yang diperlukan secara langsung. Pemilihan informan dilakukan dengan cara yang sengaja, berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan, pemahaman, dan pengalaman yang berkaitan dengan isu putus sekolah pada anak-anak asli Papua di Lingkungan St. Paulus.

Tabel 3.7 Informan Penelitian

No	Kategori informan	Jumlah	Alasan pemilihan kriteria
1	Anak Asli Papua Putus Sekolah	8 orang	Subjek utama yang mengalami langsung permasalahan pendidikan di Lingkungan St. Paulus.
2	Pengurus Lingkungan St. Paulus	1 orang	Agen pastoral terdekat yang mengetahui kondisi lapangan

			dan data anak-anak di lingkungan tersebut.
3	Pastor Paroki Bambu Pemali	1 orang	Pemegang kebijakan pastoral tertinggi di paroki untuk menjelaskan visi, misi, dan dukungan institusional.
4	Orang Tua Anak	8 orang	Untuk memberikan perspektif mengenai hambatan ekonomi atau budaya dari sisi keluarga.

3.8 Sumber Data

3.8.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian melalui keterlibatan peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari lima kelompok informan yang dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, praktik, serta dinamika pastoral dalam pendampingan anak putus sekolah.

3.8.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, laporan, dan literatur relevan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.8 Sumber Data Sekunder Penelitian

No	Jenis dokumen	Keterangan
1	Dokumen Resmi Gereja	Gaudium et Spes, Gravissimum Educationis, Lumen Gentium, Laudato Si', Evangelii Gaudium, Kompendium Ajaran Sosial Gereja
2	Dokumen Administratif Paroki	Buku induk umat, catatan kegiatan pastoral, laporan program sosial, data keanggotaan anak di lingkungan
3	Data Pemerintah	Data BPS (Susenas 2023), laporan Dinas Pendidikan Prov. Papua Selatan, data KPK, kajian Universitas Papua (Sumule, 2023)
4	Penelitian Ilmiah	Jurnal, skripsi, tesis, prosiding yang relevan sebagaimana dikaji dalam Bab II
5	Peraturan Perundang-undangan	UUD 1945 Pasal 31; UU No. 20/2003; PP No. 47/2008 tentang Wajib Belajar; UU No. 21/2001 Otsus Papua

3.9 Keabsahan Data

Keabsahan atau validitas informasi adalah bagian penting dalam kajian kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan empat standar keabsahan data yang diutarakan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam (Moleong, 2017:324), yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Kriteria dan Teknik Keabsahan Data

No	Kriteria	Pengertian	Teknik yang di gunakan
	Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	Apakah temuan dapat dipercaya oleh partisipan dan pihak yang menjalani realitas yang diteliti	• Triangulasi sumber, teknik, dan teori • Member checking (konfirmasi ke informan) • Perpanjangan waktu pengamatan • Ketekunan pengamatan mendalam
	Transferabilitas (<i>Transferability</i>)	Sejauh mana temuan relevan bagi konteks lain yang memiliki karakteristik serupa	• Deskripsi konteks yang kaya dan mendalam (thick description) • Penyajian data lapangan yang detail dan otentik
	Dependabilitas (<i>Dependability</i>)	Konsistensi proses penelitian dan ketergantungan temuan pada data yang dikumpulkan	• Dokumentasi audit trail (catatan lapangan, transkrip, lembar observasi) • Bimbingan dan evaluasi pembimbing secara berkala
	Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>)	Objektivitas temuan; sejauh mana temuan dapat dikonfirmasi pihak lain	• Refleksivitas peneliti yang jujur dan terbuka • Triangulasi untuk mengonfirmasi temuan • Laporan audit yang dapat ditelusuri

Sumber: Diadaptasi dari Lincoln & Guba (1985) dalam Moleong (2017)

3.10 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh (Miles et al., 2014). Model ini terdiri dari empat komponen yang berlangsung secara bersamaan dan berulang (siklus), bukan linear. Keempat komponen tersebut adalah:

Tabel 3.10 Komponen Analisis Data Model Miles, Huberman & Saldaña (2014)

No	Komponen	Uraian kegiatan	Output yang dihasilkan
	Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	Seluruh rangkaian pengumpulan informasi di lokasi dilakukan dengan cara mengamati, melakukan wawancara, dan meneliti dokumen. Pada saat proses ini, analisis awal telah dimulai.	Catatan lapangan, transkrip wawancara, salinan dokumen
	Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>)	Pemilihan, penentuan fokus, penyederhanaan, dan perubahan data mentah. Termasuk pengkodean, pembuatan ringkasan, serta penentuan tema-tema kunci.	Kode data, kategori, memo analitik, tema-tema utama
	Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	Menyusun data yang telah disusun dalam bentuk cerita deskriptif, tabel, grafik, atau matriks yang memungkinkan pengambilan kesimpulan.	Narasi deskriptif, tabel perbandingan, bagan relasi antar tema

	Penarikan Kesimpulan & Verifikasi <i>(Conclusion Drawing & Verification)</i>	Penyusunan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diberikan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ulang catatan lapangan dan konfirmasi kepada narasumber.	Kesimpulan penelitian dan rekomendasi program pastoral
--	---	---	---

Sumber: Diadaptasi dari Miles, Huberman & Saldaña (2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke

Lingkungan Santo Paulus merupakan salah satu komunitas basis gerejawi yang berada di wilayah Paroki Bambu Pemali, di bawah naungan Keuskupan Agung Merauke. Sebagai unit pelayanan pastoral terkecil dalam struktur teritorial Gereja Katolik, lingkungan ini berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan nyata yang dihadapi oleh umat sehari-hari, termasuk fenomena anak putus sekolah yang menjadi fokus penelitian ini.

Penting untuk menggarisbawahi kedudukan lingkungan sebagai unit terkecil ini, karena di sinilah kebijakan dan komitmen normatif Gereja pada level keuskupan maupun universal, yang dirumuskan dalam *Gaudium et Spes* (Konsili Vatikan II, 1965b) dan konsep pastoral kontekstual "*constants in context*" (Bevans et al., 2004), benar-benar diuji keberhasilannya. Sebuah dokumen kebijakan yang berpihak pada kaum miskin tidak akan memiliki arti yang signifikan jika tidak dapat diterjemahkan ke dalam praktik nyata di lingkungan-lingkungan seperti Santo Paulus. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini bukan sekadar unit administratif biasa. Teks ini merupakan titik uji (*locus of verification*) untuk menilai konsistensi antara ajaran sosial Gereja dan penerapannya di tingkat masyarakat.

Dari sisi sosial ekonomi, hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada 25 Januari 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di lingkungan tersebut menggantungkan hidup mereka pada pekerjaan serabutan dan buruh kasar dengan penghasilan harian yang tidak menentu. Kondisi perumahan warga umumnya terdiri dari bangunan semi permanen yang berdinding papan, dengan akses listrik dan air bersih yang terbatas, serta adanya indikasi kemiskinan struktural di beberapa rumah tangga. Situasi inilah yang menjadi konteks penting yang menyebabkan tingginya risiko anak putus sekolah di lingkungan ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua Lingkungan setempat, diketahui bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang beragama Katolik di Lingkungan Santo Paulus tercatat sebanyak 77 KK dengan total jumlah jiwa sebanyak 314. Batas wilayah lingkungan ini membentang dari Gedung Anggasai hingga SD Spadem, dan termasuk dalam wilayah RT 12 RW 7.

Dari perspektif kelembagaan pastoral, Paroki Bambu Pemali dipimpin oleh seorang Pastor Paroki yang telah bertugas selama 4 tahun, didampingi oleh Dewan/Pengurus Lingkungan St. Paulus. Kegiatan pastoral yang rutin dilaksanakan di lingkungan ini antara lain kunjungan pastoral bulanan, ibadah mingguan, kelompok Sekolah Minggu dan Remaja Katolik (Rekat), serta pendampingan oleh katekis yang Aktif di tengah masyarakat, kehadiran kaum muda turut memperkaya kegiatan pastoral di lingkungan ini. Kaum Muda Katolik (OMK) menjadi salah satu penggerak dalam kegiatan sosial dan pembinaan di tingkat lingkungan.

Di tingkat kebijakan, arah pastoral Keuskupan Agung Merauke, yang tercantum dalam Program Kerja Pastoral Paroki Bambu Pemali serta dokumen hasil Musyawarah Pastoral (MUSPAS), menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap pendidikan dan pemberdayaan anak asli Papua. Hal ini sejalan dengan kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan. Keberpihakan ini konsisten dengan sejarah Keuskupan Agung Merauke sebagai salah satu keuskupan tertua di Indonesia (didirikan pada tahun 1905) yang telah membangun ratusan sekolah untuk anak-anak Papua.

Namun, pada tingkat operasional di lingkungan atau stasi, masih terdapat sejumlah kendala administratif, seperti data riwayat pendidikan anak yang belum diperbarui serta belum adanya modul pendampingan khusus bagi anak putus sekolah. Masalah ini menjadi latar belakang yang penting bagi temuan penelitian yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

4.1.2 Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan lima kategori informan yang dipilih secara purposif, yaitu unsur pengurus lingkungan, pastoral paroki, orang tua/wali, anak yang mengalami putus sekolah dan Keempat kategori ini dipilih agar setiap indikator pada penelitian dapat terwakili dengan baik.

Definisi operasional mengenai peran Gereja sebagai agen pastoral yang mencakup kerygma, koinonia, diakonia, dan martyria dapat ditelusuri dari dua sudut pandang yang saling melengkapi: yaitu dari sisi pelaksana kebijakan pastoral (PS dan

PL) dan dari sisi penerima manfaat program (OT-1 dan AP). Karakteristik masing-masing informan disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian

No	Kode Informan	Kelompok	Lama Tinggal/Menjabat	Jumlah informan
1	PS-1	Pastor/tokoh pastoral Paroki	4 tahun menjabat	1
2	PL-1	Pengurus Lingkungan	4 tahun menjabat	1
3	OT1-OT8	Orang tua/wali	±8 tahun tinggal	8
4	AP1-AP8	Anak putus sekolah	Disesuaikan dengan orangtua	8

Sumber: Data primer, diolah peneliti, 2026

Pada tanggal 27 Juni 2026, wawancara dengan informan PS dan PL dilaksanakan di Gereja Paroki Bambu Pemali dan Lingkungan St. Paulus. Pada tanggal 23 Juni 2026, wawancara dengan OT-1 hingga OT-5 dilaksanakan di Lingkungan St. Paulus, sementara wawancara dengan AP dilaksanakan pada hari yang sama. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan serta analisis dokumen untuk memperkuat triangulasi data.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Gereja sebagai Agen Pastoral dalam Mendampingi Anak Putus Sekolah di Lingkungan Santo Paulus

Hasil wawancara dari keempat kategori informan PS (pastor paroki), PL (pengurus lingkungan), OT1–OT8 (orang tua anak putus sekolah), dan AP1–AP8 (anak yang mengalami putus sekolah) dibahas dan dianalisis berdasarkan empat dimensi pastoral Gereja: Kerygma (pewartaan), Koinonia (kebersamaan), Diakonia (pelayanan), dan Martyria (kesaksian/advokasi). Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, peneliti membandingkan sudut pandang pelaksana kegiatan pastoral (PS dan PL) dengan pengalaman penerima manfaat (OT1–OT8 dan AP1–AP8) pada setiap dimensi, sehingga perbedaan di antara keduanya dapat teridentifikasi dengan lebih jelas.

a. Kerygma (Pewartaan Iman dan Harapan)

Temuan pada dimensi kerygma menunjukkan adanya kesenjangan antara ukuran keberhasilan yang dipakai pelaksana pastoral dan ukuran keberhasilan yang dirasakan penerima manfaat sebuah pola yang dapat disebut sebagai kesenjangan proses-vs-hasil. PS menilai keberhasilan pewartaan dari intensitas kegiatan yang dilakukan: kunjungan pastoral rutin di prioritaskan ke rumah-rumah keluarga yang memiliki permasalahan pastoral dan pendidikan, dengan respons yang menurutnya baik, hanya saja butuh waktu untuk memahami itu semua.

Sebaliknya, respon yang diberikan oleh OT1–OT5 menyatakan mereka belum pernah mendengar pembahasan dalam kunjungan pastoral mengenai pentingnya pendidikan anak; inisiatif yang ada dirasakan berjalan sepihak dari lingkungan tanpa melibatkan keluarga secara aktif. Perbedaan repon PS dan OT ini dilihat dari konteks yang berbeda. Dari pihak PS menilai bahwa upaya pewartaan pastoral yang dilakukan saat ini sudah baik yaitu dengan mengunjungi keluarga yang memiliki permasalahan pendidikan, namun OT belum merasakan dampak dari kunjungan tersebut karena pesan/pewartaan yang disampaikan belum dapat dipahami secara baik oleh keluarga-keluarga yang memiliki permasalahan pendidikan anak. Selain itu kunjungan dilakukan tidak rutin.

b. Koinonia (Kebersamaan dan Penerimaan Komunitas)

Berbeda dengan dimensi kerygma yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang dipahami atau dilakukan oleh Pastor Paroki dengan apa yang dirasakan oleh umat, khususnya umat yang memiliki permasalahan anak putus sekolah. Respon dari OT 1 - 5 menunjukkan bahwa pengalaman kebersamaan dalam kehidupan komunitas Gereja benar-benar dirasakan oleh umat yang menjadi penerima manfaat pendampingan. Dengan kata lain, terdapat keselarasan antara persepsi pihak yang menjalankan kegiatan pastoral dan pengalaman keluarga yang mengalami secara langsung kegiatan tersebut. Gereja tidak selalu dinilai berdasarkan seberapa banyak pesan yang disampaikan atau bantuan material yang diberikan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana umat mengalami dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas yang hadir, menerima, dan menemani mereka.

Dalam perspektif pengurus lingkungan, sebagaimana disampaikan oleh PL, kegiatan-kegiatan komunitas seperti ibadat lingkungan, koor, kerja bakti, dan berbagai bentuk perjumpaan umat dipandang bukan sekadar sebagai aktivitas rutin Gereja, melainkan sebagai ruang perjumpaan yang memiliki makna sosial dan emosional bagi umat. Kegiatan tersebut menyediakan kesempatan bagi anggota lingkungan untuk bertemu, berkomunikasi, saling mengenal, serta membangun relasi yang lebih dekat. Bagi keluarga dan anak-anak yang masih terlibat dalam kehidupan lingkungan, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengalaman konkret bahwa mereka tetap menjadi bagian dari komunitas Gereja. Koinonia yang dilakukan di Lingkungan Santo Paulus tidak terutama tampil dalam bentuk program khusus untuk menangani putus sekolah, tetapi melalui kehadiran dan kebersamaan yang berlangsung dalam kehidupan komunitas sehari-hari.

Temuan dari sisi pengurus lingkungan tersebut memperoleh penguatan dari pengalaman Orang Tua 1 sampai Orang Tua 5 yang menggambarkan kegiatan lingkungan sebagai ruang yang membuat mereka dan keluarganya tidak merasa sendirian ketika menghadapi persoalan kehidupan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Kesamaan pengalaman tersebut penting karena menunjukkan bahwa kebersamaan yang menurut pengurus lingkungan menjadi bagian dari kehidupan komunitas memang diterima dan dirasakan oleh keluarga sebagai suatu bentuk dukungan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang relatif

konsisten antara apa yang dilakukan Gereja dan bagaimana tindakan tersebut dialami oleh umat. Gereja hadir bukan hanya sebagai institusi yang memberikan pelayanan, tetapi sebagai komunitas yang memungkinkan keluarga tetap memiliki ruang untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan merasakan perhatian dari lingkungan sekitarnya.

Secara metodologis, kesesuaian klaim antara dua kelompok informan yang memiliki posisi berbeda yakni pengurus lingkungan dan umat khususnya yang memiliki permasalahan anak putus sekolah memberikan bobot penting terhadap temuan penelitian. Apabila hanya pengurus lingkungan yang menyatakan bahwa kegiatan bersama telah memberikan rasa kebersamaan, temuan tersebut masih dapat dipahami sebagai persepsi dari pihak pelaksana. Namun, ketika pengalaman yang serupa juga muncul secara konsisten dari lima informan orang tua, temuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman koinonia tidak hanya merupakan konstruksi dari pihak Gereja, tetapi juga benar-benar dialami oleh keluarga. Kesesuaian ini memperlihatkan bahwa dimensi koinonia memiliki bentuk implementasi yang relatif berhasil pada tingkat relasional, meskipun keberhasilan tersebut belum tentu berarti bahwa seluruh kebutuhan pendampingan anak putus sekolah telah terpenuhi.

c. Diakonia (Pelayanan/Bantuan Nyata)

Temuan penelitian pada dimensi diakonia menunjukkan adanya kesenjangan yang bukan semata-mata berkaitan dengan jumlah atau besar kecilnya bantuan, melainkan terutama berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk bantuan yang diberikan Gereja dan karakter kebutuhan yang dihadapi keluarga anak putus sekolah.

Berdasarkan keterangan PL, bentuk pelayanan nyata yang telah dilakukan oleh Gereja di Lingkungan Santo Paulus antara lain pemberian bantuan berupa sembako melalui kerja sama dengan lingkungan. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian konkret Gereja terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kehadiran bantuan ini menunjukkan bahwa Gereja tidak hanya menyampaikan kepedulian secara verbal, tetapi telah menerjemahkan kepedulian pastoral ke dalam tindakan nyata untuk meringankan beban kehidupan keluarga.

Temuan tersebut memperoleh penguatan dari keterangan OT-1 sampai OT-8. Para orang tua secara konsisten mengakui bahwa bantuan sembako yang mereka terima memberikan manfaat nyata bagi kondisi ekonomi keluarga. Bantuan tersebut dapat mengurangi sebagian pengeluaran rumah tangga dan membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar pada saat bantuan diberikan. Bantuan ini memiliki manfaat langsung karena menjawab kebutuhan ekonomi yang dihadapi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini jika dikaitkan dengan persoalan putus sekolah, terlihat adanya keterbatasan pada jenis bantuan yang tersedia. Sembako pada dasarnya merupakan bantuan yang bersifat karitatif dan jangka pendek. Bantuan tersebut membantu keluarga menghadapi tekanan ekonomi pada waktu tertentu, tetapi manfaatnya akan berakhir ketika bantuan tersebut telah digunakan. Dengan demikian, bantuan sembako memiliki fungsi penting sebagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi belum secara langsung menyentuh kebutuhan yang menentukan apakah seorang anak dapat tetap bersekolah atau kembali mengakses pendidikan.

Sebaliknya, kebutuhan yang dikemukakan oleh OT-3 sampai OT-8 menunjukkan karakter yang berbeda. Para orang tua tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga menyampaikan kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan anak, terutama bantuan biaya sekolah dan dukungan transportasi bagi anak usia sekolah. Kedua kebutuhan tersebut memiliki karakter yang lebih struktural dan berkelanjutan, karena berkaitan dengan hambatan yang harus dihadapi anak dan keluarga secara terus-menerus selama proses pendidikan berlangsung. Biaya pendidikan dan transportasi bukan kebutuhan yang muncul hanya satu kali, melainkan dapat menjadi beban berulang yang secara langsung memengaruhi kemampuan keluarga mempertahankan anak di sekolah.

Di sinilah letak kesenjangan utama pada dimensi diakonia. Gereja telah memberikan bantuan, tetapi jenis bantuan yang tersedia belum sepenuhnya diarahkan pada jenis kebutuhan yang paling berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan anak. Dengan kata lain, persoalannya bukan bahwa Gereja tidak melakukan diakonia, melainkan bahwa orientasi diakonia yang berjalan masih lebih dominan pada pengurangan beban ekonomi sesaat daripada penguatan kapasitas keluarga untuk mempertahankan keberlangsungan pendidikan anak. Bantuan sembako tetap memiliki tempat dan nilai pastoral karena keluarga memang membutuhkan bantuan tersebut, tetapi apabila tujuan akhirnya adalah mengurangi persoalan putus sekolah, diperlukan bentuk pelayanan yang bergerak lebih dekat kepada kebutuhan pendidikan anak.

Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui dua karakter pelayanan. Pertama, diakonia karitatif, yaitu pelayanan yang diberikan untuk meringankan penderitaan atau memenuhi kebutuhan mendesak yang sedang dialami keluarga. Dalam konteks penelitian ini, pemberian sembako merupakan bentuk nyata dari pelayanan tersebut. Kedua, diakonia yang berorientasi pada keberlanjutan, yaitu pelayanan yang diarahkan untuk membantu keluarga mengatasi hambatan yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Bantuan biaya sekolah dan transportasi, sebagaimana kebutuhan yang disampaikan oleh para orang tua, lebih dekat dengan bentuk pelayanan kedua karena secara langsung berkaitan dengan kemampuan anak untuk mempertahankan akses terhadap pendidikan.

Tugas gereja pada diakonia memiliki kesenjangan karena bantuan yang diberikan bersifat karitatif bukan yang mendukung keberlanjutan pendidikan. Hal ini tidak berarti bahwa bantuan sembako harus dihentikan. Justru bantuan tersebut tetap penting sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan dasar keluarga. Akan tetapi, bantuan karitatif perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi yang lebih luas. Jika bantuan sembako menjadi satu-satunya bentuk diakonia, maka Gereja akan terus membantu keluarga menghadapi dampak persoalan ekonomi tanpa secara langsung menyentuh salah satu konsekuensi paling penting dari persoalan tersebut, yaitu terhambatnya keberlangsungan pendidikan anak.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa diakonia Gereja di Lingkungan Santo Paulus telah hadir dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga, tetapi efektivitasnya dalam menjawab persoalan putus sekolah masih terbatas karena bentuk

pelayanan yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan karakter kebutuhan pendidikan yang berkelanjutan. Kesenjangan tersebut bukan menunjukkan kegagalan Gereja dalam menjalankan diakonia, melainkan menunjukkan adanya ruang pengembangan pelayanan. Tantangannya adalah bagaimana Gereja mempertahankan kepedulian karitatif yang sudah berjalan sekaligus mengembangkannya menjadi pelayanan yang lebih strategis, terarah, dan berkelanjutan untuk membantu anak mempertahankan atau memperoleh kembali akses pendidikan.

d. Martyria (Kesaksian dan Advokasi)

Menurut PS, hingga saat ini belum ada tokoh Gereja maupun tokoh lingkungan yang secara khusus melakukan advokasi terhadap hak pendidikan anak kepada pihak pemerintah, sekolah, atau dinas terkait. Sebagai suatu bentuk penyampaian melalui kesaksian, PS lebih banyak menonjolkan narasi-narasi teladan iman, seperti cerita Santa Maria dan Santo Yusuf, untuk mendorong keluarga agar tetap peduli terhadap pendidikan anak-anak.

Pandangan PS sejalan dengan pengakuan OT-1 hingga OT-6 yang mengungkapkan bahwa mereka belum pernah menyaksikan figur dari Gereja atau komunitas berjuang secara terbuka untuk hak anak kembali ke sekolah; selama ini, bentuk perhatian yang diberikan kepada keluarga baru berupa bantuan sembako. Dengan demikian, dimensi martyria, terutama dalam aspek advokasi struktural, masih menjadi bagian yang terlemah jika dibandingkan dengan tiga peran pastoral lainnya.

Hasil wawancara dengan AP-1 sampai AP-8 memperlihatkan adanya keinginan yang masih kuat dari anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun mereka

telah mengalami putus sekolah, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan aspirasi terhadap pendidikan. Sebaliknya, para informan masih menyatakan kesediaan untuk kembali bersekolah apabila terdapat bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Temuan ini penting karena memperlihatkan adanya perbedaan antara kondisi aktual anak yang tidak bersekolah dan aspirasi pendidikan yang masih mereka miliki. Dengan demikian, persoalan putus sekolah pada anak-anak tersebut tidak hanya perlu dilihat dari sisi kemauan atau motivasi anak, tetapi juga dari sisi dukungan eksternal yang memungkinkan keinginan tersebut diwujudkan. Keterbatasan biaya, kebutuhan transportasi, dan kebutuhan pendidikan lainnya dapat menjadi hambatan yang membuat keinginan untuk bersekolah belum dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, keinginan anak untuk kembali bersekolah menjadi modal penting bagi pengembangan strategi pastoral Gereja, karena menunjukkan bahwa masih terdapat harapan dan kesiapan dari anak untuk memperoleh kembali akses pendidikan apabila dukungan yang memadai dapat tersedia.

Secara umum, pandangan yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa keempat dimensi peran pastoral menunjukkan distribusi kekuatan yang tidak seimbang. Dimensi koinonia terkenal paling dominan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh keluarga yang terdampak, diikuti oleh diakonia yang telah mulai beroperasi meskipun masih terbatas pada bantuan pangan. Dimensi kerygma telah dijalankan, tetapi belum mencapai seluruh keluarga yang menjadi target, sedangkan dimensi martyria, terutama dalam hal advokasi struktural kepada pemerintah atau

lembaga pendidikan, hingga saat ini masih belum tersentuh sama sekali. Ringkasan perbandingan temuan dari keempat narasumber pada masing-masing dimensi dapat dilihat di Tabel 4.2 di bawah ini.

4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Putus Sekolah Anak Asli Papua di Lingkungan Santo Paulus

Berdasarkan hasil penelitian yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak Papua di Lingkungan Santo Paulus mengalami putus sekolah. Faktor-faktor tersebut dideskripsikan berikut ini :

a. Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor ekonomi adalah alasan utama yang mempengaruhi anak-anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus untuk menghentikan pendidikan mereka. Temuan wawancara bersama OT 2 menunjukkan bahwa keterbatasan finansial keluarga tidak hanya mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kelangsungan proses belajar anak secara menyeluruh. AP1 sampai AP5 menjawab alasan berhenti bersekolah adalah karena tidak memiliki buku tulis dan keluarganya tidak mampu menyediakan biaya untuk membelinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun kebutuhan pendidikan yang tampak sederhana, seperti buku tulis, dapat menjadi hambatan yang sangat berarti bagi keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas.

Temuan tersebut didukung oleh informasi dari OT-1, OT-4, OT-5, dan OT-7 yang menyatakan bahwa penghasilan keluarga bergantung pada pekerjaan sebagai buruh kasar dengan pendapatan yang tidak stabil. Ketidakpastian mengenai pendapatan mendorong keluarga untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga, ketimbang pendidikan anak. Meskipun uang sekolah dalam bentuk SPP tidak menjadi masalah besar, ada berbagai pengeluaran tambahan, seperti untuk buku, alat tulis, seragam, tas sekolah, serta biaya transportasi ke sekolah, yang tetap menjadi beban finansial yang sukar untuk dipenuhi. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi dalam pendidikan tidak hanya berhubungan dengan biaya pendidikan formal, tetapi juga meliputi berbagai kebutuhan tambahan yang berpengaruh terhadap keikutsertaan anak dalam proses pendidikan.

Keterbatasan dalam aspek finansial tersebut juga memengaruhi peran anak di dalam keluarga. Anak tidak hanya sekadar menjadi pelajar, tetapi juga mulai mengambil peran dalam aspek ekonomi dengan membantu orang tua mencari pemasukan. AP-1, AP-3, AP-4, AP-6, dan AP-8 menyatakan bahwa mereka beberapa kali terlibat dalam pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena merasa prihatin terhadap keadaan finansial orang tuanya. Keadaan ini menunjukkan bahwa beban ekonomi telah membuat anak mengutamakan kepentingan keluarga di atas pendidikan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dipakai untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga peluang

untuk melanjutkan pendidikan semakin menyempit dan pada akhirnya berujung pada pilihan untuk keluar dari sekolah.

b. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu elemen yang berperan dalam meningkatkan angka putus sekolah di kalangan anak asli Papua di lingkungan Santo Paulus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya yang masih kuat berpengaruh terhadap anggapan keluarga mengenai pentingnya pendidikan, khususnya untuk anak perempuan. Dalam beberapa keluarga, pendidikan belum dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, melainkan masih dipengaruhi oleh peran-peran tradisional yang diwarisi dari generasi ke generasi.

Pernyataan ini diungkapkan oleh OT-1-OT-8 yang menunjukkan bahwa anak perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur setelah menikah, sehingga pendidikan formal dianggap kurang penting untuk dilanjutkan hingga tingkat yang lebih tinggi. Pandangan ini mencerminkan adanya konstruk budaya yang menempatkan perempuan lebih pada peran rumah tangga daripada sebagai individu yang berhak untuk memaksimalkan potensi mereka melalui pendidikan. Akibatnya, saat keluarga menghadapi keterbatasan sumber daya, pendidikan untuk anak perempuan sering kali menjadi pilihan pertama yang dikorbankan.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa berbagai tradisi lokal yang ada dalam masyarakat berdampak pada kelangsungan pendidikan anak-anak. Partisipasi anak dalam berbagai acara adat, baik sebagai bagian dari keterlibatan keluarga

maupun tanggung jawab sosial di komunitas, seringkali mengambil waktu dan perhatian yang seharusnya dapat dipergunakan untuk belajar di sekolah. Dalam beberapa situasi, anak-anak lebih cenderung meninggalkan sekolah untuk memenuhi tuntutan adat yang dianggap sebagai kewajiban penting.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menikah di usia muda dalam komunitas tersebut. Pernikahan yang terjadi di usia dini memaksa sebagian anak untuk menghentikan pendidikan mereka karena harus menjalani peran baru sebagai pasangan serta menghadapi tanggung jawab keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa elemen budaya tidak hanya membentuk cara.

Pandangan komunitas tentang pendidikan tidak hanya berdampak pada keputusan hidup anak, namun juga pada akhirnya mempersempit peluang mereka untuk menuntaskan pendidikan formal. Dengan demikian, budaya memainkan peran yang kompleks, baik melalui norma-norma, kebiasaan, maupun kegiatan sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kemungkinan anak mengalami putus sekolah.

c. Faktor Sosial dan Lingkungan Keluarga

Faktor sosial dan kondisi sekitar juga menjadi salah satu alasan yang berkontribusi terhadap terjadinya putus sekolah di kalangan anak-anak asli Papua di Lingkungan Santo Paulus. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keadaan lingkungan tempat tinggal memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak. Lingkungan sosial tidak hanya berperan sebagai arena bagi anak untuk tumbuh dan berinteraksi, tetapi juga membantu membentuk

pola pikir, tingkah laku, serta semangat mereka terkait pendidikan. Jika lingkungan kurang mendukung proses pembelajaran, maka peluang anak untuk meninggalkan sekolah akan meningkat.

Menurut hasil wawancara, OT-1-OT-6 mengungkapkan bahwa interaksi di kawasan tempat tinggal cukup keras dan memberikan pengaruh negatif pada perkembangan anak. Situasi ini menyebabkan anak lebih rentan terpengaruh oleh teman sebaya yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan. Dalam keadaan seperti itu, sekolah tidak lagi dianggap sebagai suatu kebutuhan utama, melainkan menjadi pilihan yang mudah ditinggalkan ketika anak terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik. Ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap dan keputusan anak untuk melanjutkan pendidikan atau justru menghentikannya.

Kendala akses ke sekolah menjadi tantangan yang dialami anak-anak. Para orang tua, OT-3 - OT-7, menjelaskan bahwa sekolah terletak cukup jauh dari rumah, mengharuskan anak-anak menempuh perjalanan panjang setiap hari dengan berjalan kaki, karena kami sebagai orang tua tidak mampu menyediakan kendaraan dan biaya untuk transportasi umum. Jarak yang jauh tidak hanya memperpanjang waktu dan tenaga yang diperlukan untuk pergi ke sekolah, tetapi juga meningkatkan beban biaya transportasi bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Penumpukan berbagai rintangan ini membuat motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan semakin berkurang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya putus sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perhatian orang tua kepada anak-anak belum maksimal. Menurut pengakuan OT-1 - OT-7, para orang tua sudah meninggalkan rumah sejak pagi untuk mencari rezeki. Situasi ini mengakibatkan kontrol terhadap perilaku anak tidak berjalan dengan baik. Kurangnya pengawasan dari orang tua memberikan ruang bagi anak untuk menghabiskan lebih banyak waktu di luar aktivitas sekolah. Oleh karena itu, faktor sosial dan lingkungan dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan pengaruh teman sebaya, tetapi juga meliputi akses ke sekolah serta lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang berkontribusi pada meningkatnya risiko anak putus sekolah.

d. Faktor Internal Anak

Faktor internal siswa terkait dengan keadaan psikologis, keinginan, dan cara mengambil keputusan yang dialami oleh mereka saat berhadapan dengan beragam tekanan dalam hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan seorang anak untuk keluar dari sekolah bukanlah keputusan yang muncul dari keinginan individu, melainkan sebagai reaksi terhadap berbagai batasan dan tekanan yang datang dari lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar.

Menurut hasil wawancara, AP-1, AP-2, AP-4, dan AP-5 mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tidak setuju untuk berhenti sekolah. Meskipun masih memiliki ambisi untuk belajar lebih lanjut, keadaan finansial keluarga yang tidak mendukung serta pengaruh teman sebaya di lingkungan tempat tinggal mereka membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menghentikan pendidikan mereka. Temuan ini

menunjukkan bahwa faktor internal anak lebih merupakan penyesuaian terhadap kenyataan hidup yang dihadapi ketimbang mencerminkan rendahnya motivasi untuk belajar.

Temuan penelitian ini juga tidak menemukan bukti bahwa keputusan untuk keluar dari sekolah dipengaruhi oleh kesulitan dalam belajar, prestasi akademis yang rendah, atau pengalaman negatif di sekolah, seperti perundungan atau tindakan diskriminasi. Sebaliknya, AP-3, AP-4, dan AP-8 masih menunjukkan keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan jika di masa depan ada bantuan atau dukungan untuk anak-anak yang berada dalam kondisi serupa. Harapan ini menggambarkan bahwa keinginan untuk mendapatkan pendidikan masih ada, tetapi belum dapat terwujud karena berbagai kendala yang berada di luar kontrol anak. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa faktor internal anak tidak bisa dipisahkan dari berbagai faktor penyebab lainnya. Tekanan ekonomi dalam keluarga mendorong anak untuk berkontribusi dalam usaha mencari penghidupan sehingga mengurangi peluang untuk melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, nilai-nilai budaya yang masih ada di masyarakat serta dampak lingkungan sosial yang kurang mendukung semakin memperkuat keputusan anak untuk keluar dari sekolah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, terdapat interaksi antara faktor ekonomi, budaya, sosial, dan faktor internal yang saling berkaitan, membentuk serangkaian penyebab yang membuat anak-anak Papua di Lingkungan Santo Paulus mengalami putus sekolah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah putus sekolah adalah persoalan yang bersifat multidimensional yang memerlukan penanganan secara

holistik, melibatkan keluarga, masyarakat, sekolah, Gereja, dan pemerintah agar anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

4.2.3 Strategi Pastoral yang Dapat Dikembangkan Gereja untuk Menurunkan Angka Anak Putus Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan PS, strategi awal yang harus dikembangkan adalah memperkuat dukungan pastoral untuk keluarga melalui pengembangan iman dan bantuan psikologis. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk membantu orang tua menyadari pentingnya pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak, sekaligus meningkatkan kesiapan mental keluarga menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Bentuk dukungan tersebut bisa direalisasikan melalui kegiatan katekese keluarga, kunjungan pastoral, dan penguatan iman yang melibatkan pengurus lingkungan bersama Orang Muda Katolik (OMK) sebagai partner pelayanan Gereja.

Penguatan elemen spiritual adalah salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam program lingkungan, di samping pentingnya menciptakan rasa kepedulian sosial dalam komunitas. Jawaban PS menunjukkan bahwa keluarga yang tengah menghadapi tantangan ekonomi tetap membutuhkan bantuan konkret dari lingkungan sekitarnya, baik itu dalam bentuk dukungan finansial maupun perhatian sosial yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Gereja perlu merancang pendekatan yang lebih personal melalui komunikasi langsung dengan keluarga, sehingga kebutuhan mereka bisa dipahami lebih baik dan program bantuan bisa disalurkan dengan tepat, sesuai kebutuhan. Pengurus lingkungan dan OMK diharapkan dapat menjadi

pelaksana utama dalam menciptakan solidaritas sosial semacam ini, agar terjalin sebuah komunitas yang saling peduli dan mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa masalah ekonomi tetap menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak terpaksa keluar dari sekolah. Oleh karena itu, strategi pastoral harus direalisasikan melalui pelayanan diakonia yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga. Bantuan finansial kepada keluarga yang berisiko serta penyediaan program bimbingan bagi anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam belajar merupakan bentuk pelayanan yang dapat mendukung mereka untuk tetap bersekolah. Implementasi program ini memerlukan kolaborasi yang solid antara Paroki, Keuskupan, serta berbagai pihak yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak Papua asli.

Gereja memiliki fungsi yang krusial sebagai pendukung bagi anak-anak yang menghadapi masalah putus sekolah. Dari hasil wawancara yang dilakukan, perhatian terhadap aspek-aspek dasar, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan akses pendidikan, masih harus terus diperjuangkan, terutama untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan kelompok yang terabaikan. Oleh karena itu, Gereja diharapkan tidak hanya fokus pada pelayanan internal semata, tetapi juga berperan sebagai penghubung yang menyatukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, lembaga sosial, serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan bantuan. Peran advokasi ini seharusnya dapat dipimpin oleh Pastor Paroki bersama dengan Pengurus

Lingkungan melalui penguatan jaringan kolaborasi antar sektor untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk pendidikan.

Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan pastoral yang berhasil dalam mengurangi jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah harus dilakukan secara komprehensif melalui penyampaian iman, pengembangan komunitas, pelayanan kasih, serta dukungan kepada kelompok yang rentan melalui advokasi. Keempat aspek ini saling mendukung untuk menciptakan pelayanan Gereja yang menyeluruh, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani jemaat, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang dihadapi anak-anak Papua asli di Lingkungan Santo Paulus.

Tabel 4.2 Usulan Strategi Pastoral Gereja

Dimensi	Kondisi/kebutuhan saat ini	Usulan strategi pastoral	Pihak pelaksana
Spiritual (Kerygma)	Keluarga membutuhkan pendampingan mental/psikologis dan pembinaan iman.	Katekese dan pendampingan rutin bagi orang tua.	Pengurus Lingkungan dan OMK
Sosial (Koinonia)	Dukungan finansial dan sosial dari lingkungan belum optimal.	Pendekatan personal dan dialog dengan warga agar program berjalan.	Pengurus Lingkungan dan OMK

Ekonomi/Pendidikan (Diakonia)	Kondisi ekonomi keluarga masih menjadi kendala utama.	Program bimbingan belajar untuk peningkatan prestasi anak.	Keuskupan bekerja sama dengan Paroki
Advokasi (Martyria)	Kebutuhan dasar (pangan, sandang, tempat tinggal) anak putus sekolah belum tertangani; anak terpinggirkan belum diperhatikan.	Advokasi dan kerja sama lintas pihak untuk anak-anak asli Papua yang rentan.	Pastor Paroki dan Pengurus Lingkungan

Sumber: Sintesis hasil penelitian, 2026

Temuan dari wawancara sebelumnya didukung oleh hasil pengamatan lapangan yang dilakukan pada 25 Juni 2026. Peneliti melihat adanya anak-anak sekolah yang tidak bersekolah pada hari-hari aktif dan beberapa di antara mereka terlihat membantu membawa hasil kebun. Keadaan rumah tangga yang sederhana dan tanda-tanda kemiskinan struktural juga mengkonfirmasi adanya tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga. Di sisi lain, pandangan masyarakat setempat yang cenderung membiarkan anak tidak bersekolah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap pendidikan anak masih perlu ditingkatkan, sementara sosok pemimpin adat

masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan warga yang dapat dilakukan dengan model pendampingan berlandaskan kearifan lokal.

Data pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan pastoral yang dilaksanakan meliputi kunjungan bulanan rutin, kelompok Sekolah Minggu, ibadah mingguan, dan juga kehadiran katekis yang aktif di tengah umat memperkuat gambaran peran koinonia dan diakonia yang telah diuraikan. Namun demikian, belum tersedianya ruang atau fasilitas khusus untuk kegiatan pendampingan anak, serta minimnya media komunikasi paroki yang terdokumentasi, mengindikasikan keterbatasan pada sisi sarana pendukung program.

Studi dokumen juga memberikan wawasan mengenai kebijakan. Program Kerja Pastoral Paroki Bambu Pemali serta dokumen dari MUSPAS Keuskupan Agung Merauke menunjukkan bahwa kebijakan pastoral yang ditetapkan di tingkat keuskupan sebenarnya mendukung pendidikan dan pemberdayaan anak-anak asli Papua. Namun, pada tataran operasional di lingkungan, ditemukan adanya masalah administratif seperti data pendidikan anak yang belum diperbaharui, ketiadaan modul pendampingan khusus untuk anak yang putus sekolah, serta belum adanya kesepakatan formal antara Gereja dan institusi pendidikan atau pemerintah lokal. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan strategi pastoral terletak pada tingkat implementasi dan kelengkapan data di lingkungan/stasi, bukan pada arah kebijakan yang telah ditetapkan.

4.3 Pembahasan

Pembahasan penelitian ini diarahkan untuk memberikan makna terhadap temuan lapangan mengenai peran Gereja sebagai agen pastoral dalam pendampingan anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke. Pembahasan tidak hanya mendeskripsikan apa yang dilakukan Gereja dan apa yang dialami oleh anak serta keluarga, tetapi juga menafsirkan temuan tersebut berdasarkan landasan teori mengenai misi sosial Gereja, pendampingan anak, faktor penyebab putus sekolah, serta model pendampingan pastoral.

Pembahasan disusun berdasarkan tiga fokus utama penelitian, yaitu peran Gereja sebagai agen pastoral, faktor-faktor penyebab anak mengalami putus sekolah, dan strategi pastoral yang dapat dikembangkan Gereja. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi pengalaman para informan, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara praktik pastoral Gereja dan realitas sosial pendidikan anak asli Papua di tingkat komunitas basis.

4.3.1 Peran Gereja sebagai Agen Pastoral dalam Pendampingan Anak Asli Papua yang Mengalami Putus Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lingkungan Santo Paulus, Gereja telah menjalankan peran pastoral dalam mendampingi keluarga dan anak yang mengalami putus sekolah, tetapi pelaksanaan peran tersebut belum berlangsung secara seimbang

pada seluruh dimensi pastoral. Kekuatan paling nyata tampak pada koinonia, kemudian diakonia, sementara kerygma belum sepenuhnya menjangkau keluarga sasaran dan martyria, khususnya dalam bentuk advokasi hak pendidikan anak, masih sangat terbatas.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Gereja sebagai agen pastoral telah dirasakan oleh umat, tetapi bentuk kehadirannya masih lebih kuat pada aspek relasional dan karitatif daripada pada aspek edukatif dan struktural. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa kegiatan pastoral rutin seperti kunjungan pastoral, ibadah lingkungan, koor, kerja bakti, dan pemberian bantuan sembako memang telah berlangsung, tetapi belum terdapat program khusus yang terstruktur untuk mendampingi anak putus sekolah.

a. Koinonia sebagai kekuatan relasional Gereja

Dimensi koinonia menunjukkan temuan yang paling positif. Keluarga dan anak yang mengalami persoalan pendidikan tetap diterima dalam kehidupan komunitas melalui ibadah, koor, kerja bakti, dan kegiatan lingkungan lainnya. Pengurus lingkungan melihat kegiatan tersebut sebagai ruang kebersamaan yang memberikan makna emosional bagi umat, sementara orang tua merasakan bahwa keterlibatan dalam komunitas membuat mereka tidak menghadapi persoalan seorang diri.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa koinonia tidak sekadar berarti adanya kegiatan bersama, tetapi menunjukkan kemampuan Gereja menciptakan ruang sosial tempat keluarga yang mengalami kesulitan tetap merasa diterima sebagai bagian dari komunitas. Hal ini penting dalam konteks anak putus sekolah karena persoalan

pendidikan sering kali beriringan dengan tekanan ekonomi, rasa malu, keterasingan sosial, dan menurunnya harapan terhadap masa depan. Kehadiran komunitas dapat menjadi sumber dukungan sosial yang mencegah keluarga semakin terisolasi.

Temuan ini sejalan dengan pemahaman mengenai Gereja sebagai komunitas yang dipanggil untuk menghadirkan solidaritas dan kepedulian kepada mereka yang mengalami kerentanan. Dalam kajian teori, Simon menempatkan Gereja sebagai komunitas etis yang ditandai oleh empati dan keberpihakan kepada mereka yang tertindas. Dengan demikian, pengalaman keluarga di Lingkungan Santo Paulus menunjukkan bahwa dimensi koinonia telah diterjemahkan secara konkret melalui relasi sosial yang dekat dan partisipasi umat dalam kehidupan komunitas.

Kekuatan koinonia juga dapat dipahami melalui pendekatan community-based dalam pendampingan anak. Pendampingan tidak berlangsung secara efektif apabila anak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan individual, tetapi membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan anak. (Arifin & Hermino, 2018) menegaskan pentingnya kolaborasi Gereja dan keluarga dalam mendukung pendidikan anak di Papua. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa modal sosial tersebut sebenarnya telah tersedia di Lingkungan Santo Paulus. Gereja memiliki kedekatan dengan keluarga, pengurus lingkungan berinteraksi langsung dengan umat, dan kegiatan komunitas telah menjadi ruang pertemuan yang relatif diterima oleh keluarga.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, koinonia merupakan modal pastoral yang penting bagi pengembangan pendampingan anak putus sekolah. Gereja tidak perlu

membangun seluruh mekanisme pendampingan dari awal karena telah memiliki relasi komunitas yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program yang lebih terarah. Tantangannya adalah bagaimana kekuatan relasional tersebut dikembangkan dari sekadar kebersamaan menjadi kebersamaan yang menghasilkan tindakan pendampingan pendidikan secara nyata.

b. Kerygma: terdapat kesenjangan antara pewartaan dan pengalaman keluarga

Berbeda dengan koinonia, dimensi kerygma memperlihatkan adanya kesenjangan antara apa yang dipahami oleh pelaksana pastoral dan apa yang dialami oleh keluarga yang sedang memiliki masalah anak putus sekolah. Pihak pastoral memandang kunjungan ke rumah dan komunikasi dengan keluarga sebagai bentuk pewartaan dan pendampingan. Namun, orang tua yang menjadi penerima manfaat belum merasakan adanya pewartaan yang secara khusus dan konsisten membicarakan pentingnya pendidikan anak.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu aktivitas pastoral belum otomatis menunjukkan keberhasilan pewartaan. Kerygma bukan hanya persoalan apakah Gereja telah menyampaikan pesan, tetapi juga apakah pesan tersebut diterima, dipahami, dan memiliki makna bagi kehidupan penerima. Dalam konteks penelitian ini, terdapat perbedaan antara gereja sebagai pelaksana pastoral yang menekankan apa yang telah dilakukan dan pengalaman keluarga yang lebih menekankan apa yang mereka terima dan rasakan.

Perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan *client-centered* dalam pendampingan. (Waruwu & Marbun, 2025), sebagaimana digunakan dalam kajian

teori penelitian ini, menunjukkan pentingnya pendekatan yang berpusat pada pengalaman dan kebutuhan anak dalam proses pendampingan pastoral. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pendampingan tidak semata-mata diukur dari frekuensi intervensi, tetapi dari perubahan atau manfaat yang dialami oleh pihak yang didampingi.

Temuan ini menunjukkan perlunya perubahan dari pewartaan yang bersifat satu arah menuju pewartaan yang dialogis. Keluarga perlu diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kesulitan, harapan, dan pandangan mereka mengenai pendidikan anak. Demikian pula anak perlu didengar secara langsung karena penelitian menemukan bahwa anak-anak yang telah putus sekolah sebenarnya masih memiliki keinginan untuk kembali bersekolah apabila tersedia dukungan yang memadai.

Dimensi kerygma dalam konteks pendampingan anak putus sekolah di lingkungan Santo Paulus tidak cukup diwujudkan dalam nasihat tentang pentingnya pendidikan. Kerygma perlu hadir sebagai pewartaan yang membangkitkan harapan, membentuk kesadaran, dan mendorong keluarga mengambil keputusan yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

c. Diakonia: Gereja telah hadir, tetapi pelayanan masih bersifat karitatif

Pada dimensi diakonia, Gereja telah memberikan bantuan konkret kepada keluarga, terutama melalui bantuan sembako. Para orang tua mengakui bahwa bantuan tersebut bermanfaat bagi kondisi ekonomi keluarga ketika diterima. Temuan

ini menunjukkan bahwa Gereja telah menerjemahkan kepedulian pastoral ke dalam tindakan nyata.

Permasalahan yang ditemukan bukan mengenai ada atau tidak adanya bantuan, melainkan mengenai kesesuaian antara bentuk bantuan dengan kebutuhan pendidikan anak. Bantuan sembako membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek, sedangkan kebutuhan yang disampaikan keluarga berupa biaya sekolah, buku, perlengkapan pendidikan, dan transportasi memiliki sifat yang lebih berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kemampuan anak untuk tetap berada dalam sistem pendidikan.

Menurut (Noordegraaf, 2011), diakonia merupakan perwujudan konkret iman melalui pelayanan kepada sesama. Berdasarkan pemahaman tersebut, bantuan sembako yang telah dilakukan Gereja merupakan bentuk diakonia yang nyata dan penting. Akan tetapi, apabila diakonia diarahkan untuk menjawab persoalan putus sekolah, pelayanan tersebut perlu berkembang dari diakonia karitatif menuju diakonia transformatif.

Diakonia karitatif berfungsi mengurangi penderitaan yang dialami keluarga pada saat tertentu. Sebaliknya, diakonia transformatif berusaha menyentuh kondisi yang membuat penderitaan tersebut terus berulang. Dalam penelitian ini, persoalan pendidikan tidak cukup dijawab dengan bantuan konsumtif, karena hambatan pendidikan anak berkaitan dengan biaya pendidikan, transportasi, kebutuhan perlengkapan sekolah, keterbatasan pendapatan keluarga, dan tuntutan anak untuk membantu ekonomi rumah tangga.

Temuan ini sejalan dengan model misi integral (Anouw & Sigap, 2023), yang menunjukkan bahwa pelayanan Gereja kepada anak rentan di Papua perlu mengintegrasikan pembinaan spiritual, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan advokasi. Artinya, pelayanan sosial tidak seharusnya berdiri sendiri, tetapi harus diarahkan pada pemulihan kehidupan anak secara utuh. Disinilah kekuatan diakonia Gereja di Lingkungan Santo Paulus terletak pada kemauan untuk membantu, sedangkan tantangannya terletak pada bagaimana bantuan tersebut dikembangkan menjadi mekanisme pendampingan pendidikan yang berkelanjutan.

d. Martyria: dari kesaksian iman menuju advokasi hak pendidikan

Dimensi martyria merupakan bagian yang paling lemah dalam temuan penelitian. Belum ditemukan adanya tindakan Gereja yang secara khusus memperjuangkan hak pendidikan anak melalui komunikasi atau advokasi kepada sekolah, pemerintah, atau dinas terkait. Kesaksian iman masih lebih banyak diwujudkan melalui penyampaian kisah teladan iman, sementara tindakan advokasi struktural belum dilakukan.

Temuan ini penting karena menunjukkan adanya jarak antara mandat normatif Gereja dan praktik pastoral di tingkat komunitas. Kajian teori telah menunjukkan bahwa Gereja memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan dan martabat manusia melalui *Gravissimum Educationis*, *Gaudium et Spes*, *Evangelii Gaudium*, dan ajaran sosial Gereja. Gereja tidak hanya dipanggil untuk melayani mereka yang mengalami kesulitan, tetapi juga dipanggil untuk memperjuangkan keadilan dan martabat manusia.

Pendapat (Joseph et al., 2025) menempatkan Gereja sebagai agen keadilan pendidikan berdasarkan martabat manusia. Pandangan ini diperkuat oleh (Kristi Kristi et al., 2025), yang menekankan pentingnya peran profetis Gereja dalam menghadapi ketidakadilan pendidikan. Dengan perspektif tersebut, martyria tidak cukup dimaknai sebagai kesaksian verbal mengenai iman, tetapi juga sebagai keberanian Gereja menyatakan keberpihakan terhadap anak yang hak pendidikannya belum terpenuhi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Keuskupan Agung Merauke secara normatif telah memiliki perhatian terhadap pendidikan anak asli Papua, tetapi perhatian tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan advokasi pada tingkat Lingkungan Santo Paulus. Karena itu, kekosongan martyria bukan sekadar kekurangan program, tetapi menunjukkan perlunya pergeseran paradigma pastoral, dari Gereja yang hanya memberikan bantuan kepada Gereja yang juga berani menjadi penghubung dan pembela hak anak. Gereja dapat mengidentifikasi anak yang putus sekolah, mendokumentasikan kebutuhan mereka, membangun komunikasi dengan sekolah, berkoordinasi dengan pemerintah, dan menghubungkan keluarga dengan berbagai sumber dukungan pendidikan.

Temuan penelitian dari keempat dimensi tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan, tampak bahwa Gereja di Lingkungan Santo Paulus telah memiliki modal sosial dan spiritual yang kuat, tetapi belum seluruhnya diterjemahkan menjadi pendampingan pendidikan yang sistematis. Koinonia telah menciptakan relasi dan rasa diterima; diakonia telah memberikan bantuan nyata; kerygma telah dilakukan

tetapi belum sepenuhnya diterima secara merata; sedangkan martyria belum berkembang menjadi advokasi pendidikan.

Temuan ini sejalan dengan gagasan (Bevans et al., 2004) bahwa misi Gereja harus dipahami secara kontekstual. Artinya, tugas pastoral harus mampu membaca realitas konkret masyarakat dan menerjemahkan nilai-nilai Injil ke dalam kebutuhan nyata komunitas. Dalam konteks lingkungan Santo Paulus, realitas tersebut adalah anak-anak yang masih ingin bersekolah tetapi terhambat oleh kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Peran Gereja sebagai agen pastoral belum dapat dikatakan gagal, tetapi masih berada dalam tahap pelayanan yang dominan relasional dan karitatif. Tantangan utamanya adalah mengintegrasikan koinonia, kerygma, diakonia, dan martyria sehingga kehadiran Gereja tidak hanya membuat keluarga merasa diterima, tetapi juga membantu anak memperoleh kembali hak pendidikannya.

4.3.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Asli Papua Mengalami Putus Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus merupakan fenomena multidimensional. Tidak ditemukan satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan keputusan anak meninggalkan pendidikan. Faktor ekonomi, budaya, sosial-lingkungan, dan kondisi anak saling berinteraksi dan membentuk situasi yang membuat anak sulit mempertahankan keberlanjutan pendidikan.

a. Keterbatasan ekonomi sebagai faktor struktural utama

Faktor ekonomi merupakan salah satu hambatan paling nyata. Anak menyampaikan bahwa kebutuhan sederhana seperti buku tulis dan perlengkapan

sekolah tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Orang tua pada umumnya bekerja sebagai buruh kasar atau pekerjaan tidak tetap sehingga pendapatan keluarga tidak stabil. Akibatnya, keluarga lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan daripada kebutuhan pendidikan.

Temuan tersebut memperkuat penelitian (Khairani et al., 2025) yang menempatkan keterbatasan sumber daya ekonomi sebagai salah satu faktor utama putus sekolah di Papua. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian (Berangka, 2022) di Kelurahan Maro, Merauke, yang menunjukkan bahwa masalah ekonomi keluarga berhubungan erat dengan ketidakmampuan anak melanjutkan pendidikan.

Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kemiskinan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan uang sekolah. Bahkan ketika SPP bukan menjadi persoalan utama, kebutuhan lain seperti buku, alat tulis, seragam, tas, dan transportasi tetap menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan memiliki biaya tidak langsung yang bagi keluarga miskin dapat menjadi faktor penentu keberlanjutan sekolah.

Tekanan ekonomi menyebabkan anak mengambil peran produktif untuk membantu keluarga. Ketika anak mulai bekerja atau membantu orang tua mencari penghasilan, waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk belajar beralih kepada aktivitas ekonomi. Dengan demikian, ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai faktor langsung, tetapi juga menghasilkan mekanisme tidak langsung yang mengurangi kesempatan anak untuk bersekolah.

b. Faktor budaya dan norma gender

Selain ekonomi, penelitian menemukan bahwa norma budaya tertentu turut memengaruhi keputusan pendidikan anak. Salah satu temuan penting adalah pandangan bahwa anak perempuan pada akhirnya akan kembali ke kehidupan domestik setelah menikah sehingga pendidikan formal yang lebih tinggi dianggap kurang penting.

Temuan penelitian tidak bermaksud menyatakan bahwa budaya Papua secara keseluruhan menjadi penyebab putus sekolah. Yang ditemukan adalah norma atau pandangan tertentu dalam komunitas yang dapat memengaruhi prioritas keluarga terhadap pendidikan anak perempuan. Karena itu, persoalannya bukan budaya sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan bagaimana Gereja dan komunitas dapat membedakan nilai budaya yang mendukung kehidupan bersama dari norma yang berpotensi membatasi kesempatan pendidikan anak.

Temuan ini sejalan dengan model pendampingan berbasis kearifan lokal yang dikembangkan dalam kajian (Marnina et al., 2023), yang menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik budaya lokal ke dalam pendampingan anak. Dalam konteks Lingkungan Santo Paulus, pendekatan tersebut relevan karena pemimpin adat masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan anak putus sekolah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan Gereja dan keluarga saja, tetapi perlu melibatkan tokoh adat sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan pendidikan anak. Pendekatan demikian

memungkinkan Gereja untuk hadir dalam dialog dengan budaya setempat, bukan berhadapan secara konfrontatif dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Temuan mengenai norma gender justru memperkuat kebutuhan akan pastoral kontekstual. Gereja perlu hadir sebagai mitra dialog budaya, bukan sebagai pihak yang datang untuk menghakimi atau menggantikan budaya lokal.

c. Faktor sosial, lingkungan, jarak sekolah, dan lemahnya pengawasan

Faktor sosial dan lingkungan juga memperkuat risiko putus sekolah. Hasil wawancara dengan orang tua, menggambarkan lingkungan pergaulan sebagai lingkungan yang cukup keras dan berpotensi memengaruhi anak. Jarak sekolah yang relatif jauh juga menjadi persoalan karena keluarga tidak selalu mampu menyediakan biaya transportasi. Di sisi lain, orang tua yang harus bekerja sejak pagi mengalami keterbatasan dalam mengawasi aktivitas anak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan anak untuk bersekolah tidak hanya ditentukan oleh motivasi individual. Anak berada dalam ekosistem sosial yang terdiri dari keluarga, teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan komunitas. Apabila ekosistem tersebut tidak memberikan dukungan yang cukup, risiko anak meninggalkan sekolah menjadi lebih besar.

Perspektif pendampingan berbasis komunitas, menunjukkan bahwa pendampingan anak tidak dapat hanya diarahkan kepada anak. Keluarga dan lingkungan sosial juga harus menjadi bagian dari intervensi. (Arifin & Hermino, 2018) menekankan pentingnya kolaborasi Gereja dan keluarga dalam pendidikan anak Papua. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan

menunjukkan bahwa dukungan tersebut perlu diperluas kepada komunitas lingkungan dan aktor sosial lainnya.

d. Kondisi internal anak: bukan kehilangan keinginan untuk belajar

Temuan yang sangat penting adalah bahwa anak-anak yang menjadi informan tidak menunjukkan bahwa putus sekolah semata-mata disebabkan oleh hilangnya minat terhadap pendidikan. Sebaliknya, mereka masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan apabila tersedia dukungan yang memadai.

Temuan ini penting secara teoretis karena mengoreksi pemahaman yang terlalu sederhana bahwa anak putus sekolah adalah anak yang tidak mau sekolah. Dalam konteks penelitian ini, putus sekolah lebih tepat dipahami sebagai hasil dari keterbatasan pilihan yang tersedia bagi anak. Anak memiliki aspirasi pendidikan, tetapi aspirasi tersebut berhadapan dengan tekanan ekonomi, lingkungan sosial, jarak, dan kondisi keluarga.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan pastoral konseling yang dikemukakan (Meran, 2023) dan (Waruwu & Marbun, 2025), yang menempatkan pemulihan harapan dan kepercayaan diri sebagai bagian penting dalam pendampingan anak. Karena anak masih memiliki harapan untuk kembali bersekolah, Gereja memiliki titik masuk pastoral yang sangat penting: memelihara harapan tersebut dan mengubahnya menjadi peluang nyata untuk kembali mengakses pendidikan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dalam konteks di Lingkungan Santo Paulus, putus sekolah tidak dapat dijelaskan melalui hubungan sebab-akibat yang sederhana. Ekonomi yang lemah dapat menyebabkan anak bekerja; aktivitas bekerja

mengurangi waktu belajar; kurangnya pengawasan memperbesar pengaruh lingkungan sosial; norma tertentu dapat mengurangi prioritas pendidikan; sementara jarak sekolah dan biaya transportasi memperbesar beban keluarga. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut membentuk lingkaran kerentanan pendidikan. Karena itu, intervensi yang hanya menysasar satu faktor kemungkinan besar tidak cukup. Bantuan uang tanpa penguatan keluarga, misalnya, belum tentu mampu mengubah norma sosial. Demikian pula penyadaran mengenai pentingnya pendidikan tanpa bantuan terhadap hambatan ekonomi belum tentu membuat anak kembali bersekolah.

4.3.3 Strategi Pastoral yang Dapat Dikembangkan Gereja

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, strategi pastoral bagi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus perlu diarahkan dari pola pelayanan yang masih bersifat insidental dan karitatif menuju pendampingan yang terencana, terpadu, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Strategi tersebut tidak cukup hanya menjawab kebutuhan spiritual anak dan keluarga, tetapi perlu menyentuh faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, pendidikan, serta kelembagaan yang berkontribusi terhadap terjadinya putus sekolah.

Arah tersebut sejalan dengan prinsip pendampingan anak yang menjadi landasan penelitian, yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak PBB (1989), non-diskriminasi (Dhamayanti & Suparno, 2015), partisipasi aktif anak (Ife, 2002), pendekatan holistik dan terpadu (Congregation for Catholic Education, 2014), serta keberlanjutan (Ife, 2002). Dalam konteks penelitian ini, kelima prinsip tersebut menuntut agar Gereja tidak hanya

memberikan pelayanan kepada anak, tetapi membangun proses pendampingan yang menempatkan anak sebagai subjek, memperhatikan keseluruhan kehidupannya, melibatkan keluarga dan komunitas, serta memastikan adanya kesinambungan dukungan sampai anak memperoleh kembali akses pendidikan.

a. Penguatan kerygma melalui pendampingan keluarga yang dialogis

Strategi pertama adalah memperkuat kerygma melalui pendampingan iman dan penyadaran pendidikan bagi keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pewartaan mengenai pentingnya pendidikan belum dirasakan secara merata oleh keluarga. Karena itu, katekese dan kunjungan pastoral perlu diarahkan pada pengalaman konkret keluarga, bukan hanya berupa nasihat umum mengenai pentingnya sekolah.

Pendampingan perlu membuka ruang dialog mengenai hambatan ekonomi, kondisi keluarga, lingkungan sosial, harapan terhadap masa depan anak, serta kemungkinan dukungan yang dapat diberikan Gereja. Pendekatan *client-centered* menjadi relevan karena keluarga dan anak perlu terlebih dahulu didengarkan sebelum Gereja menentukan bentuk bantuan atau pendampingan. Dengan demikian, kerygma tidak berhenti pada penyampaian pesan iman, tetapi menjadi proses pewartaan yang membangun kesadaran, memulihkan harapan, dan mendorong keluarga mengambil keputusan yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

b. Mengembangkan koinonia menjadi komunitas pendukung pendidikan

Kekuatan koinonia yang telah berjalan di Lingkungan Santo Paulus perlu dikembangkan menjadi komunitas pendukung pendidikan anak. Kegiatan ibadat,

koor, kerja bakti, dan pertemuan lingkungan dapat menjadi ruang untuk membangun kedekatan sekaligus mengidentifikasi anak yang mengalami atau berisiko mengalami putus sekolah.

Pengurus lingkungan bersama OMK dan umat dapat mengembangkan pendataan sederhana, kunjungan keluarga, teman belajar, pendampingan rutin, dan komunikasi dengan orang tua. Dengan demikian, koinonia tidak hanya menghasilkan rasa kebersamaan, tetapi berkembang menjadi jejaring sosial yang secara nyata mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

Strategi ini sejalan dengan pendekatan *community-based*, yang menempatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian penting dalam proses pendampingan. Kekuatan relasional yang telah dimiliki Gereja menjadi modal awal untuk membangun sistem pendampingan tanpa harus melepaskan karakter kekeluargaan yang telah hidup dalam komunitas.

c. Transformasi diakonia dari bantuan karitatif menuju dukungan pendidikan berkelanjutan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan sembako telah dirasakan manfaatnya oleh keluarga, tetapi belum secara langsung menjawab kebutuhan pendidikan anak yang bersifat berkelanjutan. Karena itu, diakonia perlu dikembangkan dari bantuan karitatif menuju pemberdayaan dan keberlanjutan pendidikan.

Bantuan sembako tetap penting untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tetapi perlu dilengkapi dengan dukungan yang secara langsung berkaitan dengan

pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, beasiswa berbasis komunitas, bimbingan belajar, penggalangan dana pendidikan, dan rujukan kepada lembaga pemerintah atau lembaga sosial.

Arah tersebut sejalan dengan model misi integral (Anouw & Sigap, 2023) yang mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pembinaan spiritual, dan advokasi. Dengan demikian, diakonia tidak hanya berfungsi mengurangi kesulitan keluarga pada saat tertentu, tetapi membantu memulihkan kemampuan anak untuk memperoleh dan mempertahankan akses terhadap pendidikan.

d. Pengembangan pastoral konseling bagi anak

Temuan penelitian bahwa anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa harapan anak merupakan modal penting dalam pendampingan pastoral. Oleh karena itu, Gereja perlu menyediakan ruang bagi pastoral konseling yang memungkinkan anak menyampaikan pengalaman, harapan, kekhawatiran, dan hambatan yang mereka alami.

Pastoral konseling tidak diarahkan untuk menyalahkan anak karena putus sekolah, melainkan untuk membangun kembali kepercayaan diri, harapan, dan keberanian anak dalam merencanakan masa depannya. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian (Meran, 2023) mengenai konseling pastoral bagi anak di Merauke serta (Waruwu & Marbun, 2025) mengenai pendekatan *client-centered* dan REBT bagi anak putus sekolah. Oleh karena itu pendampingan pastoral perlu melihat anak bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai pribadi yang memiliki potensi, harapan, dan kemampuan untuk terlibat dalam menentukan masa depannya.

e. Integrasi kearifan lokal dan keterlibatan tokoh adat

Temuan mengenai pengaruh norma budaya dan posisi tokoh adat menunjukkan bahwa strategi pastoral tidak cukup hanya melibatkan Gereja, anak, dan orang tua. Tokoh adat perlu ditempatkan sebagai mitra strategis dalam pendampingan pendidikan anak.

Pendekatan berbasis kearifan lokal tidak berarti mempertentangkan pendidikan dengan budaya, tetapi mencari titik temu antara nilai budaya dan kepentingan terbaik bagi anak. Tokoh adat dapat dilibatkan dalam dialog mengenai masa depan anak, pentingnya pendidikan bagi keberlanjutan komunitas, serta upaya mempertahankan nilai budaya tanpa membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Strategi ini sejalan dengan model pendampingan berbasis kearifan lokal (Marnina et al., 2023) yang menekankan integrasi nilai, pengetahuan, dan praktik budaya lokal dalam pendampingan anak. Dengan pendekatan tersebut, Gereja dapat menjalankan pastoral yang kontekstual dan diterima oleh komunitas karena bertolak dari realitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

f. Mengembangkan martyria melalui advokasi hak pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi martyria masih perlu dikembangkan, terutama dalam bentuk advokasi hak pendidikan anak. Gereja belum memiliki mekanisme yang menghubungkan secara sistematis keluarga dengan sekolah, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya.

Dalam situasi tersebut, Gereja dapat menjalankan fungsi sebagai jembatan dan pembela hak pendidikan anak. Langkah awal dapat dilakukan melalui pendataan anak

yang putus sekolah, identifikasi penyebab dan kebutuhan mereka, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dan koordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah, YPPK, lembaga sosial, dan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak asli Papua. Sehingga martyria tidak hanya dipahami sebagai kesaksian iman melalui perkataan, tetapi juga sebagai kesaksian iman melalui keberpihakan dan tindakan nyata bagi martabat manusia. Gereja bergerak dari posisi sebagai pemberi bantuan menuju agen pastoral yang turut memperjuangkan perubahan kondisi yang menyebabkan anak kehilangan akses pendidikan.

g. Menempatkan anak sebagai subjek pendampingan

Strategi pastoral juga perlu memperkuat partisipasi aktif anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Keinginan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai informasi penelitian, tetapi perlu menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan.

Prinsip partisipasi aktif anak menurut (Ife, 2002) menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya. Oleh karena itu, Gereja perlu berdialog langsung dengan anak mengenai kebutuhan pendidikan, bentuk pendampingan yang mereka perlukan, hambatan untuk kembali ke sekolah, serta dukungan yang menurut mereka paling memungkinkan.

Dengan pendekatan tersebut, strategi pastoral tidak lagi sekadar dibuat untuk anak, tetapi dibuat bersama anak. Perubahan ini penting agar pendampingan benar-

benar sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman anak yang menjadi sasaran pelayanan.

h. Membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan

Seluruh strategi tersebut membutuhkan sistem pendampingan yang sederhana tetapi jelas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat lingkungan masih terdapat keterbatasan berupa data pendidikan anak yang belum diperbarui, belum tersedianya modul khusus pendampingan anak putus sekolah, serta belum adanya kerja sama formal dengan institusi pendidikan atau pemerintah.

Karena itu, Gereja perlu membangun mekanisme pendampingan yang mencakup pendataan dan pemutakhiran kondisi anak, identifikasi anak yang putus sekolah dan berisiko putus sekolah, pemetaan kebutuhan, kunjungan keluarga, pendampingan psikososial dan spiritual, dukungan pendidikan dan ekonomi, pelibatan tokoh adat dan komunitas, rujukan kepada sekolah dan pemerintah, serta pemantauan keberlanjutan pendidikan anak.

Sistem tersebut penting agar pendampingan tidak bergantung pada inisiatif pribadi pastor atau pengurus tertentu. Pendampingan perlu menjadi bagian dari mekanisme pelayanan lingkungan yang dapat diteruskan oleh pengurus berikutnya. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya berarti program berlangsung dalam waktu lama, tetapi juga berarti tersedianya sistem yang memungkinkan kebutuhan anak terus dikenali, ditindaklanjuti, dan dievaluasi.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi pastoral yang relevan bagi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus dapat dipahami sebagai

strategi pastoral integratif. Kerygma diarahkan untuk membangun kesadaran dan harapan keluarga; koinonia dikembangkan menjadi komunitas pendukung pendidikan; diakonia diarahkan dari bantuan karitatif menuju dukungan pendidikan yang berkelanjutan; pastoral konseling digunakan untuk memulihkan harapan dan kepercayaan diri anak; kearifan lokal dan tokoh adat diintegrasikan sebagai kekuatan komunitas; sedangkan martyria diwujudkan melalui advokasi hak pendidikan.

Keseluruhan strategi tersebut harus dilaksanakan dengan menempatkan anak sebagai subjek, melibatkan keluarga dan komunitas, serta dibangun dalam sistem yang berkelanjutan. Dengan demikian, Gereja tidak hanya hadir untuk membantu anak menghadapi dampak putus sekolah, tetapi juga berupaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah dan menciptakan kondisi yang memungkinkan anak kembali memperoleh pendidikan.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu disampaikan dengan jujur agar pembaca dapat memahami temuan dalam konteks dan cakupannya yang sebenarnya. Pertama, pengumpulan data dilakukan dalam periode yang relatif singkat (23-27 Juni 2026), sehingga temuan ini hanya mencerminkan kondisi pada satu titik waktu (*cross-sectional*) dan belum mampu menangkap dinamika perubahan peran pastoral Gereja dari waktu ke waktu, termasuk kemungkinan program advokasi atau bimbingan belajar yang mungkin dimulai setelah periode pengumpulan data berakhir.

Kedua, sebagai penelitian studi kasus tunggal (*single case study*) di satu lingkungan gerejawi, temuan mengenai pola ketimpangan dimensi pastoral dan faktor penyebab putus sekolah tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh lingkungan atau paroki lain di Keuskupan Agung Merauke. Meskipun terdapat kesamaan kondisi geografis dan sosial-budaya dengan lokasi penelitian sebelumnya (Berangka, 2022; Khairani et al., 2025; Meran, 2023), hal ini memberikan indikasi transferabilitas (*transferability*) yang cukup kuat pada konteks-konteks serupa, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk suku Marind Anim di Merauke. Keempat, data yang dianalisis berasal dari wawancara dan observasi yang bersifat retrospektif dan berbasis persepsi masing-masing informan, sehingga ada kemungkinan terjadinya bias ingatan (*recall bias*) serta kecenderungan untuk memberikan jawaban yang dianggap sesuai harapan peneliti (*social desirability*), terutama pada informan dari unsur pelaksana pastoral (PS dan PL).

Triangulasi sumber dan metode (wawancara, observasi, studi dokumen) yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkannya. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi makna dari temuan penelitian, melainkan justru membuka peluang untuk penelitian lanjutan, baik dalam bentuk perluasan jumlah informan maupun penelitian longitudinal untuk memantau implementasi strategi pastoral dari waktu ke waktu, maupun penelitian multikasus lintas lingkungan/paroki di Keuskupan Agung Merauke.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Gereja sebagai agen pastoral dalam mendampingi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah di Lingkungan Santo Paulus, Paroki Bambu Pemali, Keuskupan Agung Merauke, dapat disimpulkan bahwa fenomena putus sekolah merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan kemauan atau motivasi anak, tetapi merupakan hasil keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga, faktor budaya, lingkungan sosial, dan kondisi internal anak. Pada saat yang sama, Gereja telah memiliki modal pastoral berupa kebersamaan komunitas, pelayanan sosial, pewartaan, serta kehidupan iman umat, tetapi modal tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem pendampingan pendidikan yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan ketiga rumusan masalah penelitian, simpulan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, peran Gereja sebagai agen pastoral dalam pendampingan anak asli Papua yang mengalami putus sekolah telah berjalan, tetapi belum dilaksanakan secara seimbang pada keempat dimensi pastoral. Dimensi koinonia merupakan kekuatan yang paling nyata. Anak dan keluarga yang mengalami putus sekolah tetap diterima dan dilibatkan dalam kehidupan komunitas melalui ibadah, koor, kerja bakti, dan kegiatan lingkungan lainnya. Kehadiran tersebut memberikan rasa diterima dan tidak

sendirian bagi keluarga yang menghadapi persoalan. Dimensi diakonia juga telah diwujudkan melalui bantuan konkret, terutama sembako, yang dirasakan membantu keluarga ketika diterima. Namun, pelayanan tersebut masih dominan bersifat karitatif dan jangka pendek sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pendidikan yang bersifat struktural dan berkelanjutan, seperti biaya sekolah, perlengkapan pendidikan, dan transportasi anak. Dimensi kerygma telah dilaksanakan melalui kunjungan pastoral dan pewartaan mengenai kehidupan iman serta pentingnya pendidikan, tetapi belum menjangkau seluruh keluarga sasaran secara merata dan belum sepenuhnya berlangsung secara dialogis. Sementara itu, dimensi martyria, khususnya dalam bentuk advokasi hak pendidikan anak kepada sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait, merupakan dimensi yang paling lemah karena sampai penelitian dilakukan belum tersedia mekanisme advokasi struktural. Dengan demikian, Gereja di Lingkungan Santo Paulus telah berfungsi sebagai komunitas yang hadir, menerima, dan membantu, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi agen pastoral yang mengadvokasi dan mengupayakan perubahan kondisi struktural yang menyebabkan anak kehilangan akses pendidikan. Temuan ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan pastoral pada tingkat keuskupan yang mendukung pendidikan anak asli Papua dengan implementasinya pada tingkat lingkungan.

Kedua, faktor penyebab anak asli Papua mengalami putus sekolah bersifat multidimensional dan saling berinteraksi. Faktor ekonomi keluarga merupakan faktor yang paling dominan, terutama keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kondisi pekerjaan orang tua yang tidak menentu. Kondisi tersebut dapat

mendorong anak untuk membantu keluarga mencari penghasilan sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan semakin terbatas. Faktor budaya turut memengaruhi keputusan pendidikan anak melalui nilai dan norma yang masih hidup dalam masyarakat, termasuk pandangan tertentu mengenai peran anak dan prioritas pendidikan. Faktor sosial dan lingkungan juga berkontribusi melalui pengaruh teman sebaya, lemahnya dukungan lingkungan terhadap keberlanjutan pendidikan, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak. Adapun faktor internal anak lebih tepat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan dan keterbatasan yang mereka hadapi, bukan sebagai bukti bahwa anak tidak memiliki keinginan untuk belajar. Hal yang penting dari penelitian ini adalah bahwa anak masih memiliki harapan dan keinginan untuk kembali bersekolah apabila tersedia dukungan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, putus sekolah dalam konteks penelitian ini tidak tepat dipahami sebagai persoalan rendahnya motivasi anak semata, melainkan sebagai kondisi yang terbentuk dari interaksi antara tekanan ekonomi, budaya, sosial, dan kondisi internal anak.

Ketiga, strategi pastoral yang dapat dikembangkan Gereja perlu diarahkan pada perubahan dari pelayanan yang bersifat insidental menuju pendampingan yang terencana, terpadu, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Strategi tersebut perlu memperkuat kerygma melalui katekese keluarga dan pendampingan yang dialogis; mengembangkan koinonia menjadi komunitas pendukung pendidikan melalui pendataan, kunjungan keluarga, teman belajar, dan pendampingan rutin; mentransformasikan diakonia dari bantuan karitatif menuju dukungan pendidikan

yang berkelanjutan melalui perlengkapan sekolah, transportasi, beasiswa komunitas, bimbingan belajar, penggalangan dana, dan mekanisme rujukan; serta mengembangkan pastoral konseling untuk memulihkan harapan, kepercayaan diri, dan kesiapan anak untuk kembali bersekolah. Strategi tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis kearifan lokal melalui keterlibatan tokoh adat sebagai mitra strategis, serta pengembangan martyria melalui advokasi hak pendidikan dengan membangun hubungan antara keluarga, Gereja, sekolah, pemerintah, YPPK, dan lembaga sosial. Seluruh strategi tersebut harus menempatkan anak sebagai subjek pendampingan, sehingga anak dilibatkan dalam menentukan kebutuhan dan bentuk dukungan yang sesuai dengan pengalaman mereka. Pada akhirnya, seluruh pelayanan tersebut perlu didukung oleh sistem pendampingan yang mencakup pemutakhiran data anak, identifikasi anak yang putus sekolah dan berisiko putus sekolah, pemetaan kebutuhan, kunjungan keluarga, pendampingan psikososial dan spiritual, dukungan pendidikan dan ekonomi, pelibatan tokoh adat, rujukan kepada sekolah dan pemerintah, serta monitoring keberlanjutan pendidikan. Arah strategi ini sesuai dengan kebutuhan yang ditemukan dalam penelitian bahwa dukungan terhadap anak tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat, tetapi harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan anak memperoleh kembali dan mempertahankan akses pendidikan.

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Gereja memiliki modal sosial, spiritual, dan komunitas yang kuat untuk mendampingi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah. Persoalan utamanya bukan semata-mata ketiadaan

kepedulian Gereja, melainkan belum terbangunnya sistem pastoral pendidikan yang mampu menghubungkan kepedulian tersebut dengan kebutuhan anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan pastoral ke depan perlu bergerak dari kehadiran menuju pendampingan, dari bantuan menuju pemberdayaan, dari pewartaan satu arah menuju dialog, dari pelayanan internal menuju kolaborasi, dan dari kepedulian sosial menuju advokasi hak pendidikan. Dengan arah tersebut, Gereja tidak hanya membantu anak menghadapi dampak putus sekolah, tetapi turut mengatasi kondisi yang menyebabkan putus sekolah dan membuka peluang yang lebih besar bagi anak asli Papua untuk kembali memperoleh pendidikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Gereja, khususnya Paroki Bambu Pemali dan Lingkungan Santo Paulus

Gereja perlu mengembangkan pola pendampingan anak asli Papua yang mengalami putus sekolah dari pelayanan yang bersifat insidental menuju pendampingan pastoral yang terencana, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Untuk itu, Paroki dan pengurus lingkungan perlu membangun sistem sederhana untuk mendata anak yang mengalami putus sekolah maupun yang berisiko putus sekolah, mengidentifikasi penyebab dan kebutuhan masing-masing anak, serta melakukan kunjungan dan pendampingan secara berkala.

Penguatan pelayanan juga perlu dilakukan secara seimbang pada keempat dimensi pastoral. Kerygma perlu dikembangkan melalui pendampingan keluarga

yang dialogis; koinonia diperkuat menjadi jejaring komunitas pendukung pendidikan; diakonia dikembangkan dari bantuan karitatif menuju dukungan pendidikan yang berkelanjutan; sedangkan martyria diwujudkan melalui advokasi hak pendidikan anak. Gereja juga perlu menyediakan ruang pastoral konseling bagi anak dan melibatkan mereka secara aktif dalam menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Bagi Keuskupan Agung Merauke

Keuskupan Agung Merauke perlu memberikan penguatan kebijakan dan pendampingan kepada paroki-paroki dalam mengembangkan pastoral pendidikan bagi anak asli Papua, khususnya bagi anak yang mengalami putus sekolah atau berada dalam kondisi rentan putus sekolah. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman atau model pendampingan pastoral pendidikan yang dapat diadaptasi sesuai konteks masing-masing paroki.

Keuskupan juga perlu mendorong penguatan kapasitas pastor, pengurus lingkungan, katekis, OMK, dan pendamping pastoral agar memiliki kemampuan dalam pendampingan anak, konseling dasar, pemetaan masalah pendidikan, serta membangun jejaring dengan sekolah dan lembaga terkait. Dengan demikian, persoalan pendidikan anak tidak hanya menjadi perhatian pada tingkat lingkungan, tetapi menjadi bagian dari agenda pastoral Gereja secara lebih sistematis.

3. Bagi sekolah, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik, serta Pemerintah

Sekolah, YPPK, dan pemerintah daerah perlu membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat dengan Gereja dan keluarga dalam menangani anak yang

mengalami putus sekolah. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pendataan, identifikasi penyebab putus sekolah, mekanisme rujukan, dukungan biaya dan transportasi, serta fasilitasi anak untuk kembali memperoleh akses pendidikan.

Dalam konteks anak asli Papua, intervensi pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, dan latar belakang budaya anak. Karena itu, penyelesaian persoalan putus sekolah membutuhkan pendekatan kolaboratif sehingga tanggung jawab pendidikan anak tidak dibebankan hanya kepada keluarga atau Gereja.

4. Bagi orang tua dan komunitas masyarakat

Orang tua dan komunitas perlu meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak dengan menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari masa depan anak dan keluarga. Orang tua diharapkan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak mengenai kesulitan yang mereka alami serta mencari dukungan apabila menghadapi hambatan ekonomi atau sosial yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah.

Tokoh masyarakat dan tokoh adat juga perlu dilibatkan sebagai mitra dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pendidikan. Nilai-nilai budaya lokal tidak perlu dipertentangkan dengan pendidikan, tetapi dapat menjadi kekuatan untuk mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendorong anak untuk kembali dan tetap berada dalam pendidikan.

5. Bagi anak yang mengalami putus sekolah

Anak perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, harapan, dan rencana masa depannya. Keinginan anak untuk kembali bersekolah perlu dipandang sebagai modal penting dalam proses pendampingan, bukan sekadar sebagai harapan yang pasif.

Karena itu, anak perlu dilibatkan dalam menentukan bentuk dukungan yang mereka perlukan, termasuk kebutuhan pendidikan, bimbingan belajar, transportasi, pendampingan psikososial, maupun bentuk kegiatan lain yang dapat membantu mereka kembali memperoleh akses pendidikan. Pendampingan hendaknya membangun kembali kepercayaan diri anak dan menegaskan bahwa kondisi putus sekolah bukanlah akhir dari masa depan mereka.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai model pastoral pendidikan bagi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah dengan melibatkan lebih banyak paroki, wilayah pastoral, sekolah, tokoh adat, pemerintah, dan anak sebagai subjek penelitian. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan dan menguji secara empiris model pendampingan yang dihasilkan dari temuan penelitian ini, terutama berkaitan dengan efektivitas pendampingan keluarga, pastoral konseling, dukungan pendidikan berbasis komunitas, keterlibatan tokoh adat, dan advokasi hak pendidikan.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji lebih mendalam hubungan antara faktor ekonomi, budaya, sosial, dan kondisi internal anak dalam

memengaruhi keputusan putus sekolah, sehingga strategi yang dikembangkan tidak hanya bersifat pastoral tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual bagi anak asli Papua.

5.3 Implikasi Pastoral

Temuan penelitian ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi praktis bagi Gereja, tetapi juga memiliki implikasi terhadap cara Gereja memahami dan melaksanakan tugas pastoral dalam mendampingi anak asli Papua yang mengalami putus sekolah. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan pastoral perlu mengalami penguatan pada aspek keterpaduan pelayanan, orientasi pelayanan, penerjemahan kebijakan, pendekatan kontekstual, partisipasi anak, dan keberlanjutan sistem pendampingan.

a. Implikasi terhadap keterpaduan empat dimensi pastoral Gereja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerygma, koinonia, diakonia, dan martyria tidak dapat dijalankan secara terpisah dalam pendampingan anak putus sekolah. Kekuatan koinonia yang telah dirasakan oleh keluarga perlu dihubungkan dengan kerygma yang lebih dialogis, diakonia yang lebih berorientasi pada keberlanjutan pendidikan, dan martyria yang diwujudkan melalui advokasi hak pendidikan. Ketimpangan antar-dimensi terlihat dari kuatnya kebersamaan komunitas dan adanya bantuan sosial, sementara pewartaan belum dirasakan secara merata dan advokasi struktural belum berkembang.

Implikasinya, Gereja perlu memandang pastoral pendidikan sebagai pelayanan yang integratif. Pewartaan mengenai pentingnya pendidikan harus diikuti dengan

kehadiran komunitas, dukungan nyata, dan keberanian memperjuangkan akses pendidikan anak. Dengan demikian, pastoral tidak berhenti pada penyampaian nilai atau pemberian bantuan, tetapi bergerak menuju perubahan kondisi yang menghambat pendidikan anak.

b. Implikasi terhadap pergeseran paradigma pastoral: dari karitatif menuju transformatif

Temuan mengenai bantuan sembako dan kebutuhan pendidikan anak menunjukkan adanya perbedaan antara bantuan jangka pendek dan kebutuhan pendidikan yang bersifat berkelanjutan. Kondisi tersebut mengimplikasikan perlunya pergeseran paradigma pastoral dari pelayanan yang terutama bersifat karitatif menuju pelayanan yang bersifat pemberdayaan dan transformatif.

Gereja tetap perlu memberikan bantuan ketika keluarga mengalami kesulitan, tetapi bantuan tersebut perlu diarahkan untuk membuka kembali kemampuan anak dan keluarga dalam memperoleh akses pendidikan. Karena itu, pelayanan pastoral perlu bergerak dari sekadar menangani gejala putus sekolah menuju upaya memahami dan mengatasi kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan yang menyebabkan anak kehilangan akses pendidikan. Arah ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa pastoral pendidikan perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih advokatif dan struktural.

c. Implikasi terhadap penerjemahan kebijakan pastoral ke dalam praktik

Penelitian menunjukkan adanya jarak antara arah kebijakan pastoral pada tingkat Keuskupan Agung Merauke dengan praktik pendampingan pada tingkat lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pastoral yang secara normatif mendukung

pendidikan anak belum otomatis menjadi program yang terlaksana pada tingkat komunitas basis.

Implikasinya, diperlukan instrumen yang dapat menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan konkret, seperti pedoman atau modul pendampingan anak putus sekolah, sistem pendataan anak, mekanisme rujukan, pembagian tugas pendamping, serta pola kerja sama dengan sekolah dan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pastoral tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi praktik pelayanan yang dapat dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi.

d. Implikasi terhadap pastoral kontekstual dan inkulturasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki hubungan dengan keberlanjutan pendidikan anak. Karena itu, Gereja perlu mengembangkan pastoral yang kontekstual dan dialogis, bukan pendekatan yang berhadapan secara langsung dengan budaya lokal. Pelibatan tokoh adat menjadi penting karena mereka memiliki posisi sosial yang dapat membantu membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pendidikan anak.

Implikasinya, kearifan lokal perlu ditempatkan bukan hanya sebagai latar belakang pelayanan, tetapi sebagai sumber daya pastoral. Gereja perlu mencari titik temu antara nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan dialogis dengan tokoh adat, keluarga, dan komunitas lebih memungkinkan terjadinya perubahan dibandingkan pendekatan instruktif yang datang dari luar.

e. Implikasi terhadap penempatan anak sebagai subjek pastoral

Temuan bahwa anak masih memiliki keinginan untuk kembali bersekolah apabila memperoleh dukungan menunjukkan bahwa suara dan harapan anak merupakan bagian penting dalam perancangan pendampingan. Namun, suara tersebut belum menjadi dasar utama dalam penyusunan program pastoral. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran dari pendekatan yang cenderung top-down menuju pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek aktif.

Implikasinya, Gereja perlu melibatkan anak dalam mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan, memilih bentuk pendampingan, dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, program pastoral tidak hanya “dibuat untuk anak”, tetapi “dibuat bersama anak”. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa anak bukan sekadar penerima bantuan, melainkan pribadi yang memiliki suara, harapan, potensi, dan hak untuk menentukan masa depannya.

f. Implikasi terhadap penguatan sistem pendampingan berkelanjutan

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya kurangnya kegiatan pastoral, tetapi belum kuatnya sistem pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan masih sangat bergantung pada inisiatif personal pastor atau pengurus, sementara data anak, mekanisme rujukan, kerja sama kelembagaan, dan monitoring belum berkembang secara optimal.

Implikasinya, Gereja perlu membangun sistem sederhana yang memungkinkan proses pendataan, identifikasi, pemetaan kebutuhan, kunjungan keluarga, konseling, dukungan pendidikan, rujukan, pelibatan tokoh adat, kerja sama kelembagaan, dan

monitoring berlangsung secara berkesinambungan. Sistem tersebut penting agar pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pastor, pengurus lingkungan, atau pelayan pastoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Fiharsono;, Carey;, M. D., Beazley, Hyde;, M., & Harriot. (2026). Enhancing a Sense of School Belonging for Indigenous Students in Papua, Indonesia. *International Review of Education*, 72(1), 135–159. <https://doi.org/10.1007/s11159-025-10157-2>
- Alfridus Yorianto Sasi, & Emmeria Tarihoran. (2024). Peran Organisasi Misdinar dalam Pembentukan Karakter dan Iman Remaja. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral*, 3(2), 94–101. <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i2.410>
- Anam, K., Maisyaroh, & Wiyono, B. B. (2025). Transformasi Pendidikan Melalui Sekolah Berpola Asrama Gratis untuk Menekan Angka Putus Sekolah di Papua Selatan. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(4 Nopember), 6619–6634. <https://doi.org/10.58230/27454312.3090>
- Anouw, Y., & Sigap, H. (2023). Pelayanan Gereja (Kingmi) Di Tanah Papua Terhadap Anak Jalanan Kota Sorong. *Missio Ecclesiae*, 11(2), 71–85. <https://doi.org/10.52157/me.v11i2.182>
- Arifin, I., & Hermino, A. (2018). *The Role of Church and Parent in Early Childhood Education in the Central Highlands of Papua*. 244(Ecpe), 99–103.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota*.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) 2023*. https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html?utm_source
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2022). *Provinsi Papua dalam angka 2022*.
- Berangka, D. (2022). Implikasi Pendidikan Anak Dalam Keluarga Terhadap Angka Anak Putus Sekolah Di Kelurahan Maro Distrik Merauke. *Jurnal Masalah Pastoral*, 10(2), 44–59. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i2.62>
- Bevans, S. B., Schroeder, R. P., & Schroeder, R. (2004). *Constants in Context: A Theology of Mission for Today* (p. 488).
- Canonici, C. I. (2018). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici); Edisi Bahasa Indonesia*.
- Chairuwidha, S. (2019). Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap

- Mutu Lulusan Kelas IX di SMP IT Ar Ridwan (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Chelin. (2023). Pendidikan Di Papua Selatan (Bagian 1): Persebaran dan Penambahan Guru. In *Tiffa News*.
<https://www.tiffanews.co.id/berita/25043/pendidikan-di-papua-selatan-bagian-1-persebaran-dan-penambahan-guru/>
- Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*.
- Congregation for Catholic Education. (2014). *No Title Educating Today and Tomorrow: A Renewing Passion*.
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20140407_educare-oggi-e-domani_en.html
- CONGREGATION FOR CATHOLIC EDUCATION. (2014). *C ONGREGATION FOR C ATHOLIC E DUCATION EDUCATING TODAY AND TOMORROW A Renewing Passion*.
- Costa, F. M. L. (2023). Anak Putus Sekolah di Papua Mencapai 314.606 Jiwa. In *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/24/314606-anak-tidak-bersekolah-tersebar-di-empat-provinsi-baru>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2007). *Pedoman Umum Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*.
- Dhamayanti, Y., & Suparno, S. (2015). Keefektifan PAUD inklusi pada kesiapan anak memasuki sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 107. <https://doi.org/10.21831/jppm.v2i1.4847>
- Emanuel Riberu. (2022). *Uskup Agung Merauke sebut pelayanan pendidikan di pedalaman tidak berjalan*Title. <https://jubi.id/tanah-papua/2022/uskup-agung-merauke-sebut-pelayanan-pendidikan-di-pedalaman-tidak-berjalan/>
- Francis. (2015). *Laudato Si': On Care for Our Common Home*. In *Encyclical Letter Laudato Si' Of The Holy Father Francis On Care For Our Common Home*. Libreria Editrice Vaticana. file:///Users/macgarvin/Documents/Sente

Library.sente6lib/Contents/Attachments/Pope Francis/2015/Pope Francis 2015
Encyclical Letter Laudato Si' Of.pdf

- Francis. (2018). *Evangelii Gaudium [Apostolic exhortation on the proclamation of the gospel in today's world]*. Vatican Website. November 24, 2013.
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_en.pdf
- Gubbels, J. (2019). Risk Factors for School Absenteeism and Dropout : A Meta-Analytic Review. *Journal of Youth and Adolescence*, 1637–1667.
<https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5>
- Hernawati, R., Panie, M. Y., Neonufa, S., & Tajuddin, A. I. (2025). *School Dropout in the Indonesia-Timor Leste Border: Moderating Role of Social Environment and Learning Motivation*. 16, 748–762.
- Ife, J. (2002). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (2nd ed.). Pearson Education Australia.
- Joseph, L. S., Sari, N. P., & Manusiwa, J. E. (2025). Panggilan Gereja untuk Memperjuangkan Keadilan Pendidikan. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 10(1), 425–434. <https://doi.org/10.30648/dun.v10i1.1801>
- Kenelak, Y., & Ziraluo, T. D. (2025). Solusi Kesenjangan Pendidikan Anak Sekolah Minggu berdasarkan Markus 10:13-16 pada Gereja GIDI Wilayah Bogo – Lembah Baliem. *Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 116–134. <https://doi.org/10.53827/lz.v8i1.8>
- Khairani, A., Hakiki, N. I., & Yopan, M. (2025). Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 45–51. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6510>
- Keuskupan Agung Merauke (KAMe). (2010). Program Kerja Jangka Panjang Keuskupan Agung Merauke: Musyawarah Pastoral (MUSPAS) KAMe 2010. Keuskupan Agung Merauke.
- Keuskupan Agung Merauke (KAMe). (2011). Musyawarah Pastoral (MUSPAS) KAMe 2011. Keuskupan Agung Merauke.

- Keuskupan Agung Merauke (KAMe). (2012). Musyawarah Pastoral (MUSPAS) KAMe 2012: Pemberdayaan dan Pengembangan Manusia yang Bermartabat Menuju Kesejahteraan Hidup Anak-anak Allah. Keuskupan Agung Merauke.
- Keuskupan Agung Merauke (KAMe). (2013). Musyawarah Pastoral (MUSPAS) KAMe 2013. Keuskupan Agung Merauke.
- Keuskupan Agung Merauke (KAMe). (2017). Musyawarah Pastoral (MUSPAS) KAMe 2017: Keluarga Keuskupan Agung Merauke yang Beriman. Keuskupan Agung Merauke.
- Klein, M., & Sosu, E. (2025). School absences, academic achievement, and adolescents' post-school destinations. *Oxford Review of Education*, 51(3), 339–356. <https://doi.org/10.1080/03054985.2024.2308520>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Identifikasi Potensi Korupsi pada Anggaran Pendidikan*.
- Konsili Vatikan II. (1965a). Gravissimum Educationis. In *The Oxford Dictionary of the Christian Church* (Vol. 1, p. 809). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190625795.003.0016>
- Konsili Vatikan II. (1965b). Seri Dokumen Gerejawi No. 19: Gaudium et Spes. *Dokpen KWI*, 13(19), No. 26-30.
- Kristi Kristi, Aristia Heronia Agrecya Huwaa, Omega Ritawaemahu, & Sofenda Putri Stevany Soulissa. (2025). Panggilan Gereja Memperjuangkan Realitas Ketidakadilan Pendidikan Anak. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(3), 624–635. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i3.7100>
- KWI. (2019). *Pertemuan Pengurus Lengkap Komkat KWI 2019 – KomKat KWI*.
- Lizardo, J. (2022). *Refleksi Kehidupan Gereja Perdana dalam Praktik Gereja Virtual*. 6(2), 209–221.
- Madaniah, F., Nurjannah, S., & Suryandari, M. (2023). *Jurnal Pengeritian Anak*. 1, 418–424.
- Marnina, Santo, Z., & Anggawirya, A. M. (2023). Pembinaan Anak-Anak Marind-Papua Putus Sekolah Belajar Bahasa Inggris Melalui Kursus Intensif Guna. *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)*, 1(1), 100–110.

- Masing, M., & Astuti, K. (2021). Putus sekolah sebagai Tantangan Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). *Seminar Nasional Psikologi Dan Ilmu Humaniora (SENAPIH)*, 1(1), 140–148.
<https://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/1234>
- Meran, M. (2023). Konseling Pastoral Sebagai Kebutuhan Pendampingan Bagi Anak Jalanan Di Kelurahan Maro-Distrik Meruake. *Jurnal Masalah Pastoral*, 11(1), 84–100. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v11i1.53>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulait, M. (2017). Gereja Katolik dalam Bayang-Bayang Konflik Papua-Jakarta. *Studia Philosophica et Theologica*, 17(2), 163–200.
- Natalie, T., Putra, M. J. A., & Syafitra, V. (2025). Dampak Lingkungan Teman Sebaya Pada Kasus Anak Putus Sekolah di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. *Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(2), 358–364. <https://doi.org/10.33394/jtni.v11i2.16556>
- Noordegraaf, D. A. (2011). *Orientasi Diakonia Gereja : teologi dalam perspektif reformasi* (pp. 1–4).
- Nurul Janah. (2020). (PKH) DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) SKRIPSI OLEH : NURUL JANNAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (PKH) DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) S.
- Parker, L., & Sudibyo, L. (2024). Why young people leave school early in Papua, Indonesia, and education policy options to address this problem. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 54(1), 146–162.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2022.2084037>
- Republik Indonesia. (1945), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. (2003), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

- Republik Indonesia. (2008), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (2021), Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
- Shanty, M. V., Mahadtir, M., Awaluddin, A., Natalia, D., Ramadani, R. A., & Aswi, A. (2024). Statistical Modeling and Factors Influencing School Dropout in Indonesia: A Review. *Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*, 13(1), 68. <https://doi.org/10.35580/sainsmat131608032024>
- Simon, J. C. (2013). Merangkul atau Meniadakan. In *Te Deum (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.51828/td.v11i2.138>
- Sirait, R. A. (2019). Pengaruh Jarak Ke Sekolah Terhadap Angka Partispasi Dan Putus Sekolah Smp Di Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i1.24>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sumule, A. I., & Matualage, A. (2023). After Subsistence Prosperity: Food Security Challenges for Residents in Remote Papua. *Global International Journal of Innovative Research*, 1(3), 323–328. <https://doi.org/10.59613/global.v1i3.383>
- Tong, Y., Wang, S., Cao, L., Zhu, D., Wang, F., Xie, F., Zhang, X., Wang, G., & Su, P. (2023). School dropouts related to mental disorders: A systematic review and meta-analysis. *Asian Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/0.1016/j.ajp.2023.103622>
- United Nations General Assembly. (1989). Convention on the Rights of the Child, UN document A/RES/44/25. *United Nations*, 29(1), 38–48. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>
- Waruwu, J., & Marbun, R. C. (2025). *Pendampingan Pastoral Konseling Kepada Anak Putus Sekolah Dengan Pendekatan Client-Centered (Berpusat pada*

klien) dan Rasional Emotif Behavior Therapy (Terapi perilaku rasional-emotif) Agar Percaya Diri gembala , merawat , menolong , menjaga , dan mau melindungi orang lain . Konseling dalam masalahnya dan menjadikan klien memiliki kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya . bahwa mereka harus meninggalkan bangku sekolah tanpa kehilangan harapan dan merasa Pengertian Client Centered (Berpusat pada klien) Teori ini disebut juga dengan psikoterapi non-direktif , adalah suatu sistem yang.

Widjayatri. (2025). Klasifikasi alasan putus sekolah: Faktor internal dan eksternal. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.

Yermiasih, O., Harisantoso, I. T., & Suprabowo, G. Y. A. (2023). Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak GKJW Mewujudkan Gereja Ramah Anak. *Integritas: Jurnal Teologi*, 5(2), 164–178.
<https://doi.org/10.47628/ijit.v5i2.149>

Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (10th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
Jalan Misi II, Mandala, Merauke, Papua Selatan, 99616
Telp. 0971-3330264 | Email: humas@stkyakobus.ac.id | www.stkyakobus.ac.id

Nomor : 123/STK/VI/2026
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pastor RD. Samson Walewawan
Paroki St Yosep Bambu Pemali
Di Jalan RE Martadimta

Dengan hormat,

Melalui surat ini Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Yohana Mariana Mabur
N I M	: 2202056
Program Studi	: Pendidikan Keagamaan Katolik
Judul Skripsi	: Peran Gereja sebagai Agen Pastoral Dalam Pendampingan Anak Asli Papua Yang Mengalami Putus Sekolah di Lingkungan St. Paulus Paroki Bambu Pemali Keuskupan Agung Merauke

Adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) di kampus kami. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuannya untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di instansi/wilayah yang Bapak/Ibu pimpin mulai dari tanggal 19 Juni 2026 s.d. 29 Juni 2026.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.





Juni 2026
Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
Dr. Donatus Wca, S.Ag., Lic.Lur.

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Program Studi
2. Ketua LP2M
3. Ketua Lingkungan Santo Paulus Paroki Santo Yosep Bambu Pemali Merauke di Tempat
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2. Wawancara dengan Anak Putus Sekolah Lingkungan Santo Paulus



Lampiran 3. Wawancara dengan Orang Tua dari Anak yang Mengalami Putus Sekolah



Lampiran 4. Wawancara dengan Ketua Lingkungan Santo Paulus

